

Milik Depdiknas
Tidak diperdagangkan



KETERLIBATAN ULAMA DI DIY PADA MASA PERANG KEMERDEKAAN PERIODE 1945 - 1949

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
JAKARTA
2000**

Milik Depdiknas
Tidak diperdagangkan

**KETERLIBATAN ULAMA DI DIY
PADA MASA PERANG KEMERDEKAAN
PERIODE 1945--1949**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
JAKARTA
2000**

**KETERLIBATAN ULAMA DI DIY PADA MASA PERANG
KEMERDEKAAN PERIODE 1945--1949**

Tim Penulis : Tashadi
Darto Harnoko
Nurdiyanto

Penyunting : Mohammad Iskandar

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh : Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional Direktorat
Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal
Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional

Jakarta 2000

Edisi 2000

Dicetak oleh : CV. Putra Prima

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Karya-karya sejarah dengan berbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional (Proyek PKSN), dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan banyak pihak akan menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses peristiwa. Disamping itu, para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai kesejarahan, baik mengenai kepahlawanan, kejuangan, maupun perkembangan budaya yang terungkap dari paparan yang terdapat dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku-buku karya Proyek PKSN itu tidak luput dari berbagai kelemahan : isi, bahasa, maupun penyajiannya, namun kami menyakinkan pembaca bahwa kesalahan dan kelemahan itu tidaklah disengaja. Untuk itu, diharapkan kepada pembaca untuk memberikan kritik, saran perbaikan terhadap karya-karya Proyek PKSN ini. Kritik dan saran itu tentu akan sangat berguna untuk memperbaiki karya-karya proyek ini.

Kepada para penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung

maupun tidak langsung dalam mewujudkan karya-karya
Proyek PKSN sebagaimana adanya ditangan pembaca, kami
sampaikan terima kasih.

Jakarta, Juni 2000

Direktur Jenderal Kebudayaan



IGN. Anom

NIP. 130353848



PENGANTAR

Buku *Keterlibatan Ulama di DIY Pada Masa Perang Kemerdekaan Periode 1945--1949*, ini merupakan satu di antara hasil pelaksanaan kegiatan penelitian/penulisan yang diselenggarakan Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2000.

Buku ini menguraikan tentang peranan ulama pada masa revolusi kemerdekaan di DIY.

Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk menambah khasanah sejarah Indonesia dan memberi informasi yang memadai bagi mereka yang berminat dan dapat menjadi bahan peningkatan kesadaran sejarah masyarakat terutama generasi penerus bangsa.

Jakarta, Juni 2000

**Pemimpin Proyek Peningkatan
Kesadaran Sejarah Nasional**

Wiwi Kuswiah
NIP. 131125902

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Perumusan Masalah	1
1.2 Metode	2
1.3 Scope Penulisan/Ruang Lingkup Penulisan	3
1.4 Ruang Lingkup Materi	3
1.5 Tinjauan Pustaka	3
BAB II MENGENAL SITUASI DIY PADA AWAL KEMERDEKAAN	7
BAB III KONDISI DAN AKTIVITAS ULAMA DI DIY PERIODE 1945-1949	27
BAB IV KETERLIBATAN ULAMA DI DIY PADA MASA REVOLUSI FISIK 1945-1949	
4.1 Masa Agresi Belanda I	59
4.2 Peranan Ulama Dalam Penumpasan Pemberontakan PKI Pada Tahun 1948	65
4.3 Peranan Ulama Dalam Agresi Belanda II	70
BAB V PENUTUP	135
SUMBER PUSTAKA	139

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Perumusan Masalah

Perlawanan oleh hampir seluruh lapisan rakyat Yogyakarta periode 1945-1949 yang berhasil secara gemilang menghadapi tentara Belanda dapat dikatakan sebagai suatu gerakan revolusi. Dalam peristiwa ini, rakyat Yogyakarta dan sekitarnya (DIY) secara bersama-sama melawan Tentara Belanda dan kenyataannya melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Fenomena yang muncul pada saat itu menjadi bagian dari api semangat yang berkobar-kobar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Menurut anggapan umum revolusi adalah gejala sejarah yang penuh gejolak, ledakan kekerasan, konflik sosial, perjuangan politik, pendek kata segala sesuatu yang menimbulkan krisis politik yang membawa disintegrasi orde sosial yang ada, serta merombak struktur kekuasaan sehingga melahirkan orde sosial politik baru. Di sinilah terletak makna revolusi sebagai tonggak sejarah yang menandai akhir periode lama dan membawa suatu masyarakat keambang pintu jaman baru.¹

Keberhasilan revolusi Indonesia tempo hari, pada dasarnya bukanlah semata-mata produk kelompok tertentu, akan tetapi merupakan usaha dan peran serta masyarakat secara luas yang diwujudkan dalam segala bentuk kegiatan yang merupakan modal terjadinya revolusi.²

Banyak kisah yang belum terungkap tentang revolusi di tingkat lokal khususnya tentang keterlibatan ulama di DIY pada periode 1945-1949. Konon kabarnya kaum ulama di DIY, memiliki peran penting dalam kisah revolusi rakyat itu siapa mereka, kaum ulama itu. Dalam kajian ini pengertian ulama dimaksudkan tidak terkait pada satu agama tertentu tetapi berbagai tokoh agama yang memiliki otoritas karismatik dan mempunyai pengaruh yang kuat di lingkungan masyarakat. Mereka mampu menggerakkan masyarakat untuk kepentingan tertentu termasuk di dalamnya gerakan-gerakan politik melawan penjajahan.³ Para ulama itu bahkan ada kalanya memimpin secara langsung di medan perang, namun kadang-kadang juga dimintai nasehat-nasehat yang dapat menambah keyakinan para pejuang dalam bertempur. Sebagai contoh KH. Turmudhi dari pesantren Beguron Demak memimpin langsung 20 orang santri di medan pertempuran di Semarang Timur melawan tentara Jepang sambil memberi komando maju dengan teriakan takbir "Allah Akbar". Dengan semangat kepahlawanannya itu akhirnya KH. Turmudhi gugur di medan perang.⁴

Oleh karena itu orientasi penelitian ini lebih menekankan bagaimana kemenangan dicapai, sampai seberapa jauh kontribusi ulama pada masa revolusi fisik. Bagaimana hubungan ulama dengan laskar-laskar lain. Simbol-simbol kharisma apa yang dipakai untuk menggalang kekuatan para pejuang. Kisah-kisah tersebut sampai sejauh ini belum diulas dalam penulisan sejarah terutama periode revolusi fisik di tingkat lokal.

1.2 Metode

Langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis yang proses pengerjaannya melibatkan langkah-langkah tertentu menurut norma-norma disiplin sejarah. Data-data yang dikumpulkan dari bermacam-macam jenis materi diseleksi dan di rangkaikan ke dalam hubungan fakta hingga membentuk pengertian-pengertian yang

kemudian dituangkan ke dalam bentuk penulisan. Sumber-sumber yang dipergunakan dalam penulisan ini, penulis telah berusaha memanfaatkan beberapa macam jenis sumber, antara lain: buku-buku, arsip pribadi dan ada pula yang berupa hasil rekaman sehari-hari seperti surat kabar, brosur, majalah maupun arsip-arsip lokal. Di samping itu sebagai bahan perbandingan penulis juga menggunakan metode wawancara yang dikenal dengan nama metode sejarah lisan. Dengan pendekatan sejarah lisan ini akan banyak keterangan-keterangan baru yang tidak terdapat dalam dokumen. Hal ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan substansi penulisan sejarah kontemporer Indonesia.

1.3 Scope Penulisan/Ruang Lingkup Penulisan

- Ruang lingkup temporal penelitian ini mengambil dimensi waktu periode perang kemerdekaan 1945-1949.
- Ruang lingkup spesial penelitian ini mengambil wilayah Yogyakarta, Bantul, Sleman, Kulonprogo, Gunungkidul.

1.4 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi mencakup sampai seberapa jauh keterlibatan ulama di DIY pada masa perang kemerdekaan, nasehat-nasehat apa yang dipakai untuk menggalang para pejuang dalam bertempur. Bagaimana hubungan para ulama dengan laskar-laskar dalam menggalang persatuan untuk kemerdekaan. Simbul-simbul apa yang dipakai untuk menggalang kekuatan, dan peran/keterlibatan lainnya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Buku yang menarik dan sangat konseptual adalah karya Sartono Kartodirdjo yang berjudul *Kepemimpinan Dalam Sejarah Indonesia*, tahun 1974. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa Haji, ulama semacam elite religius mempunyai kewibawaan sosial

yag tinggi di kalangan rakyat pedesaan. Oleh karena itu wajar apabila nasehat-nasehat mereka itu selalu dianut para pengikutnya dan mudah pula mengerahkan rakyat. Mereka mempunyai otoritas kharismatis tidak hanya di kalangan murid-muridnya, tetapi juga di kalangan rakyat luas.

Selain itu lihat juga karya T. Ibrahim Alfian dalam makalah berjudul *Dimensi Ideologi Dalam Perjuangan Melawan Kolonialisme*. Makalah ini sangat berguna untuk melihat sampai seberapa dimensi ideologi itu mewarnai perjuangan untuk mengusir penjajah.

Bahkan Sartono Kartodirdjo dalam bukunya yang berjudul *Ratu Adil* menjelaskan bahwa para pemimpin keagamaan biasanya mempunyai hubungan kekuatan dengan supra natural yang berhubungan dengan arwah nenek moyang.

CATATAN BAB I PENDAHULUAN

1. Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo (Editor), *Revolusi Perancis*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 1989, hal V.
2. Stanley P. Wagner. *The End of Revolution a New Asseesment of Today's Rebellions*. New York: Barnes and Company, NC 1970. Hal 11-20 lihat juga. Crou Brinton, *Anatomi Revolution* Jakarta: Bharata 1962. Hal 98-99.
3. Sartono Kartodirdjo. *Protest Movements In Rural Java: London*; Oxford University Press, 1975, hal 4-80, lihat juga Sartono Kartodirdjo, Ratu Adil, Jakarta, Sinar Harapan 1984. Hal 18, lihat juga Sartono Kartodirdjo *Kepemimpinan Dalam Sejarah Indonesia Majalah*, Pusara, 1974.
4. Drs. Tashadi, dkk. *Sejarah Perjuangan Hisbullah Sabilillah Divisi Sunan Bonang*, Yayasan Bhakti Utama, Surakarta bekerjasama MSI Cabang Yogyakarta, cetakan I, tahun 1957 halaman 51.

BAB II

MENGENAL SITUASI DIY PADA AWAL KEMERDEKAAN

Tanggal 17 Agustus 1945 pukul 12.00 waktu Tokyo, atau pukul 10.30 waktu Jawa, atau pukul 10.00 WIB, atas nama bangsa Indonesia teks proklamasi dibacakan oleh Ir. Sukarno dengan didampingi Drs. Moh. Hatta.¹ Dengan proklamasi kemerdekaan itu tercapailah Indonesia merdeka. Peristiwa besar itu sama sekali tidak berkait dan terikat oleh janji-janji Pemerintah Jepang, sebagaimana pernah diberitakan bahwa pemerintah Jepang kelak di kemudian hari akan memberi hadiah berupa kemerdekaan.

Peristiwa itu, menyebabkan pemerintah Jepang segera berusaha membendung berita tersebut, agar tidak sampai meluas. Usaha itu dilaksanakan dengan secepat-cepatnya terutama menjaga kantor pusat siaran radio di Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Dengan maksud agar jangan sampai direbut oleh pemuda Indonesia. Namun, tidak berapa lama kemudian datanglah sekelompok pemuda dan mahasiswa dari Asrama Prapatan 10 yang dipelopori oleh Chairul Saleh dengan tujuan untuk merebut gedung siaran radio tersebut. Setelah berhasil melucuti penjaga gedung itu, dengan tanpa persetujuan dan sepengetahuan pemerintah Jepang berita proklamasi itu segera disiarkan ke penjuru tanah air.²

Bersamaan dengan itu, para petugas Kantor Berita "Domei" Pusat Jakarta juga berusaha agar berita proklamasi itu dapat

disiarkan melalui "Morsecast Domei". Berkat kerjasama yang baik antara pemuda dengan para petugas yang ada di kantor berita itu, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia berhasil disiarkan ke seluruh penjuru tanah air, bahkan sampai ke luar negeri.³

Bagi masyarakat daerah Yogyakarta pada umumnya, berita proklamasi itu tidak secara langsung dapat diterima dalam waktu yang bersamaan. Berita proklamasi yang disiarkan oleh kantor berita "Domei" pusat Jakarta, baru dapat diterima oleh kantor berita "Domei" Cabang Yogyakarta pada sekitar pukul 12.00 siang hari. Baru beberapa saat berita diterima dan segera akan disebarluaskan, muncul berita susulan dari *Gunsaikanbu* agar berita yang sangat penting itu jangan sampai diumumkan kepada masyarakat. Namun berkat kepiawaian para wartawan "Domei" Yogyakarta berita proklamasi itu tetap disebarluaskan secara sembunyi-sembunyi, walaupun hanya dari mulut ke mulut terutama di kalangan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda. Kebetulan sekali pada hari itu adalah hari Jumat, sehingga berita proklamasi berhasil disampaikan kepada umat Islam yang baru selesai menjalankan shalat jumat di Masjid Besar Kauman maupun Masjid Pakualaman.

Kemudian pada sore harinya Ki Hajar Dewantara memimpin dan bersama-sama murid Tamansiswa bersepeda keliling kota untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan kepada masyarakat. Dengan demikian berita proklamasi itu cepat tersebar luas di kalangan masyarakat, bahkan sampai ke kampung-kampung dan desa-desa.

Demikian halnya dengan masyarakat yang berada di daerah Bantul dan Wates Kulonprogo. Mereka mendengar berita proklamasi tersebut dari siaran radio tanggal 17 Agustus 1945 malam. Sedangkan di Wonosari Gunungkidul berita itu baru dapat didengar pada keesokan harinya, yaitu hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945.⁴

Setelah mendengar tersiarnya berita proklamasi tersebut, maka pimpinan militer Jepang memerintahkan atas Komando

Tentara Serikat untuk menutup pemancar *Hoso Kyoku* Yogyakarta. Tindakan Jepang itu didasarkan pada anggapan bahwa dirinya masih merasa bertanggung jawab terhadap Sekutu untuk merintangai bangsa Indonesia di dalam menyempurnakan kemerdekaannya. Akibat dari dihentikannya siaran radio dari semua *Hoso Kyoku* itu masyarakat menjadi buta berita, dan yang cukup menggelisahkan masyarakat adalah tidak diketahui apa yang harus dilakukan setelah Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945.

Namun demikian, berita proklamasi itu menjadi hangat dan meluas setelah bersama-sama Undang-Undang Dasar yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 dimuat dalam surat kabar harian "Sinar Matahari" yang terbit di Yogyakarta pada tanggal 19 Agustus 1945. Dengan dimuatnya berita tersebut, maka bagi masyarakat luas semakin menjadi jelas bahwa kemerdekaan Indonesia benar-benar telah diproklamasikan. Oleh sebab itu rakyat di Yogyakarta tidak merasa ragu untuk berjuang, membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Menurut Sri Sultan Hamengku Buwono IX bahwa proklamasi kemerdekaan itu merupakan peristiwa yang membuka jalan untuk melepaskan diri dari penderitaan batin sekaligus menempuh jalan bebas guna menentukan jalan sendiri nasib di kemudian hari.⁵ Begitu mendengar berita proklamasi kemerdekaan Indonesia Sri Sultan segera memanggil Sri Paduka Alam VIII dan KRT Honggowongso, seorang staf senior di Kepatihan.

Pada waktu itu kedua penguasa di Yogyakarta tersebut terlibat dalam suatu pembicaraan. Dalam pembicaraan itu Sri Sultan minta pertimbangan, "bagaimana sikap kita sebaiknya". Lantas oleh Paku Alam dijawab, bahwa soal kemerdekaan Indonesia memang sudah lama kita cita-citakan. Maka dari itu sebaiknya kita memberi dukungan sepenuhnya terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Sri Sultan kemudian berkata, "bahwa memang itulah pendirian saya".⁶ Untuk selanjutnya KRT Honggowongso diperintahkan mempersiapkan sebuah telegram.

Oleh karena itu, maka pada tanggal 19 Agustus 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII langsung mengirim telegram ucapan selamat ke Jakarta kepada Ir. Sukarno – Moh. Hatta atas diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, serta terpilihnya kedua beliau sebagai presiden dan wakil presiden. Tentu saja pengiriman telegram itu tidak diketahui oleh masyarakat luas. Barang kali terbatas pada lingkungan tertentu, yaitu hanya beberapa orang saja yang dekat dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX maupun Sri Paduka Paku Alam VIII. Di samping itu pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 09.00 Sri Sultan mengundang pemimpin kelompok-kelompok pemuda di Bangsal Kepatihan guna menyambut jaman baru yakni Indonesia merdeka. Mereka itu hadir mewakili golongan agama, golongan nasionalis, kelompok kepanduan dan golongan keturunan Cina yang keseluruhannya berjumlah 100 orang. Dalam pertemuan itu Sultan berpidato dan memberi petunjuk mengenai arti kemerdekaan bagi suatu bangsa. Isi pidato itu pada intinya Sultan minta para pemuda untuk menjaga keamanan rakyat, dan jangan sampai terjadi kerusuhan. Bertindak sebagai penghubung atau wakil beliau dengan para pemuda adalah Pangeran Bintoro.⁷

Di tempat lain dan masih juga pada hari yang sama, Yogyakarta *Kooti Hookookai* mengadakan sidang istimewa untuk menyambut kemerdekaan Indonesia. Sidang yang bertempat di gedung Sana Budaya itu telah mengambil beberapa keputusan, yaitu:

1. Melahirkan rasa gembira dan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas lahirnya Negara Republik Indonesia.
2. Menyatakan dengan keyakinan seteguh-teguhnya kepada Indonesia akan mengikuti dan tunduk tiap-tiap langkah dan perintahnya.
3. Mohon kepada Illahi agar negara Indonesia berdiri kokoh teguh dan abadi.

Pada keesokan harinya surat kabar harian "Sinar Matahari" yang terbit tanggal 20 Agustus 1945 memuat sambutan Sri Sultan Hamengku Buwono IX tentang lahirnya Indonesia Merdeka. Adapun isi pokok dalam sambutan itu secara jelas Sri Sultan mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk menggalang persatuan dan kesatuan, harus bersedia dan sanggup mengorbankan kepentingan masing-masing untuk kepentingan bersama guna memelihara dan mempertahankan kemerdekaannya.

Di samping itu, pada hari yang sama tanggal 20 Agustus 1945, selaku Ketua *Yogyakarta Kooti Hookookai* Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk kedua kalinya kembali mengirim telegram kepada Presiden dan Wakil Presiden. Dalam telegram itu beliau secara tegas menyatakan "sanggup berdiri di belakang pimpinan Paduka Yang Mulia". Kedua pernyataan itu selalu diikuti dengan jalan yang sama oleh Sri Paduka Paku Alam VIII. Tindakan tersebut menunjukkan betapa tegas dan positifnya sambutan kedua beliau terhadap Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sementara itu dalam upaya menindaklanjuti amanat proklamasi, pada tanggal 24 September 1945 dengan dukungan Sultan dan Paku Alam, rakyat membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Pembentukan itu terjadi dua hari setelah Presiden Sukarno mengeluarkan maklumat pendirian Komite Nasional Indonesia (KNI). Adapun anggota KNID diambil dari berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu baik Sri Sultan maupun Paku Alam mengakui KNID sebagai badan perwakilan rakyat.

Pada awal bulan September 1945, sesudah KNID terbentuk Sri Sultan mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan Sri Paku Alam VIII, Ki Hajar Dewantara dan beberapa tokoh yang lain seperti Purwokusumo. Dari hasil pembicaraan itu Sultan dapat mengambil kesimpulan, bahwa rakyat di daerah Yogyakarta dalam menyambut proklamasi kemerdekaan itu dengan rasa lega. Melihat kenyataan yang ada, maka atas persetujuan KNID

Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengeluarkan Amanat 5 September 1945. Secara tegas dinyatakan bahwa daerah Kasultanan Yogyakarta adalah bagian dari Republik Indonesia dengan kedudukan Daerah Istimewa. Di bawah ini dapat kita ketahui pengakuan Sri Sultan sendiri sehubungan dengan dikeluarkannya Amanat 5 September itu;

“.... Baru tanggal 5 September saya berani berbicara atas nama rakyat di sini. Saya menyatakan demikian itu oleh karena perhitungan saya, dus keyakinan saya bahwa suatu waktu Belanda akan datang di Yogya. Kalau itu terjadi maka dengan pernyataan itu saya tidak bisa diadu domba dengan para intelektual, para politisi dan rakyat di Yogyakarta ini. Itu perhitungan saya, untuk menyatakan bahwa Yogya itu adalah negara bagian dari Republik Indonesia.”⁸

Adapun isi amanat itu secara keseluruhan memuat tiga pernyataan, yaitu:

AMANAT

Sri Paduka Inggang Sinuhun Kanjeng Sultan

Kami Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat menyatakan:

1. Bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia.
2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat melalui surat ini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya.
3. Bahwa perhubungan antara Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan kami bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan amanat kami ini.

Ngayogyakarta Hadiningrat
28 Puasa Ehe 1876
atau 5-9-1945

Hamengku Buwono IX⁹

Pada saat yang hampir bersamaan, yaitu hari dan tanggal yang sama Sri Paku Alam VIII juga mengeluarkan amanat serupa, isi dan kata-katanya persis sama untuk Praja Pakualaman.

Keesokan harinya, 6 September 1945 Presiden Sukarno mengutus dua orang Menteri Negara yaitu Mr. Sartono dan Mr. Maramis untuk datang di Yogyakarta. Kedatangan mereka itu dalam rangka menyampaikan “Piagam Kedudukan Sri Sultan” dari Presiden Republik Indonesia. Adapun isi piagam kedudukan itu adalah sebagai berikut:

Kami, Presiden Republik Indonesia, menetapkan:
Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalogo, Abdulrachman sayidin Panatagama Kalifatullah ingkang Kaping IX ing Ngayogyakarta Hadiningrat pada kedudukannya, dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kangjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari pada Republik Indonesia.

Jakarta, 19 Agustus 1945
Presiden Republik Indonesia
Ttd
Ir. Sukarno¹⁰

Pada waktu yang bersamaan Presiden Republik Indonesia juga menetapkan “Piagam Kedudukan untuk Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII”.

Piagam kedudukan tersebut berisi pengakuan pemerintahan kepada Kasultanan Yogyakarta dan Pura Pakualaman sebagai bagian dari Republik Indonesia. Sekaligus memperkuat kedudukan Sultan dan Paku Alam dalam memimpin Yogyakarta. Piagam kedudukan itu sebenarnya tertanggal 19 Agustus 1945. Namun karena adanya beberapa faktor yang belum jelas, barulah setelah keluar Amanat 5 September 1945, Piagam kedudukan itu disampaikan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII.¹¹

Bertitik tolak dari derap langkah Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam VIII dalam menyambut dan mendukung cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, Amanat 5 September itu jelas bukan untuk kepentingan pribadi kedua beliau. Kesemuanya itu didasarkan pada nasib masa depan bagi kerajaan dan rakyat Yogyakarta. Memang sejak semula Sultan dan Paku Alam menyadari bahwa kemerdekaan itu merupakan kepentingan bangsa yang besar, bukan kepentingan daerah-daerah. Oleh sebab itu pernyataan bahwa Kasultanan Yogyakarta dan Puro Pakualaman merupakan bagian dari Republik Indonesia bukan sekedar kebetulan dan juga tidak direncanakan. Akan tetapi pernyataan itu terjadi karena keikhlasan dalam perjuangan yang dilandasi oleh semangat kebangsaan.¹⁵

Di dalam Amanat 5 September 1945 dinyatakan bahwa kepemimpinan daerah Yogyakarta dipegang oleh Sri Sultan IX dan Paku Alam VIII, maka status kekuasaan Yogyakarta tidak lagi dikuasai oleh Jepang. Oleh sebab itu Jepang tidak lagi mempunyai kedudukan resmi di Yogyakarta. Namun pada kenyataannya Jepang masih ingin mempertahankan kekuasaannya. Hal itu terbukti dengan adanya pejabat-pejabat Jepang yang masih menduduki pos-pos tertentu. Di samping itu tentara Jepang masih memegang senjata lengkap, sehingga dapat menimbulkan kekuasaan yang dualistis di Yogyakarta. Keadaan seperti itu tidak akan dapat bertahan lama, karena masyarakat Yogyakarta sudah tidak menghendaki lagi Jepang berkuasa.

Mulai saat itu pegawai pemerintah yang dikuasai Jepang tidak lagi mau mengibarkan bendera Hinomaru, bahkan di sebagian kantor sudah berkibar bendera Merah Putih. Bendera Hinomaru yang berkibar tinggal di beberapa gedung saja termasuk gedung *Cokan Kantai*.

Usaha mengibarkan bendera Merah Putih ternyata peranan pemuda pelajar yang berada di Yogyakarta tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Berbagai pengibaran bendera di rumah-rumah penduduk ataupun di perusahaan-perusahaan milik

pemerintah dan swasta justru mereka yang melakukannya. Para pemuda dan pelajar tidak merasa takut dengan melihat tentara Jepang yang masih memiliki persenjataan lengkap. Para pemuda juga menggerakkan pemasangan lencana Merah Putih di dada dan melakukan pengecatan di berbagai jalan raya terhadap orang-orang yang sedang lewat untuk memasang lencana semacam itu.

Aksi pengibaran Bendera Merah Putih yang dilakukan oleh pemuda di daerah Yogyakarta mencapai puncaknya pada tanggal 21 September 1945. Dimana pagi hari itu sekelompok pemuda yang berkumpul di kamar bola (sekarang bekas Gedung Seni Sono) berusaha mengibarkan bendera Merah Putih. Namun tiba-tiba datang serombongan serdadu Jepang dari arah gedung *Cokan Kantai* dan membubarkan sekelompok pemuda tersebut. Dengan teratur para pemuda itu membubarkan diri. Akan tetapi lebih kurang pukul 12.00 siang masa rakyat datang ke gedung *Cokan Kantai* dengan bersenjatakan bambu runcing, golok, tobak, pedang, untuk mengepung gedung tersebut. Mereka terdiri dari ratusan pemuda, pelajar, pegawai kantor, buruh dan para pejuang yang lain dengan tujuan menurunkan bendera Hinomaru. Massa rakyat itu saling bersaut-sautan meneriakkan kata “siap”, “merdeka”, sehingga membuat suasana mejadi lebih hangat dan bersemangat. Tanpa menghiraukan penjagaan yang ketat beberapa pemuda-pemudi berhasil menerobos penjagaan serdadu Jepang dan naik ke atas atap gedung menurunkan bendera Hinomaru dan mengibarkan bendera Merah Putih. Beberapa pemuda-pemudi itu antara lain, Kapten Polisi Slamet S, Siti Ngaisyah, Sutan Ilyas, dan Supardi.¹³

Setelah bendera Merah Putih berkibar, terdengarlah kumandang lagu Indonesia Raya. Hal itu merupakan awal kemenangan aksi-aksi masa setelah Proklamasi, dan bagi masyarakat Yogyakarta sendiri peristiwa semacam ini menambah keyakinan untuk melenyapkan bangsa asing yang selama ini menindas dirinya.

Dengan adanya aksi yang dilakukan oleh massa rakyat itu jelas menimbulkan reaksi di kalangan pemerintah militer Jepang di Yogyakarta. Reaksi itu muncul pada tanggal 23 September 1945 dimana hari itu Jepang melakukan perlucutan senjata terhadap kesatuan Polisi Istimewa di Gayam. Sebagai komandan Kompi Polisi Istimewa, Oni Sastroatmojo segera melaporkan kejadian itu kepada Komisaris Polisi Sudarsono. Tindakan balasan segera dilakukan oleh Sudarsono bersama tokoh-tokoh pejuang Yogya, seperti Sumantara, Sardono Dipokusuma, Mr. Sudarisman Purwokusumo untuk meminta kembali senjata-senjata Polisi Istimewa yang dirampas oleh Jepang tadi. Karena mengalami kegagalan dalam berunding maka pada tanggal 23 September 1945 pukul 21.00 massa rakyat, pemuda, polisi bergerak mengepung markas Jepang tersebut. Akhirnya berhasil merebut kembali senjata-senjata itu dari tangan Jepang, kemudian dibagi-bagikan untuk modal perjuangan selanjutnya.¹⁴

Keberhasilan merebut kembali senjata-senjata polisi istimewa di Gayam itu semakin meningkatkan gerakan perebutan kekuasaan dan senjata Jepang di Yogyakarta. Pada tanggal 26 September 1945 mulai pukul 10.00 pagi, segenap pegawai kantor baik negeri maupun swasta, perusahaan dan pabrik-pabrik yang ada di DIY secara serentak menjalankan aksi pemogokan guna mengambil alih kekuasaan yang masih berada di tangan bangsa lain. Ternyata aksi serentak para pegawai ini didukung oleh Barisan Rakyat, pemuda, BKR, dan bahkan ikut mengepung tempat-tempat tertentu secara rapi yang terkena aksi pengambilalihan. Hingga pukul 20.00 aksi pemogokan itu dapat diakhiri dan pimpinan di semua kantor telah ada di tangan bangsa Indonesia.

Adapun perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik yang pada saat itu dapat diambil alih kekuasaannya dilaporkan kepada KNI Daerah Yogyakarta, yaitu pusat *Nanyo Kohatsu* Yogyakarta beserta cabang-cabangnya, Jawatan Kehutanan, Daiken Sangyo; sedangkan pabrik-pabrik gula di wilayah Bantul meliputi pabrik gula Padokan, Gesikan, Pundong, Gondanglipuro, Pleret; di

wilayah Sleman meliputi pabrik gula Tanjungtirto, Salakan, Beran, Cebongan, Rewulu dan Medari; dan satu-satunya pabrik gula yang berada di daerah Kulonprogo adalah pabrik gula Sewugalur.¹⁵

Tak ketinggalan pula, para pejuang di bidang pers di bawah pimpinan Samawi dan Sumantoro beserta beberapa pemuda, melakukan gerakan pembongkaran segel percetakan “Sinar Matahari” yang berada di Hotel Garuda. Mereka berhasil menguasai alat-alat percetakan yang selanjutnya dipakai sebagai modal untuk menerbitkan surat kabar “Kedaulatan Rakyat”. Di samping itu dalam bidang yang lain Sumarmadi telah berhasil pula mengambil alih radio Jepang atau *Hoso Kyoku* dan mengumandangkan misi radio Republik Indonesia yang pertama kali di Yogyakarta.¹⁶

Setelah beberapa peristiwa pengambilalihan yang terjadi di wilayah DIY dapat dikuasai oleh bangsa Indonesia, masyarakat semakin bertambah yakin bahwa jika jalan damai tidak dapat diterima oleh serdadu Jepang dan penguasa militer Jepang, maka jalan kekerasan harus segera dilaksanakan. Berbagai pertemuan diadakan dan pendapat semacam pernyataan di atas dapat diterima oleh semua pihak baik oleh massa rakyat, pemuda yang tergabung dalam Barisan Penjaga Umum (BPU), BKR, Polisi dan berbagai lapisan masyarakat pada tanggal 6 Oktober 1945 berusaha mengadakan pelucutan senjata Jepang di Kotabaru. Di tempat itu diperkirakan sebagai gudang senjata dan markas tentara Jepang yang masih dianggap berkuasa mewakili Sekutu yang akan kembali menjajah Indonesia. Para pemuda telah memperkirakan bahwa apabila perundingan perdamaian untuk meminta senjata tidak diperkenankan oleh Jepang maka harus dilakukan perebutan dengan kekerasan. Bagi pemuda pada waktu itu, senjata-senjata milik Jepang sangat dibutuhkan untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia.

Pelucutan senjata di Kotabaru didahului dengan adanya perundingan antara Moh. Saleh sebagai Ketua KNI, RP. Sudarsono sebagai Kepala Polisi, Sunjoyo, Umar Joi dan Sukardi dengan

Mayor Oztuka agar *Butaico* mau menyerahkan senjata-senjatanya. Gagalnya perundingan nampaknya menimbulkan pertempuran yang tak dapat dihindari lagi. Bersamaan dengan padamnya penerangan listrik di sekitar Butai Kotabaru, pertempuran diawali dengan ledakan granat dan letupan senjata. Massa rakyat dan pemuda, tentu saja BKR, Polisi Kota, Polisi Istimewa serta Laskar Rakyat Bambu Runcing melakukan penyerbuan. Pertempuran berlangsung sangat seru karena Jepang mengadakan perlawanan dengan memuntahkan tembakan-tembakan mitraliur ke massa penyerbu. Akhirnya perlawanan Jepang dapat dipatahkan pada pukul 10.30 siang hari tanggal 7 Oktober 1945 dengan ditandai berkibarnya bendera putih di atas markas bala tentara Jepang. Dengan demikian Butai Kotabaru menyerah.

Pada hari itu juga, 7 Oktober 1945 beratus-ratus tentara Jepang ditawan, sedangkan beberapa ratus yang ada di tangsi Pingit, Gentan dan di lapangan terbang Maguwo menyerah dengan tidak mengadakan perlawanan sehingga tidak membawa korban. Urusan tentang tawanan Jepang itu kemudian diserahkan kepada BKR untuk dibawa ke rumah penjara Wirogunan. Dalam pertempuran Kotabaru itu dipihak pejuang kita gugur 21 orang dan 32 orang lainnya menderita luka-luka.¹⁷ Bagi yang luka-luka baik ringan maupun berat segera dirawat di rumah sakit Bethesda.

Berhubung dengan gugurnya para pahlawan ini rakyat Yogyakarta mulai pagi hari mengibarkan bendera setengah tiang sebagai tanda berkabung. Pemakaman jenazah para pahlawan korban pertempuran tersebut dilakukan pada sore hari pukul 16.00 berangkat dari Gedung Nasional (Gedung Agung), kemudian dimakamkan di Semaki 18 orang dan yang lainnya dimakamkan di Kauman belakang Masjid Besar, serta makam Karangkejèn.

Dalam pertempuran Kotabaru tersebut keterlibatan dan peranan wanita adalah cukup besar, baik yang tergabung dalam "Organisasi Wanita" maupun kegotong-royongan di kampung-kampung. Mereka tidak mengenal lelah menyelenggarakan jaminan makan dan minuman untuk para pejuang.

Dengan berakhirnya pertempuran Kotabaru dan menyerahkan Jepang di daerah Yogyakarta, berarti seluruh DIY bebas dari tangan pemerintahan fasis. Mulai saat itu secara utuh DIY yang terdiri dari Kasultanan dan Pakualaman mutlak berada dalam kekuasaan dan naungan Negara Republik Indonesia. Walaupun demikian penduduk di daerah Yogyakarta tetap terus mempergiat penjagaan di tempat masing-masing.

Apalagi setelah Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1945 mengumumkan tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), maka untuk menampung dan menyatukan semangat rakyat Yogyakarta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pemerintah DIY mengeluarkan Maklumat No. 2 tanggal 12 Oktober 1945. Adapun maklumat itu berisi tentang ketentraman dan keamanan umum. Kemudian disusul dengan keluarnya Maklumat No. 5 tertanggal 26 Oktober 1945 tentang pembentukan Laskar Rakyat sebagai pembantu Tentara Keamanan Rakyat. Adapun maksud pembentukan Laskar Rakyat itu adalah:

- a. Membantu mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada umumnya, Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya,
- b. Mempertahankan daerah kampung/desa terhadap musuh,
- c. Menjaga keamanan daerah kampung/desa,
- d. Membantu kepada segala kepentingan rakyat yang membutuhkan tenaga banyak dan teratur.

Sedangkan yang harus masuk menjadi anggota Laskar Rakyat ialah semua penduduk bangsa Indonesia laki-laki yang masih kuat badannya dan belum menjadi anggota Tentara Keamanan Rakyat. Dalam pembentukan Laskar Rakyat ini penduduk laki-laki yang berumur kurang dari 15 tahun dipisahkan dari penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Segenap kepala barisan di tiap kapanewan, kemantren pangreh praja merupakan Dewan Pimpinan Laskar Rakyat untuk merundingkan dan

mengatur segala kepentingan bersama penewu atau Pangreh Projo, pemilihan Wakil KNI dan Wakil TKR turut duduk dalam Dewan Pimpinan itu. Pemimpin Barisan dipilih oleh dan dari antara anggota-anggota Laskar Rakyat. Pemimpin barisan harus merdeka, Pangreh Projo, KNI, Lurah Desa dan pegawai-pegawai lainnya tidak boleh turut campur dan mempengaruhi pemilihan itu.

Mengenai biaya Laskar Rakyat dicukupkan dana kas rukun kampung/desa. Untuk keperluan ini rukun kampung/rukun desa diperbolehkan mencari jalan untuk mengumpulkan uang dan bahan-bahan, akan tetapi senantiasa dengan mengingat kekuatan ekonomi rakyat.

Laskar Rakyat hendaknya mengusahakan senjata sendiri termasuk senjata api. Semua latihan militer diserahkan kepada anggota TKR di masing-masing daerah. Jika ada tanda mobilisasi semua anggota Laskar Rakyat harus tunduk kepada perintah pimpinan TKR, di daerahnya masing-masing.

Dalam menjalankan pimpinan kepala barisan harus senantiasa berhubungan dengan kepala rukun kampung/rukun desa dan Pangreh Projo. Semua pegawai Republik Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta harus aktif dalam Laskar Rakyat di kampung/desanya masing-masing. Usaha-usaha Laskar Rakyat supaya diatur sehingga tidak mengganggu mata pencaharian masing-masing anggota.

Kepala Daerah Pangreh Projo dan ketua rukun kampung/rukun desa menjadi pelindung dan turut bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan Laskar Rakyat.¹⁸

Kemudian pada bulan Desember, tepatnya 7 Desember 1945 Maklumat tersebut dirubah dan disempurnakan dengan Maklumat No. 8, yaitu bahwa: yang harus masuk menjadi anggota Laskar Rakyat ialah semua penduduk laki-laki bangsa Indonesia dan masih kuat badannya, kecuali:

- a. Prajurit Tentara Keamanan Rakyat, Polisi dan Hisbullah
- b. Kepala Daerah Pamong Praja dengan paling banyak 3 orang pegawainya yang ditunjuk

- c. Lurah dan Carik desa
- d. Ketua dan panitia rukun kampung/rukun desa
- e. Pegawai jawatan dan perusahaan penting yang telah ditunjuk dengan surat keterangan oleh Kepala Jawatan atau perusahaan untuk menjaga dan menjalankan pekerjaan di kantor, pabrik dan sebagainya
- f. Badan-badan perjuangan dan orang-orang yang berhubungan dengan kewajiban turut dikecualikan menurut keputusan Badan Pimpinan Pusat Laskar Rakyat.

Dalam pembentukan Laskar Rakyat ini penduduk laki-laki yang kurang dari 15 tahun dimasukkan dalam kependuan. Laskar Rakyat di tiap-tiap kapanawen/kemantren Pamong Projo mengadakan Dewan Pimpinan Laskar Rakyat yang terdiri dari Kepala Resimen, Kepala-kepala Batalyon, Kepala-kepala Kumpeni, wakil Tentara Keamanan Rakyat, Penewu/mantri Pamong Projo, wakil Komite Nasional Indonesia, wakil Palang Merah Indonesia, wakil Perwani; sedangkan di tiap-tiap kabupaten di luar kota Yogyakarta dibentuk Dewan Pimpinan Laskar Rakyat Kabupaten yang terdiri dari: 2 orang wakil Tentara Keamanan Rakyat, 1 orang wakil Pamong Projo, 1 orang wakil KNI, 1 orang wakil Palang Merah Indonesia, dan 1 orang wakil Perwani yang kesemuanya berjumlah 8 orang.¹⁹

Dengan dikeluarkannya Maklumat tersebut di atas oleh Pemerintah Daerah DIY yang disertai dengan beberapa ketentuan, maka di DIY lahirlah beberapa badan kelaskaran baik di kota Yogyakarta maupun di tingkat kabupaten atau tingkat kapanawen. Adapun beberapa laskar yang lahir pada waktu itu antara lain, Laskar Rakyat yang pertama dibentuk di Yogyakarta adalah Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI) daerah "Mataram" yang bermarkas di Jalan Gondomanan 13 Yogyakarta (sekarang Jalan Brigjen Katamso). Kemudian pada perkembangan selanjutnya berganti nama menjadi Tentara Rakyat Mataram (TRM). Untuk daerah Bantul muncul beberapa badan kelaskaran

yaitu Laskar Segoroyoso yang dipelopori oleh pemuda bernama Wakijan dan Laskar Tirtonirmolo di bawah pimpinan Tiyoso; sedangkan di Sleman tepatnya di desa Brayut lahir suatu badan kelaskaran dengan nama Laskar Merah Putih yang dipimpin oleh pemuda bernama Suparjo Suryo seorang bekas marinir Belanda. Tak ketinggalan juga di kabupaten Kulon Progo dan Adikarto serta Wonosari Gunung Kidul muncul laskar yang namanya sama dengan nama salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal pada waktu itu adalah bambu runcing. Untuk itu maka laskar di kedua daerah tersebut lebih dikenal dengan sebutan “Laskar Bambu Runcing”.

Di samping lahir beberapa badan kelaskaran, Radio Republik Indonesia Yogyakarta (RRI Yogyakarta) pada waktu sudah mulai terkenal di dalam mengudarakan siaran-siarannya. Terutama penyebar dan penebal semangat perjuangan melalui pidato-pidato Bung Tomo dan Bung Tarjo.

Bung Tarjo yang pada waktu itu sebagai pimpinan “Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia” (BPRI) daerah “Mataram”, melalui corong RRI telah mengadakan penerangan dan pembangkitan semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan RI. Pidato tersebut ternyata tidak berkenan di hati Sekutu maka RRI Yogyakarta mendapat ultimatum. Ultimatum itu berisi apabila RRI Yogyakarta terus menyiarkan pidato BPRI, maka Sekutu akan mengambil tindakan.

Dikarenakan RRI Yogyakarta tidak menanggapi ultimatum tersebut, maka Sekutu pada pukul 8.30 tanggal 25 November 1945 telah menyerang dan mengebom gedung siaran Radio Yogyakarta. Akan tetapi, rupa-rupanya pihak Sekutu belum merasa berhasil dan belum merasa puas. Kemudian pengeboman diulangi lagi tanggal 27 November 1945.

Sebelum Sekutu melakukan pengeboman yang kedua itu, pada pukul 12.45 pesawat mereka telah menyebarkan pamflet-pamflet di kota Yogyakarta. Adapun isi pamflet itu antara lain:

"Pengeboman kami terhadap stasioen Radio Jogjakarta pada pagi-pagi hari tanggal 25 November jang laloe ini, kami tidak menghantoerkan stasioen itoe dengan setjoekoepnja. Berhoeboeng dengan alasan jang telah kami siarkan lebih doeloe, maka akan menghantoerkan stasioen itoe kembali. Kami tidak akan mentjilakakan toean-toean sama sekali, kami hanja akan menjempoernakan penghantoerkan stasioen radio itoe sadja. Toean-toean sekalian soedah diperingatkan adanja".²⁰

Serangan yang berupa bom dan roket pada tanggal itu berhasil menghancurkan Balai Mataram (bekas Sosietet Belanda). Tetapi gedung siaran radio Yogyakarta yang menempati bekas gedung Nillmy (dalam keadaan selamat, meskipun ada sebagian yang rusak). Pada malam harinya siaran radio Yogyakarta sudah dapat mengudara, karena pemancar radio berhasil diselamatkan ke tempat lain.

Dengan adanya serangan udara terhadap gedung siaran RRI Yogyakarta itu, maka Sri Sultan Hamengku Buwono IX segera mengirim kawat kepada Presiden Sukarno yang isinya:

"Selasa 17-11 djam hingga djam 2.30 siang beberapa kapal terbang Inggris membom kota Jogja. Balai Mataram dan Sonoboedojo hantjoer, kantor telpon gedoeng HCCH dan beberapa roemah pendoedoek roesak, sehingga menimboelkan korban diantara mereka. Memakai bom rocket dan terpedo, menjenjata dengan kanon dan metraljeur dimana-mana. Harapan kami memrotos sekeras-kerasnja dan mengambil tindakan seperloenja".²¹

Walaupun Sekutu melakukan tindakan yang sangat licik, ternyata tidak berhasil membungkam siaran RRI Yogyakarta yang oleh mereka dikatakan menjadi sarang kaum "ekstrimis".

Peristiwa yang terjadi pada tanggal 25 dan 27 November 1945 itu akhirnya menimbulkan kemarahan rakyat, dan semangat yang menyala-nyala sudah tidak padat dipadamkan lagi. Sementara itu perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia terus memuncak. Pada awal tahun 1946 keadaan ibukota Jakarta sudah sangat buruk. Tiap hari terjadi pembunuhan dan penembakan oleh serdadu Belanda terhadap penduduk yang dianggap salah.

Semula serdadu Belanda masuk Indonesia dengan kedok tentara Serikat. Lambat laun mereka mengintimidasi dan berusaha mematahkan semangat perjuangan rakyat Indonesia. Dalam suasana yang demikian itu, timbul pertanyaan bagaimana seandainya terjadi sesuatu pada diri para pemimpin kita. Oleh sebab itu berpindahlah Presiden beserta Wakil Presiden dari Jakarta ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946. Sejak saat itu kota Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia. Dengan kata lain kota Yogyakarta menjadi “kota hijrah” bagi pemerintah Republik Indonesia.

DAFTAR CATATAN BAB II

MENGENAL SITUASI DIY PADA AWAL KEMERDEKAAN

1. Sartono Kartodirdjo, dkk. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI* (Jakarta: Balai Pustaka, 1977), hlm. 29.
2. *Memoar perjoengan Menegakkan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945* (Yogyakarta: Yayasan Wiratama 45 Yogyakarta, 1985), hlm. 56.
3. *Buku Kenangan 50 Tahun Republik Indonesia di Yogyakarta, Sebuah Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Panitia Gabungan Peringatan HUT RI ke 50 Kemerdekaan RI Bhakti Pertiwi Prop. DIY, 1995), hlm. 50.
4. *Peristiwa-Peristiwa Revolusi di Tingkat Lokal* (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1992/1993), hlm. 106.
5. Ahmad Adaby Darban, dkk; *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengku Buwono IX* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1998) hlm. 31-32.
6. *Ibid*
7. *Ibid.* hlm. 33
8. *Ceramah* Sultan Hamengku Buwono IX dihadapan generasi muda pada tanggal 18 Agustus 1986 di THR Yogyakarta.

9. *Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta* (Kementrian Penerangan, 1953), hlm. 36.
10. *Ibid.*
11. Ahmad Adaby Darban, *Op.Cit.* hlm. 37
12. *Ibid.* hlm. 38.
13. *Replika Sejarah Perjuangan Rakyat Yogyakarta* (Yogyakarta: Dinas Sosial Prop. DIY, 1983), hlm. 23
14. Buku Kenangan 50 Tahun Republik Indonesia di Yogyakarta, Sebuah Lintasan Sejarah, *Op.Cit.* hlm. 53.
15. Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, *Op.Cit.* hlm. 39.
16. Buku Kenangan 50 Tahun Republik Indonesia di Yogyakarta, Sebuah Lintasan Sejarah, *Op.Cit.* hlm. 52
17. *Himpunan Informasi Sejarah Penyerbuan Kota Baru Yogyakarta dan Peristiwa-Peristiwa Penting Di Yogyakarta Sekitar Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 1945* (Yogyakarta: Museum Benteng Yogyakarta, 1998), hlm. 42, 94-95.
18. Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, *Op.Cit.*, hlm. 345-346.
19. *Ibid.* hlm. 347-348
20. *Harian Kedaulatan Rakyat*, tanggal 26 November 1945.
21. *Harian Kedaulatan Rakyat*, tanggal 28 November 1945.

BAB III

KONDISI DAN AKTIVITAS ULAMA DI DIY PERIODE 1945-1949

Periode 1945-1949, dikenal sebagai masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Peranserta masyarakat dalam mempertahankan kemerdekaan pada waktu itu nampak sekali, karena para pemimpin militer kita mencanangkan adanya perang total, yang artinya melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Salah satu diantaranya adalah ulama yang pada masa periode tersebut mempunyai peranan penting, paling tidak mampu menggerakkan umat dan rakyatnya tergabung dalam laskar-laskar rakyat yang dengan penuh semangat melakukan perlawanan terhadap penjajah yang waktu itu adalah tentara kolonial Belanda.

Kondisi dan aktivitas ulama di Yogyakarta dan sekitarnya pada periode 1945-1949 yang aktif dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan antara lain ulama Islam, Katholik, Kristen. Kondisi maupun aktivitas mereka nampak melalui wadah-wadah tempat ibadah baik itu di pondok pesantren bagi ulama Islam dan gereja bagi ulama Kristen-Katholik. Kondisi dan aktivitas para pemimpin ulama baik itu kyai, pastor maupun pendeta yaitu memberikan siraman rohani bagi pemeluknya serta memberikan pegangan hidup bagi pemeluknya yang berkaitan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan serta membentuk kader-kader pejuang yang dengan ketulusan hati sanggup mengusir dan menyirnakkan berbagai macam kedhaliman kaum kolonial.

Seruan kedua penguasa Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII untuk mempertahankan kemerdekaan mendapat sambutan positif dari kalangan ulama Islam, rohaniwan Katholik dan Kristen serta rakyat/masyarakat.

Oleh karena itu di dalam bab ini akan kami uraikan mengenai kondisi dan aktivitas ulama Islam, Katholik maupun Kristen yang pada periode 1945-1949 baik secara langsung maupun tidak ikut membantu dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, terutama dalam pembentukan jiwa dan semangat nasionalisme.

Selanjutnya perlu dilihat bagaimana kondisi dan aktivitas ulama Islam di DIY. Dalam melihat kondisi dan aktivitas ulama Islam, perlu diuraikan tentang kedudukan nilai-nilai ajaran Islam dalam diri ulama Islam/kyai pada periode 1945-1949.

Kedudukan nilai-nilai ajaran Islam dalam diri kyai sudah menjadi bagian dari hidupnya untuk beramal semaksimal mungkin guna kemaslahatan umat, serta bernahi munkar melawan kedholiman dan penjajahan. Di samping itu dalam Islam juga terdapat ajaran tentang berjuang di jalan Allah (*jihad fi sabilillah*) dan cinta tanah air merupakan sebagian dari iman (*habbul wathon minal iman*). Bertolak dari itu ternyata ajaran Islam telah memberi dorongan kepada pimpinan keagamaan itu untuk memiliki semangat untuk berjuang membela tanah air. Perasaan nasionalisme para kyai diperkuat oleh ajaran Islam itu sehingga mereka berjuang dan berkorban semata-mata melaksanakan perintah Allah SWT. Dengan demikian Islam juga telah memainkan peranan penting dalam pembentukan jiwa dan semangat nasionalisme kyai dengan mengembangkan ajarannya itu.

Bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, tentunya ajarannya itu merupakan pegangan hidup dan petunjuk bagi pemeluknya. Ajarannya ini yang selalu ditanamkan oleh para kyai kepada masyarakat Islam Yogyakarta, Bantul, Sleman, Kulonprogo, Gunungkidul khususnya mereka yang akan dikirim

ke medan perang. Demikian halnya, dengan ajaran Islam itu akan membentuk kader-kader pejuang yang dengan ketulusan hati sanggup mengusir dan mengirnakkan berbagai macam kedhaliman kaum kolonial.

Islam sebagai nilai atau ajaran yang selalu ditanamkan oleh para kyai kepada masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya umumnya adalah sebagai berikut:

- Adanya Ideologi perang sabilillah, dalam Al Qor'an ditegaskan:

تَابِعُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَتَاكُمْ عَلَىٰ بَحْرٍ مِّنَ الْبَحْرِ تَوْفِيقًا مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَجْعَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ذَلِكُمْ حَبِطَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. يَعْرِضُ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٍ تَلْبَسُونَ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (الصَّف ١٠١ - ١٢)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam surga "Dan. Itulah keberuntungan yang besar".¹

Ajaran tersebut memberi pengertian, bahwa berjuang untuk melawan penjajah yang dhalim, yang selalu berusaha menghancurkan Islam dan umatnya, senantiasa menindas rakyat adalah termasuk perbuatan yang terpuji di sisi Allah dan jika meninggal di dalam perlawanan itu berarti mati syahid.

- Adanya Doktrin Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Adanya ajaran amar ma'ruf nahi munkar yakni mengajak kepada kebaikan dan melarang berbuat kemunkaran, ini telah

membangkitkan kesadaran rakyat yang telah lama hidup di bawah rezim penjajah. Hal ini adalah sebagai suatu kemunkaran yang harus diberantas. Sehubungan dengan hal itu Allah SWT. berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ...
(الاعراف: ١٥٠)

Artinya:

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar”.²

- Kebolehan Berperang Melawan Penjajah, Sebagaimana Allah SWT berfirman:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ لِيُحَارِبُوا وَإِنَّ اللَّهَ عِندَ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. (البقرة: ٢١٦)

Artinya:

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.³

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa umat Islam diperbolehkan berperang melawan kaum penjajah. Maka dengan dasar ayat itu banyak kyai maupun ulama yang memimpin masyarakat, berperang di medan pertempuran.

- Adanya Suatu Ajaran Islam yang mengatakan:

“Hibbul wathon minal iman”

حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ

Artinya:

Cinta tanah air adalah sebagian dari iman

Ajaran tersebut besar artinya dalam membangkitkan rasa cinta tanah air (patriotisme) bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴ Oleh karena itu, bangsa Indonesia rela berjuang mengorbankan jiwa dan raganya, bahkan segala perlengkapan yang ada hanya demi kemerdekaan bangsanya semata.

Dengan demikian, jelaslah bahwa yang memberi semangat terhadap kebangsaan (nasionalisme) di Indonesia adalah Islam itu sendiri, dimana dengan melalui perantara seorang kyai ternyata rakyat memiliki sifat-sifat keberanian di medan peperangan.

Selain itu adanya Lafadz Takmir Perjuangan Dalam Islam. Di dalam Islam ada berbagai simbol-simbol perjuangan yang dapat mendorong semangat perjuangan dalam melawan kaum penjajah. Simbol-simbol yang biasanya digunakan adalah lafadz takbir "Allahu Akbar". Kalimat ini jugalah yang berhasil membakar semangat rakyat dalam mengusir penjajah.

Maka di dorong oleh ajaran ini rakyat yang mempunyai bekal dari seorang kyai untuk maju di medan pertempuran tidak takut mati dalam menghadapi kaum penjajah, dengan keyakinan bahwa mati dalam peperangan yang diiringi dengan ucapan takbir sudah termasuk mati syahid.

Pada dasarnya suatu keharusan, bahwa apabila suatu bangsa diserang oleh bangsa lain maka bangsa yang diserang itu memerlukan suatu persatuan yang kokoh, persatuan antara pemimpin dengan rakyat yang dipimin digalakkan agar perjuangan yang dilakukan itu memiliki kekuatan yang memadu.

Begitu juga dengan bangsa Indonesia diwaktu menjalani perang kemerdekaan. Pemimpin umat Islam dalam hal ini kyai untuk menggerakkan pengikut-pengikutnya akan lebih mudah dilakukannya. Sebagai figur kepemimpinan dalam beragama di pedesaan, memiliki pengaruh luas dalam masyarakat oleh karena kewibawaannya. Pergaulan sosial yang mereka bina baik di dalam pesantren maupun di luar pesantren telah membentuk suatu masyarakat tersendiri yaitu masyarakat Islam pedesaan.⁵

Seperti diketahui bahwa sasaran-sasaran utama kolonial Belanda waktu itu adalah umat Islam, maka dalam menghadapi pendudukan Belanda di Yogyakarta para tokoh-tokoh keagamaan memusatkannya di sekitar pesantren-pesantren itu. Hal ini disebabkan karena kekuatan umat Islam yang demikian besar dikoordinir oleh kyai akan lebih mudah dilakukan dalam mengumpulkan massa maupun untuk menggerakkannya.

Faktor ini merupakan keistimewaan yang terdapat pada diri masing-masing kyai, betapa kuat kepribadiannya sebagai seorang pemimpin yang sangat berpengaruh di pesantren maupun dalam urusan-urusan sosial kemasyarakatan lainnya. Seperti terbukti ketika ikut terlibat dalam menggerakkan rakyat dalam perang kemerdekaan di Yogyakarta. Sebagai mana yang diungkapkan oleh Clifford Geertz bahwa:

“... Bagi para penduduk desa yang Islam telah menjadi agama yang dihayati, walaupun dengan cahaya suram, kyai merupakan tokoh suci perkasa maupun tokoh sekular yang berpengaruh dan ia berusaha dengan segala tenaga dalam menghadapi suatu pemerintah kafir”.⁶

Andil kyai dalam perjuangan revolusi di Yogyakarta dan sekitarnya (DIY) adakalanya memimpin secara langsung dalam pertempuran maupun juga hanya diminta doa-doa dan nasehatnya sebelum memasuki pertempuran. Sebagai contoh doa-doa yang dinasehatkan dan diberikan oleh kyai antara lain:

1. Waquljaa alhaqqu wa zahaqal baathilu annal bathila kaana zahuuqa”

Artinya kurang lebih:

Katakan (Muhammad): “Bila datang kebenaran dan lenyapkanlah kebathilan, sesungguhnya yang bathil itu pasti lenyap”.

2. “Allahumma anta waliyyii wa nashiriin, bika ahuula wabiku aqtula

Artinya kurang lebih:

Ya Allah Engkaulah pelindung, dan penolongku, dengan Engkaulah aku berusaha dan dengan Engkaulah aku berperang”.

3. Dan seterusnya, masih banyak doa-doa yang diajarkan oleh para kyai.

Mereka itu dapat meyakinkan rakyat pejuang dan menambah kepercayaan di mana nasehatnya itu (Jawa: *wejangan*) akan selalu diturut seperti yang dilakukan oleh Kyai Mathori (komandan APS Bantul) pada waktu melakukan penyerangan terhadap Yogyakarta dari markas APS di Tegallayang, yaitu biasanya dengan memberi air putih dalam gelas yang telah diberi doa untuk diminum kepada setiap anggota laskar.⁷

Dalam kaitannya dengan ilmu magis tersebut dapat dianggap sebagai dukungan moril kepada setiap pejuang Laskar Perang Sabil. Pemanfaatan pengaruh dan kharismanya itu ketika dalam menggerakkan pasukan APS maupun rakyat di daerah Bantul dapat dengan mudah dilakukan oleh kyai yang sekaligus menjadi pimpinan penyerangan maupun dalam mengatur strategi berperang. Karena kepribadian dan kewibawaan itulah sangat diperlukan sebagai dukungan terhadap program-program penyerbuan kepada Belanda.

Kelebihan yang dimiliki kyai itu yang menjadikan dasar kewenangan dan sumber kekuasaan atas dominasi kharismanya baik itu terhadap santri-santrinya maupun dengan masyarakat sekitarnya. Tidak jarang adanya seorang kyai mempunyai kekuasaan yang demikian besar dibanding dengan perangkat pemerintah. Sebab dengan kharismanya itu pula akan dapat dilihat sebagai kualitas seseorang untuk memproyeksikan suatu gambaran dirinya sebagai pemimpin besar masyarakat atau pemimpin partai politik.⁸

Hal ini nampak pada pondok pesantren Al Mahalli di Bantul. Pondok pesantren Al Mahalli merupakan kebangkitan kembali dari pondok pesantren yang didirikan oleh *Al Magfurillah* Kyai Muhammad Mahalli Abdullah Umar pada tahun 1937. Kyai Muhammad Mahalli Abdullah Umar adalah seorang pengikut tarekat Syattariyah yang bertempat di dusun Brajan, desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Pada tahun

1944, yaitu di saat pemerintah Jepang berhasil menduduki wilayah Yogyakarta, pondok pesantren yang didirikan oleh Kyai Muhammad Mahalli ini dihancurkan oleh pemerintah militer Jepang karena dicurigai sebagai markas para pejuang melawan Jepang.

Moh. Ridwan dalam ceritanya menambahkan bahwasanya setelah penjajah Belanda berhasil diusir dari bumi Yogyakarta (termasuk wilayah Bantul dan sekitarnya) akibat masuknya tentara militer Jepang pada tahun 1942, wilayah Wonokromo (tepatnya di dusun Brajan) ini menjadi tempat persembunyian para tokoh-tokoh pejuang di antaranya saat itu adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Krapyak (K.H. Munawir) beserta keluarganya. Karena itulah pondok pesantren yang didirikan oleh Kyai Muhammad Mahalli turut dihancurkan oleh pemerintah militer Jepang yang baru berkuasa.

Sejak tahun 1945 sampai 1947 kegiatan keagamaan di Wonokromo Bantul yang diasuh oleh Kyai Muhammad Mahalli mengalami kekosongan. Baru setelah pemerintah militer Jepang dapat dikalahkan oleh tentara Sekutu dan di saat gencargencarnya para pejuang melakukan taktik perang gerilya melawan agresi militer Belanda, pada tahun 1948 dia mulai aktif lagi melakukan dakwah Islam dengan membentuk majelis taklim. Aktif kembali Kyai Muhammad Mahalli membentuk majlis taklim ini, disamping untuk merintis kembali berdirinya pondok pesantren juga dengan tujuan untuk menggerakkan para santrinya melawan penjajah Belanda. Sebagaimana majlis taklim pada umumnya, para santri mengunjungi kyai secara teratur untuk menuntut ilmu agama Islam. Di majlis taklim yang dibentuk Kyai Muhammad Mahalli pun para santri mengunjungi beliau secara teratur.⁹

Selanjutnya perlu juga kita lihat kondisi dan aktivitas pondok pesantren di daerah Sleman. Kondisi dan aktivitas pondok yang nampak ada pada waktu itu yang menonjol adalah Pondok Pesantren Mlangi dan aktif menggalang para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Pondok Pesantren Mlangi ini terbagi menjadi empat pondok pesantren yang masing-masing daerah diasuh oleh Kyai Serudin Dawam, Kyai Moh. Dawam, Kyai Mochtar Dawam yang dikemudian pondok pesantren tersebut

dikenal dengan nama Pondok Pesantren An-Nahidlah, Pondok Pesantren Al Muftah, Pondok Pesantren As-Salafiah dan Pondok Pesantren Al-Irsyad.

Selain itu di Sleman juga terdapat pondok pesantren di daerah Krapyak Lor yang diasuh oleh Kyai Muhdi. Daerah Krapyak Lor ini mempunyai andil besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Begitu juga untuk daerah Ngebang Tempel, ada pondok pesantren yang dikenal dengan nama Idharul Haq dan di Keyudan Kalasan dengan nama Pondok Pesantren Kiyudan. Bahkan di daerah Pokoh, Banyurejo Tempel Sleman ada pondok pesantren yang diasuh Kyai Jumali. Kyai ini pada masa 1945-1949 merupakan salah seorang yang mempunyai perhatian besar terhadap situasi dan kondisi masyarakat sekitar dalam kaitannya dengan perjuangan kemerdekaan.¹⁰

Selanjutnya untuk daerah Kulonprogo pada masa perang kemerdekaan juga ada pondok yang diasuh oleh Kyai Mat Karsan. Beliau dikenal sebagai kyai yang mempunyai kekuatan ghaib. Para gerilyawan TNI pada masa itu banyak yang diberi bekal berupa *sifat kandel* dari kyai tersebut untuk kegiatan perjuangan kemerdekaan.

Bahkan di daerah Gunungkidul pada awal Proklamasi Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengirimkan utusan ke Gunungkidul. Utusan tersebut membawa *titah* agar dilakukan pendaftaran terhadap para kyai. Isi *titah* itu antara lain: agar para kyai berjuang dengan kebatinan dan menjadi tameng para pejuang RI. *Titah* Sultan ini disambut positif oleh para kyai. Hal ini terlihat ketika para kyai yang berkumpul di kantor kabupaten dan secara spontan mendukung penuh *titah* Sultan tersebut.

Bagi ulama Kristiani, pada awal proklamasi umumnya kehidupan gereja mendukung kemerdekaan dengan ditandai berkibarnya bendera Merah Putih dalam khotbah-khotbah di gereja seperti di Gereja Kotabaru. Para pastor memberikan khotbah yang intinya menunjukkan bahwa kecintaan mereka kepada bangsa dan tanah air. Bahkan Gedung Seminari yang semula dipakai sebagai kantor pemerintah Jepang, pada awal kemerdekaan diserahkan pemerintah RI dan ketika pemerintah

pusat RI pindah ke Yogyakarta tahun 1946 komplek gedung itu menjadi kantor Departemen Penerangan dan Pertahanan. Menurut G. Mudjanto dalam bukunya berjudul *Sejarah Gereja Kotabaru* menyebutkan bahwa gereja-gereja Katholik di Yogyakarta pada periode 1945-1949 banyak membantu para pejuang bukan hanya dengan doa-doa tetapi juga bahan makanan seperti ikan kering, gula dan pakaian.¹¹

Begitu juga bagi Gereja Pugeran merupakan gereja tua yang didirikan tahun 1934. Pada masa revolusi phisik mempunyai andil membantu para pejuang melalui usaha-usaha sosial, dan menyelamatkan masyarakat yang rumahnya terkena bumi hangus Belanda. Bahkan gereja ini juga pernah dipakai sebagai tempat penghubung rahasia pula antara para gerilyawan Perang Kemerdekaan Republik Indonesia yang bergerak di dalam dan di luar kota Yogyakarta. Hal ini terlihat dalam prasasti di depan gereja yang berbunyi sebagai berikut:

PRASASTI PESTA EMAS

Di bawah naungan Hati Kudus Juru Selamat Kristus para pastur beserta umat paroki Pugeran dengan penuh bakti serta syukur memperingati hari ulang tahun ke 50 Gereja Hati Kudus tercinta ini; khususnya dengan kenang-kenangan bahagia bahwa pada hari-hari yang paling gelap penuh derita 19 Desember 1948-19 Januari 1949 selama perang kemerdekaan Republik Indonesia tempat ini telah menjadi pengungsian dan perlindungan bagi penduduk tak bersalah di sekitar gereja Pugeran dan merupakan tempat penghubung rahasia pula antara para pejuang gerilyawan perang kemerdekaan Republik Indonesia yang bergerak di dalam dan di luar kota Yogyakarta.¹²

Pugeran 29 Juli 1984
Atas nama Umat Paroki Pugeran
Uskup Agung Semarang
ttd
Mgr. Julius Darmaatmodja, SJ.

Atas nama Masyarakat Jogjakarta;
Wakil Gubernur
Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
ttd
Paku Alam VIII

Bahkan pastor-pastor yang berkhotbah di gereja ini seperti yang diungkapkan oleh Rama Sandiwan Pr. Menekankan ada 5 hal yang penting, Mengapa Tuhan mencipta dan memelihara Manusia? Yaitu:

1. Orang tua: menerima dan memelihara, mendidik sejak dalam kandungan
2. Tanah Air: menyediakan kebutuhan hidup sehari-hari, sandang pangan dan tempat tinggal
3. Bangsa: menerima di tengah-tengahnya, membantu orang tua mencakup kebutuhan hidup sehari-hari
4. Negara: menjaga kesejahteraan dan ketertiban umum agar orang mudah melaksanakan kewajiban hidup
5. Agama: memimpin peribadatan dan hubungan baik dengan Tuhan.

Tanpa lima hal ini manusia tidak dapat hidup secara layak. Tanpa orang tua manusia tak tercipta, tanpa tanah air manusia tidak punya tempat berpijak, tanpa bangsa, manusia sukar mencukupi keperluan hidup sehari-hari, tanpa negara keadaan kacau, tanpa agama manusia sukar melaksanakan kewajiban beribadah kepada Tuhan. Hal itu diwahyukan Tuhan melalui Nabi Musa di Gunung Sinai dengan kata-kata sederhana "Hormatilah Ibu - Bapakmu" yang intinya mencakup lima hal tersebut di atas.

Selain itu di selatan kota Yogyakarta ada gereja tua yang didirikan tahun 1924 dikenal dengannama Gereja Katholik Kudus Ganjuran. Gereja ini pada masa revolusi tetap *eris* bahkan khotbah-khotbah yang dilakukan oleh para rohaniwan Katholik tetap seperti biasa. Suatu hal yang menarik di tengah-tengahnya gejolak revolusi, seminari menengah Paroku pernah hijrah ke gereja Ganjuran. Hal ini menunjukkan kehidupan umat Katholik digereja tersebut tetap aktif. Bahkan aktivitas sosial nampak ketika pabrik gula di Gondanglipura dibumihanguskan, barang-barang sebagian dapat diselamatkan, serta sebagian karyawannya ada yang ngungsi di tampung digereja tersebut. Pabrik gula yang pada masa kolonial cukup besar kontribusinya dan didirikan

oleh keluarga Schmutzer terpaksa dibumihanguskan demi perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Selanjutnya di daerah Kulonprogo tepatnya di komplek perbukitan Boro, kecamatan Kalibawang terdapat bangunan tempat ibadat umat Katholik beserta bangunan rumah sakit yang bernama Santo Yusuf didirikan tahu 1930. Pada awal kemerdekaan kira-kira 3 hari setelah 17 Agustus 1945, jiwa nasionalisme gereja tampak ketika bendera Merah Putih dikibarkan di halaman gereja di sebelah kanan pasturan. Khotbah yang dilakukan oleh pastor cukup berani yang intinya menekankan bahwa kemerdekaan itu mahal harganya, dan kondisi pasturan waktu itu masih banyak pastor-pastor Belanda. Pada periode revolusi kehidupan gereja beserta rumah sakit Santo Yusuf mempunyai peranan penting bagi gerilyawan TNI, penduduk ataupun pengunjung karena banyak membantu para pejuang kita yang berupa penyediaan bahan makanan maupun pengobatan.¹³

Begitu juga aktivitas gereja katholik beserta umatnya di Klepu, Ngijon Sleman barat yang dibangun tahun 1929, pada periode 1945-1949, terutama pada awal kemerdekaan banyak para pegawai dan pemuda Katholik tergabung pada pemerintahan militer untuk ikut bergerilya mempertahankan kemerdekaan. Pada awal proklamasi gereja di Klepu ini hampir dibakar massa karena diduga merupakan tempat persembunyian tentara Belanda, akan tetapi dengan penjagaan yang ketat yang dilakukan oleh pemerintah nasionalis dan atas usaha yang gigih R.G. Hardjoadisumarta, gereja tersebut dapat diselamatkan dan aktivitas kegiatan sehari-hari berjalan seperti biasa.

Begitu juga di daerah Sleman yang lain yang masih berbentuk kapel di antaranya Medari, Somohitan, Mlati. Pada masa awal proklamasi kapel-kapel tersebut secara tidak langsung ikut mendukung kemerdekaan, akan tetapi khusus untuk kapel Somohitan terpaksa terkena aksi bumi hangus dan terbakar habis oleh gerilyawan TNI.¹⁴

Selanjutnya bagaimana aktivitas gereja Kristen beserta umatnya pada masa 1945-1949? Menurut hasil wawancara dan sumber tertulis dari kalangan gereja menyebutkan bahwa

gereja-gereja Kristen mempunyai andil yang cukup berarti bagi perjuangan bangsa. Gereja-gereja Kristen beserta umatnya pada periode tersebut mulai bangkit kembali untuk membenahi dirinya termasuk juga Jemaat Kristen Jawa Sawo Kembar Gondokusuman. Usaha-usaha untuk mengembangkan pemberitaan injil mulai digiatkan kembali. Bahkan di tengah-tengah gejolak revolusi gereja Kristen Jawa Sawo Kembar ini tetap melaksanakan tugas kewajibannya dalam bidang pembinaan kehidupan rohani.

Pendeta gereja Kristen di Sawo Kembar pada awal proklamasi ada dua yaitu Darmoatmodjo dan Wiyoto Harjotaruno. Dalam khotbahnya kedua pendeta itu mensosialisasikan pentingnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Bahkan pendeta yang lainnya dalam memberikan khotbah tentang kemerdekaan mengambil dari Roma I pasal 5 bahwa “Tuhan telah memberikan kemerdekaan, tentang kemerdekaan yang harus kita pahami dan merdeka yang langgeng artinya kemerdekaan besok pada setelah meninggal dunia itu akan mendapatkan kerajaan surga”.¹⁵

Isi khotbah yang dikaitkan dengan proklamasi selalu dikaitkan dalam injil tersebut yaitu “hormatilah segala kekuasaan pemberian Tuhan”. Orang beriman itu harus percaya bahwa kekuasaan yang ada sekarang ini adalah pemberian Tuhan. Jadi kita harus menghormati kekuasaan yang ada di dunia dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Pendeta Wiyata Harjotaruno dalam mensosialisasikan berita proklamasi dengan penuh semangat terjun ke kampung-kampung.

Bagi daerah Kulonprogo, terutama di Gereja Jami' Wates, ulama Kristen dalam menyambut proklamasi situasi agak berbeda dengan di Yogyakarta. Beda waktu proklamasi dikumandangkan, situasi masyarakatnya masih tetap dalam keadaan tenang dalam arti belum mengerti apakah Indonesia benar-benar sudah merdeka. Berita proklamasi itu didengar oleh aktivis gereja yang bernama Martoharsono yang waktu itu masih menjadi Guru SMP Negeri I Wates. Martoharsono mendengar berita proklamasi itu dari radio pada pukul 22.30 (hari Jumat 1945), kemudian pagi harinya diberitakan pada teman-temannya di lingkungan guru. Mengapa tidak memberi tahu gereja? Kata Martoharsono, situasi

gereja di Wates pada waktu itu dikelilingi orang-orang Jepang dan sebagian orang Belanda yang berada di sebelah timur alun-alun. Pada waktu itu pendeta yang ada di gereja Kristen Wates bernama Harja Siswaya diberitahu dan pada pagi harinya dikibarkan bendera Merah Putih, masyarakat sekitar kemudian mengikutinya. Isi khotbah di gereja dengan mengutip injil Matius bab 15 ayat 48 yang berbunyi “Sebab itu hendaklah kami ini sempurna sama seperti bapamu yang di surga, sempurna adanya”. Isi khotbah ini secara samar-samar dikaitkan dengan arti kebebasan atau kemerdekaan. Khotbah ini selalu diulang-ulang setiap minggu.¹⁶

CATATAN BAB III
KONDISI DAN AKTIVITAS ULAMA DI DIY
PERIODE 1945-1949

1. Departemen Agama RI, *Al Qor'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, 1982/1983, hlm. 929.
2. *Ibid.* hal 94
3. *Ibid.* hlm. 518
4. Ahmad Adaby Darban, *fragmenta Sejarah Islam di Indonesia*, Yogya: Pustaka Irma, 1984. Hal 50. Lihat juga Drs Tashadi dkk, *Sejarah Perjuangan Hisbullah Sabilillah Divisi Sunan Bonang*, halaman 73.
5. Clefford Geertz, *Kebudayaan dan Agama* (terjemahan), Yogya : Kanisius, 1992, hal 78.
6. Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, Jakarta : P3M, 1986, hal 138-139.
7. Wawancara dengan Mohammad Ridwan di Bantul, tanggal 24 Oktober 1999.
8. Hermawan Sulistiyo, *Tranformasi Kepemimpinan di Pesantren*, *Pesantren*, No. 1/Vol. III, Jakarta, P3M, 1981
9. Wawancara dengan H. Mahmud, mantan laskar APS di Bejen Bantul, 26 Oktober 1999: wawancara dengan Moh. Ridwan di Bantul, tanggal 24 Oktober 1999.

10. Riwayat Singkat Kyai Muhdi (Dokumen unperblished).
11. G. Mudjanto dkk, *Sejarah Gerakan Kotabaru Santo Antonius dan Kehidupan Umatnya*. Yogya: Panitia Peringatan 50 Tahun Gereja Kotabaru, 1976. Hal 50-60.
12. *60 tahun Gereja Hati Kudus Yesus Pugeran 1934-1994*. Yogya : Panitia Peringatan 60 tahu Gereja Pugeran Yogyakarta. 1994. Hal 5-15.
13. *Ibid.*
14. FX. Sujam dkk. *Setengah Abad Gereja Santo Petrus dan Paulus Klepu: Sejarah dan Umatnya*. Panitia Peringatan Setengah abad. (Naskah Ketik) hal 1-30).
15. Wawancara Sastra Suwignyo di Klitren Lor Yogya, tanggal 30 Agustus 1999.
16. Wawancara dengan Martoharsono di Yogyakarta tanggal 5 September 1999.

BAB IV

KETERLIBATAN ULAMA DI DIY PADA MASA REVOLUSI PHISIK 1945-1949

Pada awal proklamasi tahun 1945 suasana kota Yogyakarta diliputi oleh nyalanya api revolusi rakyat dengan senjata apa adanya, mereka bertekad akan menurunkan bendera Jepang Hinomaru di gedung-gedung pemerintahan Jepang dan diganti dengan Sang Saka Merah Putih. Setelah berhasil mengibarkan Sang Saka Merah Putih di Balai Mataram (Senisono), rakyat dengan gagah berani menuju Coikan Kantai (Gedung Agung) dengan tujuan menurunkan bendera Jepang Hinomaru dan mengibarkan Sang Saka Merah Putih.

Dalam bagian ini akan diuraikan tentang keterlibatan ulama dalam revolusi rakyat di Yogyakarta sejak awal proklamasi sampai agresi militer Belanda ke II. Menurut berbagai laporan para pelaku sejarah revolusi rakyat di Yogyakarta ternyata kaum ulama sejak sebelum proklamasi sudah aktif berjuang dengan gigih. Lebih-lebih lagi pada zaman revolusi fisik mereka ikut mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Hal ini dapat ditelusuri dari kisah pertempuran Kotabaru 7 Oktober 1945, terutama keterlibatan ulama Islam yang tergabung dalam BKR, BPU dan Polisi Istimewa, tidak bisa dipungkiri oleh sejarah. Mereka banyak yang tercatat sebagai syuhada yang gugur di medan juang itu.

Sejarah juga telah membuktikan bagaimana peran yang dilakukan para ulama di masa-masa sebelum dan sesudah kemerdekaan. Mereka melalui wadah-wadah pengajian atau pondok pesantrennya, tidak hanya memberikan siraman rohani kepada umat Islam untuk berjuang demi membela bangsa dan negara, akan tetapi mereka bekerja keras untuk membina umatnya agar memiliki sikap semangat tempur serta sikap cinta tanah air yang merupakan bagian dari wujud keimanan setiap muslim.

Gema kemerdekaan yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 segera sampai ke Yogyakarta, dan dengan segera pula kemudian keluar maklumat kedua Sri Paduka (Sultan Hamengku Buwana IX dan Paku Alam VIII), yang memerintahkan kepada para pejuang yang telah bergabung dalam menghadapi setiap usaha pendudukan kembali wilayah Yogyakarta. Maklumat tersebut juga sebagai jawaban terhadap situasi kondisi Yogyakarta, dimana sikap pemerintah pendudukan Jepang yang seolah-olah masih berkuasa.

Seruan dari kedua penguasa Yogyakarta tersebut, ternyata mendapat sambutan positif dari kalangan pejuang umat Islam. Hal ini ditandai munculnya berbagai wadah perjuangan yang lahir di tiap-tiap kampung dan lingkungan masjid, yang terdiri dari mereka yang sebelumnya aktif di badan-badan pendidikan militer Jepang (Keibodan, Seinendan, Heiho, Peta dan Hisbullah), misalnya barisan pemuda Kauman, Prawirotaman, Suronatan, Pakualaman dan sebagainya. Wadah-wadah perjuangan ini sebagian besar dipelopori oleh para mantan Daidanco, Peta yang telah dibubarkan dan dilucuti senjatanya oleh Jepang. Mereka merencanakan untuk merebut kembali dan melucuti senjata pemerintah militer Jepang sebelum nantinya didahului oleh pihak Sekutu.

Usaha-usaha pelucutan dan perebutan kembali senjata serta perkantoran milik pemerintah militer Jepang telah berhasil dilakukan, tetapi di Yogyakarta masih terdapat satu pusat markas tentara inti Jepang Masai Butai yang berada di Kotabaru, yang di

dalam markas itu disimpan berbagai macam senjata milik Jepang. Posisi Masai Butai Kotabaru ini, tepatnya di sebelah timur stadion Kridosono yang sekarang dipergunakan sebagai asrama Koren 072 Pamungkas.¹

Melihat posisinya sebagai pusat dari kekuatan tentara Jepang, jelas akan banyak mengalami kesulitan untuk menundukkan Jepang sebelum markas tersebut dikuasai. Sebab, pemerintah militer Jepang di Yogyakarta telah menyiapkan penjagaan ekstra ketat atas markas Jepang, guna mengantisipasi sewaktu-waktu mendapat serangan mendadak dari para pejuang Yogyakarta. Sementara itu para tokoh Islam yang memegang posisi penting bersama tokoh pejuang yang lain, di antaranya Moh. Sholeh (Mantan Daidanco Peta), Umar Slamet, R.P. Soedarsono dan beberapa anggota Polisi Istimewa mengadakan musyawarah untuk mencari jalan keluar bagi lancarnya perebutan markas Jepang di Kotabaru.

Pada musyawarah tersebut akhirnya diambil kata sepakat, bahwa para pejuang pada dasarnya tidak menghendaki terjadinya pertempuran fisik antara pihak pejuang dengan pihak tentara Jepang, karena sebagai sarana yang ditempuh pertama kali dalam rangka perebutan dan pelucutan senjata dari Masai Butai Kotabaru tersebut adalah melalui jalur diplomasi terlebih dahulu. Akan tetapi jika jalur diplomasi gagal, dengan terpaksa para pejuang dan rakyat harus siap mengadakan perlawanan fisik. Hasil pertemuan tersebut memutuskan bahwa pelaksanaan jalur diplomasi akan dilakukan dengan jalan perundingan dengan pihak pemerintah militer Jepang yang ada di Kotabaru. Perundingan dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 1945 pada jam 19.00. Adapun perwakilan pejuang di antaranya adalah Moh. Sholeh sebagai ketua Komite Nasional Indonesia Yogyakarta, R.P. Soedarsono sebagai wakil dari Polisi Istimewa dan Soendjojo dan Bardosono sebagai wakil dari BKR. Mereka bersama-sama menghadap Butaitjo Mayor Otzuka, Kempetaicho Sasakai, Kapten Ito dan Kianbucho dari pihak Jepang. Dalam perundingan tersebut pihak pejuang secara terang-terangan meminta kepada pihak pemerintah militer Jepang agar menyerahkan senjatanya kepada pihak pejuang

Yogyakarta. Akan tetapi ternyata perundingan menemui jalan buntu karena pihak Jepang dengan secara licik tetap berusaha ingin mempertahankan kedudukannya dan enggan menyerahkan senjatanya kepada pihak pejuang. Pihak Jepang memberi kesanggupan akan menyerahkan pada esok harinya jam 10.00 pagi setelah mendapat ijin dari Jendral Nakamura di Magelang.²

Demikianlah perundingan dengan pihak pemerintah militer Jepang akhirnya gagal, dan selanjutnya para pejuang yang dimotori para tokoh umat Islam yang tergabung dalam BKR, BPU, Polisi Istimewa bersama rakyat yang sudah siap mengepung Masai Butai Kotabaru pada sekitar jam 03.00 mengadakan perlawanan fisik untuk merebut senjata dari pihak Jepang, walaupun dengan perlengkapan senjata yang sederhana.

Selain persiapan diplomasi, para pejuang yang dimotori oleh para ulama juga mempersiapkan fisik lainnya yang mendukung keberhasilan dalam merebut senjata Jepang yang ada di markas Butai Kotabaru. Untuk membahas persiapan ini, juga telah dilakukan pertemuan antar para tokoh pejuang, yang memutuskan untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif apabila nantinya jalur perundingan gagal, antara lain bagaimana cara pengerahan rakyat, tanda awal penyerangan, siapa-siapa yang mengomando dari tiap-tiap bagian, siapa yang memberi komando bagian dapur umum.

Dalam usaha mendukung keberhasilan perebutan senjata di Kotabaru, penting untuk dipersiapkan adalah masalah pengerahan massa. Mengingat lawan yang akan dihadapi merupakan tentara inti Jepang, yang tentunya harus dipersiapkan dengan baik segala sesuatunya. Kekuatan massa rakyat merupakan modal yang besar artinya bagi usaha mengusir penjajah Jepang serta memaksa mereka untuk menyerahkan kekuasaannya.

Persiapan untuk menggalang kekuatan rakyat ini, dipersiapkan dengan sangat singkat, mengingat rencana untuk merebut Kotabaru dirapatkan sehari sebelum peristiwa tersebut

meletus. Karenanya untuk memegang tanggung jawab ini memerlukan orang yang lincah dan tegas, serta tentunya seorang yang ucapannya dapat dipercaya oleh rakyat. Hasil pertemuan para tokoh pejuang Yogyakarta memutuskan untuk menunjukkan Faridan Noto (tentara Peta), dia dipandang tepat mengingat sebelumnya dipandang amat dekat massa rakyat terutama para pemudanya.

Sebagai seorang yang tanggung jawab, dia praktis hanya diberi waktu kurang dari 24 jam untuk melaksanakan tugasnya. Karenanya begitu mendapat amanat tersebut, dia langsung menghubungi kelompok pemuda rakyat, baik yang mengatasnamakan kampung maupun masjid. Mereka diminta untuk segera menuju Kotabaru untuk mengepung Masai Butai dan sambil menunggu komando yang diberikan apabila jalan diplomasi gagal.

Dalam rangka membantu tugas mengerahkan massa, dia dibantu oleh Oemar Slamet (tentara Peta). Hanya saja Oemar Slamet diberi tugas menghubungi pihak pemerintah desa yang ada di sekitar Kotabaru untuk membantu memberikan penjelasan kepada rakyatnya, serta membantu mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Mangkoehadiningrat seorang Pamong Praja Danuredjan, mengisahkan bahwa dia diberi tugas oleh Oemar Slamet untuk mengerahkan rakyat Danuredjan dengan membawa persenjataan apa adanya. Dia juga diminta meminjam truk yang ada di Pabrik Paku Klitren untuk mengangkut massa pemuda yang ada di Kotagede dan Umbulharjo.

Selain persiapan pengerahan massa, juga para pejuang mempersiapkan persenjataan yang ada, baik berupa persenjataan modern milik Polisi Istimewa, juga tidak kalah pentingnya mempersiapkan persenjataan sederhana, seperti keris, tombak, bambu runcing, clurit dan sebagainya. Hasil dari persiapan persenjataan meliputi persenjataan milik Polisi Istimewa sendiri saat itu terdiri dari 90 Karabyn, 1 Metraliur, 5 Lewis Machine Gun, 2 kaki Kandju. Sedangkan BKR yang dipimpin Soeharto

bersenjatakan 14 pucuk karabyn, 1 pucuk kaki Kandju, 7 pucuk pistol/revolver, granat dan pedang. Dalam persiapan massa ini nampak keterlibatan umat Islam.

Islam memerintahkan kepada umatnya, untuk berjuang di jalan Allah (jihad fi sabilillah) tidak hanya mengorbankan jiwa, tetapi juga tidak kalah pentingnya adalah berjuang dengan harta. Karenanya umat Islam disamping dituntut untuk mengabdikan kepada Allah dengan beribadah kepada-Nya, juga dituntut untuk memenuhi kebutuhannya sebagai manusia yang hidup di dunia dengan jalan berusaha agar kebutuhan hidupnya tercukupi.³

Peristiwa pertempuran Kotabaru yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 1945 tidak hanya menggerakkan para kaum laki-laki untuk berjuang melawan tentara Jepang di Kotabaru, tetapi juga tidak ketinggalan dari peran serta para wanita. Para wanita yang juga sebagai istri pejuang dengan dibantu oleh para pemudinya tersebut betugas di garis belakang guna menyediakan dan menyiapkan bahan makanan yang diberikan kepada para pejuang. Para wanita yang betugas di dapur umum tersebut, banyak diambil dari ibu-ibu dan para pemuda yang aktif di kelompok-kelompok pengajian serta aktif dalam organisasi Persatuan Wanita Indonesia (Perwani).

Alif Bariyah seorang mantan pengurus Perwani mengisahkan, bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pertempuran Kotabaru telah disiapkan dapur umum yang bertempat di Jalan Bausasran. Ibu-ibu telah bekerja dari mulai jam 03.00 dini hari sampai pagi untuk menyiapkan makanan dan minuman bagi para pejuang di Kotabaru. Dapur umum juga tidak menolak apabila ada masyarakat yang ingin memberikan bantuan makanan dan minuman. Hal ini seperti dikisahkan oleh Ibu Darmo yang juga menyerahkan beberapa nuk (nasi yang dibungkus daun pisang) kepada dapur umum.

Selain petugas mempersiapkan dapur umum, kaum wanita terutama para pemudinya juga bertugas sebagai petugas palang merah. Seperti yang dikisahkan oleh Ibu Ratna Wilis (mantan

petugas palang merah), bahwa persiapan palang merah semula direncanakan di sebelah utara Kridosono (tepatnya di gedung SMA 3), tetapi mengingat pertempuran terlanjur berkobar, akhirnya dipindah ke pos polisi Gondokusuman (sekarang pom bensin). Para petugas palang merah ini bertugas untuk membantu para pejuang yang luka-luka, atau yang meninggal dunia untuk diberi pertolongan pertama. Selanjutnya para korban tersebut, dibawa ke Rumah Sakit Pelayanan Kesehatan Umum Muhammadiyah (PKU) dan Rumah Sakit Betesda.⁴

Peran serta umat Islam di bidang materi tidak hanya terlihat dalam penyediaan dapur umum yang ada di sekitar Kotabaru, tetapi juga terlihat ketika para pejuang pulang dari pertempuran Kotabaru, di mana para wanita-wanita muslimat berada di sepanjang jalan yang dilewati para pejuang. Mereka secara spontanitas menyediakan bahan makanan dan air minum seadanya untuk diberikan kepada para pejuang yang pulang dari pertempuran. Mereka merasa puas dan senang dapat membantu para pejuang walaupun hanya dengan memberikan makanan dan minuman seadanya.

Selain itu beberapa aksi fisik yang dilakukan dalam rangka merebut kekuasaan dari pemerintah militer Jepang di Yogyakarta tidak terlepas dari peran umat Islam, terutama yang tergabung dalam badan-badan perjuangan yang muncul menjelang kemerdekaan RI. Baik badan perjuangan yang sengaja dibentuk oleh Jepang (Peta, Heiho dan Hisbullah) maupun badan perjuangan yang lahir dari kesadaran rakyat Yogyakarta dalam usaha mempertahankan kemerdekaan (BKR), keduanya tidak lepas dari kepeloporan umat Islam.

Demikian juga peristiwa pertempuran Kotabaru yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 1945, dilatarbelakangi oleh sebuah keinginan rakyat Yogyakarta untuk segera mengusir pemerintah pendudukan Jepang dari daerah Yogyakarta. Para pejuang Islam banyak berperan di dalamnya dengan ikhlas mengorbankan jiwa dan raganya demi semangat *jihad fi sabilillah* dan didorong

jiwa patriotisme yang tinggi terhadap tanah air tercintanya. Sebagaimana telah disinggung pada uraian di atas, bahwa pertempuran Kotabaru yang merupakan sebagian dari sederetan peristiwa pada detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945 dalam rangka pemindahan kekuasaan dari tangan penguasa militer Jepang di Yogyakarta. Untuk mewujudkan keinginan tersebut para pejuang telah merencanakannya melalui kesepakatan dari berbagai untus pejuang yang ada di Yogyakarta.

Karenanya ketika pihak pemerintah militer Jepang tidak menerima permintaan para pejuang Yogyakarta untuk menyerahkan semua senjata yang ada di Kotabaru, langsung saja seperti yang telah direncanakan para tokoh pejuang umat Islam yang tergabung di dalam kesatuan Badan Keamanan Rakyat, Badan Pejuang Umum, dan Polisi Istimewa bersama kesatuan rakyat lainnya pada tanggal 6 Oktober 1945 langsung menyerbu markas Butai Kotabaru, setelah dirasa jalan diplomasi mengalami kegagalan.

Seperti juga yang telah direncanakan, bahwa untuk mengantisipasi adanya kemungkinan kegagalan dalam perundingan, massa rakyat telah dikerahkan oleh para pejuang untuk mengepung markas Butai Kotabaru. Untuk bagian perencanaan penyerbuan ditangani oleh Badan Pelaksanaan Komite Nasional Indonesia (BPKNIP) Yogyakarta di bawah komando Oemar Slamet (bekas daidanco Peta).

Melalui BPKNIP direncanakan bahwa penyerangan akan dimulai tepat pukul 03.00 dinihari, dan sebagai tanda dimulainya penyerbuan adalah apabila telah berbunyi granat dan pemadaman listrik di lingkungan markas Butai Kotabaru. Begitu pula melalui BKR telah diatur penempatan pasukan masing-masing arah sekitar markas Jepang serta beberapa orang yang bertugas sebagai memadamkan listrik.

Didorong oleh semangat *jidah fi sabilillah* dan cinta tanah air, para pemuda Islam Kauman dan kelompok pemuda kampung lainnya secara serentak menuju Kotabaru setelah mereka

mendengar bunyi *kentongan* yang ada dimenara bambu Rukun Kampung Kauman. Sesuai dengan rencana sekitar pukul 03.00 dinihari terdengar suara granat, saat itu pula listrik yang menuju ke bagian markas Butai Kotabaru dimatikan, yaitu dengan melalui transformeter (pusat listrik) yang berada di sebelah barat lapangan SMA 3 dan di sebelah timur Hotel Garuda. Sedangkan yang bertugas untuk mematikan listrik tersebut adalah Sumarno yang kebetulan biasa bekerja sebagai instalator listrik.

Pertempuran fisik antara para pejuang Yogyakarta dengan pihak Jepang akhirnya tidak bisa dikendalikan lagi. Dari barisan pejuang yang bersenjata lengkap hanya dari Polisi Istimewa yang dipimpin oleh Oni Sastroatmodjo, sedang yang lain hanya bersenjatakan tombak, golok, bambu runcing, dan sebagainya. Polisi Istimewa sendiri saat itu bersenjatakan 90 karabyn, 1 metraliur, 5 leuwis machine gun, 2 kaki kandju. Sedangkan dari BKR yang dipimpin Soeharto bersenjatakan 14 pucuk karabyn, 1 pucuk kaki kandju, 7 pucuk pistol/revolver, granat dan pedang. Dibandingkan dengan kekuatan Jepang, mereka terdiri dari resimen dengan senjata sebanyak ukuran untuk 4 batalyon.

Di saat pertempuran sedang berlangsung, beberapa tentara Jepang yang ada di Butaico Pingit datang ke Kotabaru, mereka dengan senang hati menyerahkan senjatanya kepada para pejuang asalkan anak buahnya tidak diganggu. Moh. Sholeh sebagai seorang yang banyak pengalaman dalam menggalang masa langsung saja terjun ke tengah-tengah pertempuran sambil memberikan dorongan kepada para pejuang yang sebagian besar terdiri dari para anggota-anggota PETA dan Hisbullah serta pemuda-pemuda Islam dengan ucapan-ucapan takbir dan maju terus.

Tembakan tentara Jepang makin lama makin berkurang dan merasa kewalahan menghadapi massa yang begitu semangat dengan senjata terhunus, maka sekitar pukul 10.00 pagi tanggal 7 Oktober 1945 terlihat bendera Merah Putih berkibar di Masai Butai Kotabaru sebagai isyarat bahwa tentara Jepang menyerah

kalah. Senjata Jepang berhasil dirampas sebanyak 360 buah dari berbagai jenis dan para serdadu Jepang di tawan.

Urusan persenjataan hasil rampasan kemudian ditangani oleh BKR untuk dikumpulkan di Benteng Vredenburg, sedangkan urusan tawanan diserahkan kepada Polisi Istimewa untuk membawanya ke rumah penjara di Wirogunan. Polisi Istimewa mengawal tawanan Jepang ini dengan berjalan kaki melalui Jalan Jenderal Sudirman, Tugu, Jalan. P. Mangkubumi, Malioboro dan sebentar berhenti di muka Benteng Vredenburg, terus kemudian melalui Jalan P. Senopati menuju ke rumah penjara Wirogunan. Adapun para pejuang yang gugur pada pertempuran Kotabaru berjumlah 21 orang, dan 32 orang luka-luka. Dari 21 orang yang gugur terdapat beberapa orang pejuang Islam yang gugur sebagai Syuhada, di antaranya Faridan M. Noto (namanya diabadikan sebagai nama masjid di Pakualaman), Amad Djadjuli, Sjoehada, Sabirin, Achmad Zakir, Moh. Tarom, Abu Bakar Ali, Djohar Ngadikan dan lain-lain. Sedangkan pemuda Kauman yang gugur adalah Moh. Tarom dan Abu Bakar Ali (seorang pemuda asal Makasar). Untuk mengenang jasa mereka diabadikan sebagai nama jalan di sekitar Kotabaru.

Berhubung dengan gugurnya para pahlawan ini, rakyat Yogyakarta mulai pagi hari mengibarkan bendera setengah tiang sebagai tanda berkabung. Pemakaman jenazah para pahlawan korban pertempuran Kotabaru tersebut dilakukan pada sore hari jam 16.00 di berangkatkan dari gedung nasional (Gedung Agung), untuk selanjutnya dimakamkan di makam Semaki (Taman Makam Pahlawan) dan yang lain di belakang masjid besar Kauman dan makam keluarga Karangajen.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa setelah berita proklamasi sampai ke wilayah Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII segera mengeluarkan sebuah maklumat, dengan maksud untuk memberi dukungan berdirinya Negara Republik Indonesia. Maklumat itu sendiri terutama ditujukan kepada seluruh rakyat Yogyakarta

untuk secara sukarela membentuk kesatuan-kesatuan perjuangan di kampungnya masing-masing, dalam rangka menjaga segala kemungkinan terjadinya kembali penjajahan.

Maklumat kedua penguasa Yogyakarta tersebut, segera mendapat sambutan hangat dari seluruh lapisan masyarakat Yogyakarta. Apalagi setelah mendapat dukungan dari lapisan ulama Yogyakarta yang sebelumnya memang telah turut serta berjuang melawan penjajah. Melalui para tokoh Islam yang sebelum aktif dalam badan-badan perjuangan seperti Seinendan, Keibodan, Peta dan Hisbullah, massa Yogyakarta dengan secara sukarela bergabung dalam laskar-laskar perjuangan di wilayah kampungnya masing-masing.

Dengan mengatasnamakan kampungnya masing-masing, laskar-laskar tersebut telah banyak memberikan andil bagi perjuangan mengusir penjajah Jepang dari bumi Yogyakarta, serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Haiban Hadjid mengisahkan bahwa terbentuknya Laskar Rakyat Kauman (sebagai bagian dari Laskar Rakyat Mataram) menamakan diri dengan nama "Laskar Rakyat Fisabilillah" di bawah pimpinan H. Dalhar. Dalam laskar ini juga terdapat barisan ulama yang dipimpin oleh M. Sarbini.⁵

Laskar-laskar yang telah terbentuk tersebut, kemudian menggabungkan diri dalam wadah perjuangan yang dibentuk atas instruksi BPKNIP pusat, yaitu Badan Keamanan Rakyat (BKR). Walaupun demikian mengingat begitu banyaknya laskar-laskar yang ada, sebagian dari laskar-laskar tersebut masih difungsikan untuk membantu gerak langkah BKR dalam mengusir dan melucuti senjata pemerintah militer Jepang.

Dengan demikian dalam peristiwa pertempuran Kotabaru, badan/laskar yang terlibat serta turut andil di dalamnya tidak hanya Badan Keamanan Rakyat atau Polisi Istimewa saja. Akan tetapi tidak kalah besarnya adalah turut andilnya laskar-laskar perjuangan rakyat yang ada di Yogyakarta, seperti mantan tentara Peta, Hisbullah dan Pemuda Kauman. Hal ini menunjukkan

keberhasilan pertempuran Kotabaru bukanlah hasil dari satu badan perjuangan saja, tetapi keberhasilannya atas perjuangan rakyat Yogyakarta.

Keberhasilan para pejuang Yogyakarta merebut senjata Jepang dalam pertempuran Kotabaru, disamping menambah kekuatan persenjataan bagi para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari usaha penjajahan kembali bangsa asing, keberhasilan pertempuran ini juga menambah semangat berjuang bagi pejuang untuk terus melakukan aksi-aksi pelucutan senjata pemerintah militer Jepang yang ada di Yogyakarta maupun yang ada di luar Yogyakarta.

Kebulatan tekad dan semangat para pejuang Yogyakarta ini terlihat dengan terus dilakukannya usaha-usaha pelucutan senjata Jepang setelah peristiwa Kotabaru, misalnya turut terlibatnya pejuang Yogyakarta yang tergabung dalam BKR pada pertempuran senjata Jepang di Kidobutai Jatingaleh Semarang. Demikian juga ketika pejuang Yogyakarta mendengar bahwa pasukan Jepang di lapangan Maguwo akan meninggalkan Yogyakarta dengan kekuatan persenjataan yang besar, mendorong para pejuang untuk melakukan pelucutan senjata. Peristiwa pelucutan senjata Jepang di lapangan Maguwo ini terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945, dengan diakhiri kemenangan di pihak pejuang.

Dengan terusirnya penjajah Jepang dari bumi Yogyakarta, bukan berarti perjuangan rakyat terhenti dan dapat dengan bebas melakukan kegiatan sehari-hari, tetapi ternyata beban yang lebih berat akan segera menyusul. Karena sebagaimana dijelaskan pada uraian sebelumnya, bahwa penyerahan kekuasaan wilayah yang diduduki Jepang selanjutnya akan diserahkan kepada pihak Sekutu.

Penyerahan kekuasaan pemerintah Jepang kepada Sekutu untuk wilayah Indonesia dilaksanakan pada tanggal 29 September 1945. Penyerahan kekuasaan tersebut pihak Sekutu diwakili oleh angkatan perang Inggris yang tergabung dalam *South East*

Asian Command (SEAC). Dalam melaksanakan tugasnya di Indonesia, ternyata angkatan perang Inggris ketika mendarat di Jakarta diboncengi oleh pihak Belanda yang tersusun dalam badan yang bernama *Netherland Indies Civil Administration* (NICA). Turut mendaratnya pihak Belanda bersama angkatan perang Inggris ini, tidak lain mereka bermaksud ingin menjajah kembali tanah air Indonesia.

Melihat posisi pusat pemerintahan Indonesia yang terancam pihak Belanda ini, mendorong Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia (BPKNI) Yogyakarta mengusulkan kepada pihak BPKNI Pusat untuk memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah Jawa Tengah. Munculnya usulan tersebut tidak lain menunjukkan akan kepedulian pejuang Yogyakarta terhadap masa depan negara Republik Indonesia.

Usulan pihak BPKNI Yogyakarta ini akhirnya diterima pihak BPKNIP dengan memilih Yogyakarta sebagai wilayah yang dianggap memiliki kekuatan dalam menghadapi kemungkinan serangan pihak Belanda. Pengambilan Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan RI tersebut, menunjukkan bahwa para pejuang Yogyakarta dianggap yang paling tepat untuk diberi tanggung jawab mempertahankan kemerdekaan RI. Mengingat para pejuang Yogyakarta telah menunjukkan keberhasilannya dalam perjuangan kemerdekaan RI. Pindahan pusat pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta ini dilakukan pada tanggal 4 Januari 1946.

Dengan pindahnya pusat pemerintahan ke Yogyakarta, otomatis wilayah ini menjadi sasaran utama bagi pihak Belanda untuk mencapai maksudnya menguasai kembali Indonesia. Hal ini disadari oleh para pejuang Yogyakarta, karenanya badan-badan/laskar-laskar perjuangan yang telah ada harus diaktifkan kembali serta ditingkatkan kekuatannya. Melalui Masyumi Cabang Yogyakarta, pada awal 1946 mengusulkan kepada pihak pemerintah RI agar mengizinkan terbentuknya "Askar Perang Sabil" (APS) dan "Markas Ulama Angkatan Perang Sabil" (MUAPS), untuk membantu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Demikianlah akibat dari keberhasilan pertempuran Kotabaru, yang ternyata tidak hanya menambah kekuatan persenjataan pejuang Yogyakarta, tetapi juga yang terpenting adalah menambah motivasi umat Islam Yogyakarta untuk terus berjuang mempertahankan kemerdekaan tanah air yang dicintainya.

Untuk periode berikutnya nampak keterlibatan ulama semakin besar peranannya dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Hal ini terlihat dengan terbentuknya Asykar Perang Sabil dan Badan Perjuangan Markas Ulama Asykar Perang Sabil (MUAPS) yang pembentukannya pada tanggal 23 Juli 1947, berkaitan dengan rangkaian kejadian yang mematangkan untuk lahirnya pasukan bersenjata dan Badan Perjuangan tersebut.⁶

Salah satu dari rangkaian kejadian di Yogyakarta adalah adanya Agresi Militer Belanda, yang menyebabkan di beberapa daerah Jawa Tengah diduduki Belanda. Keadaan ini mengakibatkan munculnya keprihatinan para pemimpin keagamaan dalam hal ini para kyai di Yogyakarta, yang kemudian memprakarsai berdirinya Asykar Perang Sabil. Mereka itu mengkhawatirkan kemungkinan tentara Belanda juga akan menyerbu daerah Yogyakarta.

Keprihatinan para kyai/ulama itu menyadarkan rakyat umumnya untuk ikut berpartisipasi dalam mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Hal ini pula yang mendorong para kyai untuk menjalankan ibadah I'tikaf bermunajad kepada Allah SWT dan mengadakan musyawarah di masjid At-Taqwa yang terletak di kampung Suronatan Yogyakarta, seraya berdoa memohon kehadiran Allah SWT.

Keputusan yang diambil oleh para kyai setelah mengadakan musyawarah pada tanggal 23 Juli 1947 ialah membuat wadah bagi umat Islam di Yogyakarta baik yang berasal dari kalangan masyarakat maupun pemuda-pemuda Islam mantan anggota Laskar Hisbullah dan Sabilillah. Wadah untuk mengorganisasi pemuda-pemuda Islam itu diberi nama Asykar Perang Sabil (APS) sedangkan wadah organisasi pemimpinnya disebut Markas Ulama Asykar Perang Sabil (MUAPS).

Gagasan dibentuknya APS dan MUAPS itu disampaikan dalam musyawarah para kyai ternama di Yogyakarta yang dihadiri oleh KH. R. Hadjid, KH. Juraimi, KH. Mahfudz Siradj, Ki Bagus Hadikusumo, KH. Abdul Azis, KH. Djohar, KH. Amin, KH. Daim, KH. Ahmad Badawi, Bakri Syaihid, Abdullah Mabrur dan M. Sarbini.

Selanjutnya musyawarah itu mencapai suatu kesepakatan untuk menyusun pengurus pusat APS yang terdiri atas:

Penasehat	:	Ki Bagus Hadikusumo
Imam	:	K.H. Mahfudz Siradj
Ketua	:	K.H. R. Hadjid
Wakil Ketua	:	K.H. Ahmad Badawi
Bendahara	:	K.H. Abdul Azis
Komandan	:	M. Sarbini
Wakil Komandan	:	K.H. Juraimi
Penerangan	:	Siradj Dahlan
Perlengkapan	:	Abdul Djawab
Persenjataan	:	M. Bakri Sudja
Logistik	:	Bakri Syahid
Administrasi	:	Daim ⁷

Pagi harinya Ki Bagus Hadikusumo, KH. Mahfudz dan Kyai Haji Badawi menghadap Sri Sultan Hamengku Buwono IX memberitahukan maksudnya untuk membentuk kesatuan laskar Asykar Perang Sabil seperti yang telah diputuskan dan mohon doa restu kepadanya. Sri Sultan Hamengku Buwono IX merestui dan memerintahkan agar para pimpinan Asykar Perang Sabil menghadap kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ternyata Jenderal Sudirman menyambut gagasan itu dengan senang hati dan menyanggupi untuk mengirim pelatih-pelatihnya.

Setelah wadah MUAPS terbentuk, untuk berjuang melawan Belanda segera menyusun kekuatan dengan melatih anggotanya

di halaman Masjid Besar Kauman dan di Alun-alun Utara Yogyakarta, dan segera mengirim surat ke berbagai kabupaten supaya segera diadakan pendaftaran anggota APS untuk membantu TNI di medan pertempuran.⁸

Pada masa Agresi Militer Belanda II, di mana seluruh kota Yogyakarta sudah dikuasai, perjuangan TNI bersama rakyat yang tergabung dalam APS saling bekerja sama. Sejak adanya pengumuman pemerintah tentang situasi Yogyakarta dan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh seluruh pasukan, maka imam MUAPS mulai memerintahkan kepada pengikutnya untuk bergabung dengan pasukan TNI.

Pengumuman pemerintah dalam usahanya menghadapi Agresi itu dikeluarkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman sebagai pucuk pimpinan TNI dengan nama perintah Kilat No. 1/PB/1948, yang isinya antara lain memerintahkan kepada semua jajaran angkatan perang RI agar menjalankan perang gerilya.⁹

Dalam memenuhi perintah kilat yang dikeluarkan tersebut seluruh kekuatan bersenjata meninggalkan kota dan mengadakan konsolidasi di sekitar Yogyakarta. Adapun MUAPS yang bermarkas di Kauman segera pindah ke luar kota oleh karena Belanda sudah mengetahui markas APS dan mengadakan pembagian tugas di antara para anggotanya yaitu mereka yang harus tetap tinggal di kota serta yang diperbolehkan meninggalkan kota.

Anggota badan perjuangan MUAPS yang mendapatkan tugas-tugas untuk tetap tinggal di kota antara lain KH. Mahfudz Siradj, KH. Badawi, KH. Djuraimi. Adapun pasukan bersenjata APS yang diperbolehkan meninggalkan kota, keluar melalui markasnya yang telah dipindahkan dari Kauman ke Notoprajan. Selanjutnya mereka menyebar dan membentuk daerah pertahanan di kabupaten Bantul, Sleman, Kulonprogo, dan Gunungkidul guna mempersiapkan perlawanan terhadap pasukan Belanda.

Gerakan perlawanan pasukan bersenjata APS muncul karena adanya dua faktor yang mendasarinya. Pertama, faktor eksterm

yaitu perlawanan TNI terhadap Belanda baik pada Agresi Belanda I maupun pada Agresi Belanda II. Kedua, faktor intern yaitu perlawanan TNI terhadap pemberontakan PKI di Madiun. Gerakan perlawanan ini dilakukan TNI akibat tidak adanya kesepakatan bersama antara bangsa Belanda dan bangsa Indonesia atas perundingan Hoge Veluwe, Linggarjati, dan perundingan Renville, sehingga menimbulkan berlangsungnya Agresi Belanda I serta pemberontakan PKI yang dilanjutkan dengan Agresi Belanda II. Konflik fisik baik antara TNI dengan bangsa Belanda maupun antara TNI dengan PKI menyadarkan ulama Islam yang tergabung dalam badan perjuangan MUAPS untuk menyusun kekuatan guna membantu TNI dalam menghadapi musuh tersebut.

4.1 Masa Agresi Belanda I

Situasi menjelang pertengahan tahun 1947 ternyata semakin menjurus kepada sikap dan tuntutan ultimatum dari pihak Belanda kepada pemerintah RI tertanggal 27 Mei 1947. Ultimatum itu berisi tentang pemerintahan bersama, uang bersama, impor-ekspor bersama, devisa bersama.¹⁰ Pada prinsipnya semua partai politik menolak ultimatum tersebut, namun Perdana Menteri Sjahrir dengan terpaksa menyanggupi ultimatum tersebut.

Partai-partai politik di Yogyakarta dengan tegas menolak isi pidato tersebut sehingga menimbulkan krisis dalam kabinet. Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan agresi kolonialnya di Indonesia, spontan mendapat sambutan dari pemerintah RI melalui jalur militer untuk berjuang melawan tindakan Belanda. Mendengar pesan itu para anggota APS merasa terpanggil untuk turut serta berjuang melawan Belanda.¹¹

MUAPS pusat segera mengirim surat perintah ke daerah kabupaten supaya menyimak anggota APS yang bersedia diberangkatkan ke medan pertempuran membantu tentara resmi. Untuk memenuhi permintaan tersebut, masing-masing kabupaten mengadakan pendaftaran dan latihan seperlunya sebagai bekal.

Dalam jangka waktu singkat, setelah menjalani latihan militer dan bekal mental, MUAPS segera mengirimkan pasukan bersenjata Askar Perang Sabil ke front pertempuran. Pengiriman pertama kali ke daerah Semarang yaitu di Mranggen dan Srandol. Perjalanan menuju lokasi itu ditempuh dengan berjalan kaki beberapa jam dengan melewati berbagai rintangan alam maupun gangguan lainnya.

Markas APS yang pada waktu itu berada di Tegal Layang Pandak juga mengirimkan satu pasukan bersenjata, yang berhasil bergabung dengan kekuatan lainnya melawan Belanda. Di antara pasukan APS yang gugur dalam pertempuran di Srandol itu adalah Ali, di pihak Belanda pun ada yang meninggal dalam pertempuran tersebut.¹²

Pada tanggal 31 Juli 1947 diputuskan bahwa pasukan bersenjata APS ditempatkan di perbatasan Kebumen yaitu di daerah Grabag sebelah timur kecamatan Pingit. Tentara resmi dan pasukan bersenjata APS bekerja sama mengadakan pertahanan di pegunungan Ngrancak Ambarawa ke timur sampai desa Tirta.¹³ Mereka melakukan penjagaan dan pencegahan di jalan antara Salatiga, Magelang dan Kebumen.

Di dalam mewujudkan hasil perundingan di atas, MUAPS memerintahkan kepada Sarbini, Kyai Jumairi agar meninjau daerah-daerah di sekitar pegunungan Ngrancak. Sesuai hasil pemantauan maka pasukan APS dipusatkan di Grabag. Daerah itu diketahui oleh Belanda, yang selanjutnya terjadi serangan yang sangat hebat. Pihak Belanda mendapat perlawanan sengit dari pasukan bersenjata APS dan memaksa untuk sementara menarik pasukannya sampai daerah Jambu dan Ambarawa.¹⁴

Belanda bermaksud mengadakan serangan untuk yang kedua kalinya, tentu dengan kekuatan yang lebih besar. Dari pihak pasukan bersenjata APS melakukan antisipasi terhadap gejala yang ada dengan menambah kekuatannya satu kompi. Satu kompi dari pasukan bersenjata APS ini dipimpin oleh Bachron Edrees yang didampingi Kyai Abdurahman dan Kyai Amin. Pasukan ini diperbantukan untuk mempertahankan daerah Kebumen bagian barat yang meliputi beberapa kecamatan, di antaranya kecamatan Pertanian, Poring dan Karangayam.¹⁵

Di antara anggota pasukan bersenjata APS yang dikirim ke daerah Kebumen itu terdapat orang-orang dari daerah Sedayu dan sekitarnya, salah satunya adalah Ahmad Badawi. Dalam pertempuran itu masing-masing pihak, baik Belanda maupun pasukan APS menderita korban jiwa yang tidak sedikit. Pengorbanan para anggota pasukan APS dalam turut mempertahankan kemerdekaan sangat besar. Mereka dengan rela dan penuh pengabdian mengorbankan harta, raga dan jiwanya untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Pertahanan pasukan APS di daerah Kebumen berakhir hingga awal Desember 1948.

Setelah badan perjuangan MUAPS dan pasukan bersenjata APS berdiri secara resmi dengan mendapatkan izin dari Menteri Pertahanan dan Keamanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Panglima Besar Jenderal Sudirman serta Gubernur Militer Republik Indonesia Letnan Jenderal G.P.H. Djatikusumo, maka ulama yang berperan sebagai imam dalam struktur organisasi MUAPS mulai menyusun kekuatan dengan melatih anggotanya di halaman Masjid Besar dan di Alun-alun Utara Yogyakarta.

Setelah satu minggu baik latihan militer maupun latihan mental berlangsung, MUAPS mulai mengirimkan pasukan bersenjata APS ke front pertempuran. Pengiriman pasukan bersenjata APS yang pertama kali adalah ke sekitar kota Semarang yaitu di daerah Mranggen dan di daerah Srandol. Di samping itu, MUAPS juga mengirimkan pasukan bersenjata APS ke daerah Kebumen. Pengiriman pasukan bersenjata APS itu dimaksudkan untuk membantu TNI dalam menghadapi pasukan Belanda.

MUAPS mengirimkan satu kompi pasukan bersenjata APS ke daerah Mranggen dengan komandan kompi KH. Juraimi dengan di dampingi KH. Hadjid sebagai imam. Adapun satu kompi pasukan bersenjata APS cabang Sleman di bawah komandan kompi Badri didampingi KH. Abdurrahman sebagai imam ikut berpartisipasi melawan Belanda. Setelah sampai di Mranggen pasukan bersenjata APS mengadakan pembagian tugas: pasukan

bersenjata APS yang ada di bawah komandan KH. Juraimi mengadakan pertahanan di daerah Mranggen sebelah timur, sedangkan pasukan bersenjata APS yang ada di bawah komandan Badri mendapat tugas untuk mengadakan pertahanan di daerah Mranggen sebelah selatan.¹⁶

Konflik fisik yang dilancarkan pasukan Belanda semakin memuncak, mereka melancarkan serangannya ke pos-pos pertahanan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setelah diketahui adanya pos pertahanan bangsa Indonesia di daerah Sronдол, maka mereka melancarkan serangannya dengan terus-menerus melepaskan tembaknya ke daerah pertahanan bangsa Indonesia. Dengan adanya pertempuran ini, maka MUAPS mengirimkan dua kompi pasukan bersenjata APS agar ikut berpartisipasi membantu TNI dalam menghadapi pasukan Belanda. Pasukan bersenjata APS Pusat ada di bawah Komandan Kompi Dimiyati Dahlan, sedangkan satu kompi pasukan bersenjata APS Cabang Kulonprogo ada di bawah Komandan M. Djohauri Suhaimi dengan didampingi empat imam yang tergabung dalam barisan Jenggot. Empat imam itu bernama Djauhari, K. Dahlan, K. Sahid, K. Bajuri yang memiliki tugas hanya memberi semangat dan moral pasukan bersenjata APS di daerah Sronдол. Oleh karena di Sronдол serangan Belanda di lancarkan dengan semakin keras, maka dua kompi pasukan bersenjata APS tidak mampu menahan serangan tersebut. Akan tetapi, pasukan bersenjata APS berhasil menghindari serangan dari pasukan Belanda untuk sementara waktu.

Pengiriman pasukan bersenjata APS ke daerah Kebumen di dasarkan atas perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman melalui surat perintah dari Jenderal Urip Sumohardjo selaku Kepala Staf TNI. Di samping adanya perintah tersebut, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menganjurkan agar pasukan bersenjata APS dalam perjuangannya menghadapi pasukan Belanda bekerja sama dengan Angkatan Oemat Islam (AOI) untuk menjadikan badan perjuangan mereka masing-masing dalam satu wadah yang sama. Dengan adanya perintah dari Panglima Besar Jenderal Sudirman

dan anjuran dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX, MUAPS yang bermarkas di komplek Masjid Besar Kauman Yogyakarta mengirimkan pasukan bersenjata APS dengan kekuatan satu batalyon yang diperlengkapi ± 120 pucuk senjata ke daerah Kebumen. Pasukan bersenjata APS tersebut ada di bawah komando Sarbini selaku komandan pertempuran MUAPS dengan didampingi KH. Juraimi sebagai wakil komandan dan KH. Mahfudz Siradj serta KH. R. Hadjid selaku imam. Mereka berangkat ke Kebumen dengan kereta api pada tanggal 30 Juli 1947, namun baru sampai di Magelang mereka turun dan menginap semalam di bekas markas Hizbullah Magelang untuk merencanakan daerah-daerah yang perlu dipertahankan dari serangan Belanda.

Rencana untuk mempertahankan daerah dari serangan Belanda ini telah dirundingkan oleh komandan pertempuran MUAPS Sarbini dengan komandan TNI sektor Magelang pada tanggal 31 Juli 1947. Dalam satu perundingan yang dilakukan antara wakil dari pasukan bersenjata APS dengan komandan TNI sektor Magelang bersama wakilnya yang tergabung dalam panitia rapat telah diputuskan bahwa pasukan bersenjata APS ditempatkan di perbatasan Kebumen yaitu di daerah Grabag sebelah timur kecamatan Pingit. Pada waktu itu komandan TNI sektor Pingit ada di bawah komandan Mayor Yani. Dengan demikian, pasukan bersenjata APS bersama anak buah Mayor Yani bekerjasama untuk mengadalan pertahanan dari pegunungan Ngrancak ke timur sampai di desa Tirto, menjaga jalan dari daerah Salatiga, Magelang hingga Kebumen.

Sebelum membentuk daerah pertahanan KH. Mahfudz Siradj setelah tiba di Kebumen di desa Ketuwon menyampaikan anjuran Sri Sultan Hamengku Buwono IX kepada pimpinan AOI yaitu Khoraisin Mahfudz agar badan perjuangan AOI digabungkan dengan MUAPS. Akan tetapi, Khoraisin Mahfudz dalam perundingannya di desa Ketuwon, Kebumen, tidak menyetujui ajakan KH. Mahfudz Siradj untuk menggabungkan pasukannya dalam satu wadah. Oleh karena itu, KH. Mahfudz Siradj membuat

garis perjuangan sendiri dengan mengerahkan pasukan bersenjata APS.

Di dalam mewujudkan hasil perundingannya dengan Komandan TNI sektor Magelang Kolonel Maryadi, usaha pada awal mulanya yang dilakukan KH. Mahfudz Siradj adalah memerintahkan Sarbini, K. Juraimi, dan salah seorang anggota pasukan bersenjata APS yang berasal dari Kota Gede bernama Jumairi agar meninjau daerah-daerah di sekitar pegunungan Ngrancak. Setelah diketahui situasi dan kondisi daerah tersebut, maka diputuskan markas pasukan bersenjata APS dipusatkan di Grabag, sedangkan markas untuk desa Bugel ke timur hingga pegunungan Ngrancak diketuai K. Jamhari.

Daerah pertahanan yang telah dibentuk oleh pasukan bersenjata APS rupanya diketahui Belanda. Oleh karena itu, Belanda melancarkan serangan ke daerah pertahanan pasukan bersenjata APS. Serangan Belanda yang pertama terhadap pasukan bersenjata APS dibalas oleh pasukan bersenjata APS sehingga terjadi konflik fisik yang tidak dapat dihindarkan. Dalam serangan Belanda yang pertama ini pasukan bersenjata APS dapat bertahan, sedangkan pasukan Belanda mundur ke daerah Jambu dan Ambarawa. Akan tetapi, pada hari berikutnya serangan pasukan Belanda terhadap pasukan bersenjata APS semakin memuncak, sehingga pasukan bersenjata APS melawannya dengan lebih keras pula. Oleh karena itu, untuk menambah kekuatan, MUAPS mengirimkan satu kompi pasukan bersenjata APS di bawah Komandan M. Bachron Edrees yang didampingi K. Abdurrahman dan K. Amin untuk membantu pasukan bersenjata APS dalam menghadapi serangan Belanda di daerah Kebumen bagian barat yang meliputi beberapa kecamatan di antaranya: Kecamatan Petanahan, Poring, dan Karangayam. Selama pertempuran dari anggota pasukan bersenjata APS ada yang gugur dalam medan pertempuran yaitu Rudin, sedangkan dari pihak Belanda ada pula yang meninggal. Pertahanan pasukan bersenjata APS di daerah perbatasan Kebumen berakhir hingga awal bulan Desember 1948.

4.2 Peranan Ulama Dalam Penumpasan Pemberontakan PKI Pada Tahun 1948

Situasi politik setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia diwarnai dengan pertentangan antara perjuangan bersenjata dan diplomasi. Hal ini disebabkan strategi yang digariskan para pemimpinnya selalu memperhitungkan faktor internal, yaitu interaksi antara golongan-golongan pada satu pihak, dan faktor eksternal yaitu konstelasi internasional yang tersusun oleh hubungan antar nasion-nasion.

Perjanjian Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 oleh Amir Syarifuddin mengakibatkan krisis kabinet kabinet dengan ditariknya wakil-wakil Masyumi dari Kabinet Amir Syarifuddin dan diikuti oleh Partai Nasional Indonesia (PNI) yang menuntut dibubarkannya kabinet Amir Syarifuddin. Perpecahan antar golongan kanan dan golongan kiri semakin memuncak setelah dibubarkannya kabinet Amir Syarifuddin dan dibentuknya kabinet Hatta yang tidak mengikutkan golongan kiri. Oleh karena itu, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada tanggal 26 Februari 1948 di Surakarta yang anggotanya terdiri atas partai-partai seperti PKI, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia dengan tujuan untuk menyusun kekuatan menentang Kabinet Hatta.¹⁷

Pertengahan antara FDR dengan golongan kanan semakin memuncak dan diwujudkan dengan pertentangan fisik di Surakarta dan mencapai puncak dalam pertentangan fisik di Madiun. Tindakan itu dilakukan untuk mencapai cita-cita FDR yaitu merebut kekuasaan pemerintah Republik Indonesia. Di dalam mencapai cita-cita ini, mereka berusaha untuk membubarkan kabinet presidetil Hatta dan menggantinya dengan sebuah kabinet yang bersifat parlementer. Hal ini sesuai dengan cita-cita komunisme bahwa apabila komunisme memiliki prinsip akan mendirikan suatu pemerintahan komunis, pemerintah yang sah dari negeri itu harus digulingkan, meskipun harus ditempuh dengan berbagai macam cara.¹⁸

Puncak dari tindakan kekerasan PKI di Madiun terhadap musuh-musuhnya baik terhadap pemerintah sipil maupun terhadap pemerintah militer Indonesia mendapatkan perlawanan yang keras pula dari TNI dan masyarakat pada umumnya serta pasukan bersenjata APS pada khususnya.

Pada bulan September 1948 pasukan bersenjata APS yang dikirim ke front menghadapi gerakan PKI berjumlah satu batalyon di bawah pimpinan Bachron Edrees. Dalam menghadapi gerakan PKI di daerah Grobogan, Purwodadi, Pati, dan Kudus, pasukan bersenjata APS bergabung dengan Batalyon Kemal Idris dan Batalyon Kusno Utomo dari TNI. Adapun 32 pasukan bersenjata APS yang ada dibawah pimpinan M. Djihaur Suhaimi dan diikuti imam APS K. Dihar dan K. Dimyati diberangkatkan dari desa Panjatan Kabupaten Kulonprogo menuju Ponorogo. Di Ponorogo pasukan bersenjata APS bersama dengan TNI melawan serangan yang datang dari pihak PKI. Pada waktu mempertahankan serangan PKI di pondok pesantren Ponorogo, seluruh pasukan bersenjata APS berhasil menyelamatkan diri dan selanjutnya melanjutkan perjalanannya hingga di daerah Gorang Gareng. Di Gorang Gareng pasukan bersenjata APS menggabungkan diri dengan pasukan bersenjata APS dibawah pimpinan Ir. Sofyan yang telah dikirimkan oleh MUAPS untuk menambah kekuatan. Selanjutnya pasukan bersenjata APS di dalam melawan serangan PKI menggabungkan diri dengan TNI Batalyon Darsono.¹⁹

Perlawanan antara kedua belah pihak terjadi semakin keras, meskipun kekuatan mereka tidak seimbang. Oleh karena kekuatan PKI lebih besar dibandingkan dengan kekuatan pasukan bersenjata APS, maka pasukan bersenjata APS terdesak mundur. Pasukan bersenjata APS yang ada di bawah pimpinan Ir. Sofyan yang berjumlah 25 orang tewas, sedangkan pasukan bersenjata APS yang ada di bawah pimpinan M. Djohaur Suhaimi seluruhnya selamat. Selanjutnya pasukan bersenjata APS yang ada dibawah pimpinan M. Djohaur Suhaimi melanjutkan perjalanannya ke barat mengambil mayat pasukan bersenjata APS yang ada di bawah pimpinan Ir. Sofyan untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib di daerah setempat. Akhirnya, pada awal bulan November 1948 pasukan berenjata APS kembali ke markas Yogyakarta.

Di Kabupaten Gunungkidul, setelah PKI mundur dari Surakarta menuju ke Kabupaten Gunungkidul melalui Wonogiri, terjadi pertempuran di sekitar daerah Kabupaten Gunungkidul. PKI membuat pertahanannya di desa Ponjong, dari desa itu mereka melancarkan serangannya terhadap musuh mereka di Kabupaten Gunungkidul. Adapun pasukan bersenjata APS membuat pertahanannya di 13 kecamatan, sehingga sering terjadi pertempuran di daerah pertahanan tersebut.

Di dalam menghadapi serangan PKI itu, pasukan bersenjata APS dari Yogyakarta dikirimkan untuk membantu pasukan bersenjata APS yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Dalam usahanya menggempur PKI di seluruh kecamatan dan bahkan di desa dibuat pertahanan untuk mengawasi gerakan PKI, sehingga PKI tidak dapat bergerak dengan bebas. Dari arah selatan, barat, utara, dan timur masing-masing kesatuan siap melawan serangan PKI. Pertempuran antara pasukan bersenjata APS dan PKI tidak memberi hasil yang memuaskan bagi PKI dalam usahanya untuk menguasai daerah Gunungkidul, mereka terdesak mundur dan keluar dari Kabupaten Gunungkidul melalui desa Manyaran ke Wonogiri. Adapun pemimpin PKI yang tertangkap pasukan bersenjata APS adalah Istiajid.

Suatu goresan hitam dalam sejarah perjalanan pemerintahan RI adalah terjadinya pemberontakan PKI di Madiun, pada tanggal 18 September 1948.²⁰ Pemberontakan PKI Madiun telah banyak membawa korban dan tidak dapat dilupakan oleh setiap orang Indonesia. Sasaran mereka terpusat pada pos-pos penting pemerintahan dan kemiliteran, juga pesantren-pesantren, sehingga dalam waktu relatif singkat laskar merah telah berhasil menguasai beberapa daerah sekitar Madiun.

Sesuai dengan komunisme, PKI ingin menduduki kekuasaan dalam pemerintahan. Jalan yang ditempuh menghalalkan segala cara, yang penting cita-cita tercapai. Apalagi mereka telah kuat dalam segala aspeknya, maka pemerintah yang sah akan mereka gulingkan. Pemerintah yang baru akan menerapkan sistem komunis.

Puncak tindak kekerasan dan kekejaman PKI Madiun terhadap musuh-musuhnya, baik terhadap pemerintah sipil maupun militer Indonesia, mendapat perlawanan keras dari tentara resmi dan masyarakat pada umumnya, termasuk pasukan bersenjata APS.

Pada bulan September 1948 pasukan bersenjata APS mengirimkan satu batalyon untuk menghadapi gerakan PKI Madiun. Batalyon pasukan bersenjata APS dipimpin oleh Bachron Edrees langsung menuju lokasi daerah Grobogan, Purwodadi dan Kudus. Pasukan bersenjata APS bergabung dengan batalyon Kusno Utomo dari tentara resmi.

Pasukan bersenjata APS kembali mengirim satu kompi yang dipimpin oleh M. Zaini menuju daerah Kudus. Di Kudus mereka berhasil menggabungkan diri dengan beberapa kekuatan lainnya. Segera dirundungkan rencana penumpasan orang-orang PKI yang selalu membuat kerusakan dan keonaran.²¹ Sasaran orang-orang PKI di daerah Kudus adalah kantong-kantong umat Islam, terutama pesantren-pesantren, dan juga pos-pos pemerintah dan militer.

Kerjasama antara pasukan APS dengan kekuatan lainnya ternyata dapat menumpas orang-orang PKI di Kudus dan sekitarnya. Keberhasilan ini melegakan segenap masyarakat dan berbagai pihak, sehingga untuk sementara suasana menjadi aman dan terkendali. Kondisi yang demikian memungkinkan berjalannya pemerintah dan kehidupan masyarakat berada dalam keadaan stabil.

Pasukan bersenjata APS Yogyakarta juga mengirimkan anggotanya ke daerah Ponorogo. Pasukan ini dibawah komandan dan Kyai Dalhar dan Kyai Dimyati bergabung dengan tentara resmi di daerah Gorang Gareng.²² Dalam jumlah yang relatif kecil, gabungan pasukan APS dan tentara resmi terdesak dan terpaksa mundur. Melihat kondisi demikian dari pihak pasukan APS menambah satu batalyon yang dipimpin oleh Ir. Sofyan. Namun demikian pasukan APS tetap terdesak, bahkan pasukan yang dipimpin oleh Ir. Sofyan yang berjumlah 25 orang gugur dalam pertempuran tersebut. Sementara pasukan Kyai Djohar Suhaimi

berhasil menyelematkan diri, bergerak ke arah barat sambil membawa mayat-mayat para pejuang yang gugur untuk diserahkan kepada aparat di daerah setempat.

Pada bulan November pasukan bersenjata APS kembali ke Yogyakarta. Pembasmian pemberontakan PKI Madiun belum tuntas, namun diperkirakan dalam waktu dekat akan dapat terselesaikan, paling tidak PKI saat itu sudah terdesak hebat dan tidak dapat melakukan perebutan kekuasaan. Peranan yang cukup menentukan dilakukan oleh pasukan bersenjata APS turut andil dalam penumpasan PKI Madiun, itu direalisasikan dengan pengiriman beberapa anggota pasukan ke dalam berbagai kegiatan penumpasan PKI Madiun.

Kabupaten Bantul bagian timur merupakan daerah pelarian orang-orang PKI Madiun tidak terhindar dari pertempuran dengan pasukan bersenjata APS. Menurut rencana yang disusun PKI bahwa Kabupaten Bantul merupakan wilayah yang akan menjadi sasarannya. Rencana penyerbuan kota Bantul ialah pada 26 September 1948. Namun rencana tersebut telah terbongkar dan para tokoh-tokoh penting PKI segera ditangkap oleh pemerintah.

Pasukan bersenjata APS Cabang Bantul juga sibuk membasmi kawan perampok dan pencuri yang mengganggu masyarakat. Menurut dugaan mereka, orang-orang PKI yang diselundupkan ke wilayah Bantul untuk mengetahui kekuatan pasukan bersenjata membuat kerusuhan dan suasana tidak aman di kalangan masyarakat. Dalam suasana cemas dan takut masyarakat akan dengan mudah dimobilisasi untuk mengikuti gerakan mereka. Usaha terselubung ini berhasil dicium oleh para pemimpin pasukan APS Cabang Bantul, sehingga mereka melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap orang-orang PKI.²³

Tindakan yang diambil oleh pasukan APS mendapat sambutan positif dari masyarakat, yang mayoritas beragama Islam. Doktrin-doktrin komunis yang pada dasarnya anti agama, sangat bertentangan dengan keyakinan masyarakat yang selama itu telah mereka anut dan laksanakan. Kondisi saling mencurigai antara para pengikut PKI dengan anggota APS semakin memanas, yang puncaknya terjadi benturan-benturan fisik di berbagai

tempat. Berkat dukungan masyarakat terhadap pasukan APS maka antek-antek PKI berikut ajarannya berhasil ditumpas.

4.3. Peranan Ulama Dalam Agresi Belanda II

Setelah pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas, Belanda melancarkan serangannya yang kedua dalam usahanya untuk mengambil alih kembali kekuasaannya di Indonesia. Hal ini disebabkan persetujuan Linggarjati dan persetujuan Renville yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan pihak Belanda tidak dapat berjalan baik, bahkan mengakibatkan konflik yang berkepanjangan antara kedua belah pihak. Pihak Belanda selalu mengingkari hasil konsensus dari persetujuan itu dan puncak dari sikap Belanda terjadi pada tanggal 18 Desember 1948 ketika pihak Belanda melalui Dr. Beel menyatakan kepada delegasi Republik Indonesia dan Komisi Tiga Negara (KTN) bahwa Belanda tidak lagi mengakui dan terikat pada persetujuan Renville yang telah ditandatanganinya.

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan serangannya yang ditujukan ke ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta melalui pasukan lintas udara. Dengan serangan ini Belanda berhasil menduduki lapangan udara Maguwo dan selanjutnya bergerak dari tempat itu menuju kota Yogyakarta. Pada akhirnya, Belanda berhasil menguasai kota Yogyakarta dan berhasil menawan Presiden Sukarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, serta pemimpin Indonesia lainnya.

Melihat keadaan seperti itu ulama Yogyakarta termasuk ulama Kristen, Katholik dan Islam tergabung dalam MUAPS segera menyusun kekuatannya kembali untuk mengadakan perang gerilya. Semangat untuk melawan serangan yang dilancarkan pasukan Belanda itu didasarkan pada keyakinan bersama untuk tetap mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Adanya keyakinan bersama untuk tetap mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia yang dilandasi dengan semangat keagamaan itu

menyebabkan ulama di daerah istimewa Yogyakarta mampu menyusun kekuatan kembali.

4.3.1 Peranan Ulama Yogyakarta Pada Masa Agresi Belanda II

Timbulnya gerakan umat Islam Yogyakarta yang tergabung dalam badan perjuangan MUAPS pada masa Agresi Belanda II dimulai dengan adanya peristiwa serangan yang dilancarkan bangsa Belanda di lapangan udara Maguwo. Pada tanggal 19 Desember 1948 pagi hari, pasukan Belanda secara mendadak menyerang lapangan Udara Maguwo melalui pasukan lintas udara. Mereka menduduki lapangan udara Maguwo dengan mengirimkan pasukan lintas udara yang menggunakan pesawat terbangnya. Pada masa itu tidak ada seorang pun yang menghiraukan akan suara deru pesawat terbang itu, bahkan tidak menyangka bahwa suara deru pesawat itu adalah suara dari pesawat musuh. Masyarakat justru menyangka bahwa suara deru pesawat terbang itu adalah pesawat TNI yang sedang mengadakan latihan perang. Pada masa itu memang rakyat terpengaruh oleh pengumuman pucuk pimpinan TNI tentang latihan perang yang akan dilakukan oleh seluruh angkatan perang Indonesia pada hari itu juga, sehingga dengan adanya suara pesawat terbang yang dikira pesawat terbang yang digunakan latihan perang oleh TNI memang ada rasa kebanggaan tersendiri.

Bangga akan kecakapan dari para juru terbang Angkatan Udara Republik Indonesia yang telah mulai menjalankan latihan, direncanakan dan diperintahkan oleh pimpinan Angkatan Perang Republik Indonesia. Akan tetapi, setelah diketahui bahwa pesawat terbang yang datang itu milik pasukan Belanda yang akan melancarkan serangannya terhadap ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta, maka TNI bersama pasukan bersenjata APS bersama-sama berjuang melawan serangan pasukan Belanda guna mempertahankan negara Republik Indonesia.²⁴

Pada tanggal 19 Desember 1948, ketika pasukan Belanda telah menduduki lapangan udara Maguwo, para ulama Yogyakarta yang

tergabung dalam MUAPS berunding di markasnya yaitu di depan Masjid Besar Yogyakarta dan di Jalan Ngabean (tepatnya toko Bata sekarang). Para ulama yang merundingkan situasi dan kondisi pada saat itu dan rencana yang akan dilakukan selanjutnya jika para ulama ikut berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia antara lain: KH. Mahfudz, KH. Badawi, KH. R. Hadjid, M. Sarbini, dan lain-lainnya. Perundingan ini menghasilkan suatu konsensus untuk menyusun kekuatan kembali setelah kekuatan menjadi lemah karena digunakan untuk menghadapi pemberontakan PKI dan sementara menunggu pengumuman dari pemerintah.

Sejak datangnya salah satu perwira muda TNI yang memberi tahu tentang adanya pengumuman pemerintah tentang situasi kota Yogyakarta dan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh seluruh pasukan baik militer maupun yang semi militer, maka imam MUAPS mulai merencanakan tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh pengikutnya. Pengumuman pemerintah dalam usahanya untuk menghadapi Agresi Militer Belanda II dikeluarkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman sebagai pucuk pimpinan TNI. Ia mengeluarkan perintah Kilat No. 1/PB/48, yang isinya memerintahkan kepada semua jajaran Angkatan Perang Republik Indonesia agar menjalankan perang gerilya sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan.²⁵

Di dalam memenuhi perintah kilat yang dikeluarkan Panglima Besar Jenderal Sudirman, seluruh kekuatan bersenjata meninggalkan kota dan mengadakan konsolidasi di sekitar kota Yogyakarta. Adapun MUAPS yang bemarkas di Kauman, memutuskan untuk pindah keluar kota setelah diadakan pembagian tugas di antara para anggotanya yaitu mereka yang harus tetap tinggal di kota dan yang diperbolehkan meninggalkan kota. Anggota badan perjuangan MUAPS yang mendapatkan tugas untuk tetap tinggal di kota antara lain Marto Jumenjo, K. Mahfudz Siradj, KH. Badawi, K. Juroini, dan lain-lain. Adapun pasukan bersenjata APS yang diperbolehkan meninggalkan kota keluar melalui markasnya yang telah dipindahkan dari Kauman ke Notoprajan.

Pindahnya markas badan perjuangan MUAPS ke luar kota Yogyakarta merupakan suatu hal yang telah diperhitungkan oleh imam MUAPS, karena kota Yogyakarta telah mendapat serangan pasukan Belanda. Dengan berpindahnya MUAPS ke luar kota Yogyakarta diharapkan dapat menghindari serangan pasukan Belanda dan dapat memenuhi perintah kilat Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk menjalankan perang gerilya di samping untuk menghindari serangan dari orang-orang Indonesia yang mau diajak kerja sama dengan Belanda.

Pada tanggal 20 Desember 1948 pasukan Belanda melanjutkan aksinya sebagaimana yang terjadi pada hari sebelumnya. Jumlah mereka yang melancarkan serangan di kota Yogyakarta semakin banyak. Mereka melancarkan serangannya dengan menembaki dan menghancurkan beberapa tempat yang menjadi sasarannya. Mereka melancarkan serangannya dan mulai aksinya dengan mengadakan pembersihan di kota di tiap-tiap kampung. Semua orang laki-laki dikumpulkan dan pemudanya ditahan. Tindakan pembersihan mereka bahkan lebih berani lagi yaitu dengan mengadakan pembersihan yang ditujukan di tepi-tepi kota, khususnya di Karangakajen, lokasi markas badan perjuangan MUAPS. Tindakan ini memancing kemarahan rakyat dan pasukan bersenjata APS yang dalam keadaan perang berusaha melarikan diri menghindari serangan yang dilancarkan pasukan Belanda. Dalam waktu yang singkat pasukan bersenjata APS dapat menyusun kekuatan kembali untuk mengadakan serangan balasan pada malam hari dengan mengadakan pertahanan di sekitar kampung Karangakajen. Pertempuran yang dilakukan pada setiap malam hari dalam minggu pertama setelah Belanda menduduki kota Yogyakarta ini mengakibatkan gugurnya lima pasukan bersenjata APS.²⁶

Selain itu pondok pesantren Krapyak juga mempunyai peranan penting ikut membantu perjuangan mempertahankan kemerdekaan terutama pada masa Agresi Militer Belanda II. Pada masa itu Pondok Pesantren Krapyak diasuh oleh KH. Abdullah Affandi dan KH. Abd. Qodir. Pada pendudukan Belanda 1948 ini aktivitas pesantren dihentikan karena suasana tidak aman. Para kyai dan santri “bubar” untuk mengungsi. Mereka khawatir akan

keselamatan jiwanya, karena hampir setiap hari patroli melewati daerah tersebut karena letak pondok pesantren ini relatif dekat dengan pos Belanda yang ada di pojok beteng wetan dan pos Padokan sehingga tidak luput dari daerah operasi militernya.

Pada kyai yang mengungsi pada waktu itu adalah kyai pengasuh pondok tersebut yaitu KH. R. Abdullah Affandi Munawir, KH. R. Abdul Qadir Munawir dan KH. Ali Maksum, sedang sebagian besar santrinya ikut menggabungkan diri ke dalam kelompok-kelompok pejuang seperti Kesatuan Komarudin. Para santri yang menggabungkan diri pada kesatuan Komarudin terdapat putra KH. M. Munawir pendiri pondok pesantren tersebut yaitu Zaim Munawir dan Zainal Abidin Munawir (sekarang keduanya menjadi kyai pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawir).

Dalam pengungsian para kyai dan santrinya itu selalu berpindah-pindah tempat mencari daerah yang merasa cukup aman. Mereka mengungsi ke arah selatan seperti Jejeran, Brajan, Wonokromo, bahkan sampai ke dusun Gorosa. Selama dalam pengungsian para kyai tersebut selalu dimintai nasehat-nasehat, petuah-petuah bahkan doa-doa keselamatan bagi para pejuang dalam rangka berjuang mengusir penjajah Belanda.²⁷

Pada masa Agresi Militer Belanda II itu keberadaan Pondok Pesantren Krapyak tetap utuh bahkan menurut pelaku sejarah yang pada waktu itu menjadi ketua PMI pasukan Komarudin, yaitu Ibu Djuwariah mengatakan bahwa setelah pasukan Komarudin berhasil memukul tentara Belanda dari selatan, pondok pesantren tersebut dipakai sebagai pos PMI sampai kurang lebih 10 hari sangat bermanfaat bagi penduduk setempat terutama berkaitan dengan kegiatan pertolongan korban perang. Bahkan pada waktu itu rumah penduduk di depan pondok tersebut pernah terkena lemparan granat tentara Belanda, akan tetapi keberadaan pondok tersebut tetap utuh.²⁸

Selanjutnya bagaimana peranan ulama Kristen dan Katholik dalam usaha mempertahankan kemerdekaan? Hal ini nampak ketika Yogyakarta diduduki tentara Belanda pada tanggal 19 Desember 1948. Keterlibatan rohaniwan Katholik dan Pendeta Kristen banyak membantu gerilyawan TNI. Seperti terlihat

peranan gereja Pugeran yang pada periode Agresi Militer Belanda II cukup besar bantuannya terhadap para pejuang. Rama Sandiwan Pr. yang pada masa itu sebagai penanggungjawab gereja Katholik Pugeran menuturkan sebagai berikut: "Pada tanggal 22 Desember 1948 yang pada waktu itu jatuh pada hari *Rabu Wage* di jalan Bantul termasuk muka gereja Pugeran dinyatakan tertutup oleh tentara Belanda. Orang-orang kampung Pugeran dan sekitarnya yang tidak pergi mengungsi ditampung Pastoran Pugeran yang waktu itu jumlahnya 200 orang. Oleh Rama Sandiwan Pr. Mereka diberi makan gapek. Rama Sandiwan Pr. sebagai nasionalis nampak ketika pastoran Pugeran diperiksa oleh Belanda, beliau mengatakan "tempat ibadah ini jangan dikotori oleh darah".²⁹ Kemudian tentara Belanda itu pergi dan tidak berani membakar rumah penduduk. Banyak peristiwa yang dialami Rama Sandiwan Pr. terutama sejak Yogyakarta diduduki Belanda sampai pembersihan terakhir 30 Mei 1949. Rama Sandiwan Pr. bersama-sama dengan PMI masuk kampung-kampung Daengan, Suryawijayan, Notoprajan dan Serangan, miengubur 15 mayat pejuang RI dan mengangkut 3 orang luka parah untuk dibawa ke rumah sakit. Salah satu dari korban yang masih hidup sampai sekarang adalah Mangunswito putus kedua tangannya yang terkenal dengan julukan *Mangun Buntung*.

Begitu juga gereja Katholik di Kidul Loji dan Bintaran. Kedua gereja itu bahu membahu secara tidak langsung membantu penduduk untuk pengungsian dan memberikan pertolongan para pejuang yang terkena tembakan tentara Belanda di sekitar Pakualaman maupun Jalan Senopati dan daerah Gondomanan. Selain itu, kedua gereja juga ikut membantu menyediakan bahan makanan di bawah koordinasi Ibu Ruswo.

Selanjutnya, keterlibatan umat Kristen beserta gereja Kristen Jawa pada waktu itu juga nampak, terutama gereja Kristen Jawa Sawo Kembar Gondokusuman. Pada masa Agresi Militer II itu peran aktif mereka nampak terutama organisasi pelajarnya yang bernama PEL KRIMA (Pelajar Kristen Mataram), peranannya besar sekali dan aktif ikut dalam pertempuran, sedangkan pendetanya memberikan siraman rohani di gereja. Pada waktu itu pendetanya bernama Darmoatmodjo, dalam khotbahnya selalu

menekankan “tidak perlu kuatir terhadap segala sesuatu yang terjadi, serahkan pada Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang kau inginkan asal disertai doa dan keyakinan”.³⁰ Suatu keberanian yang luar biasa dalam suasana tidak aman dan pertempuran di kota setiap hari selalu ada korban, gereja tetap mengadakan aktivitas rohani, bahkan sering memberikan pertolongan para korban perang. Untungnya tentara Belanda tidak mengusik gereja. Pada waktu “Jogya Kembali”, umat Kristen beserta pendetanya di daerah Gondokusuman ikut menyambut barisan republik yang datang dari timur, tepatnya mereka berjajar di Jalan Purbonegaran (sekarang Jalan Urip Sumoharjo).

Peran umat Katholik ini juga nampak di daerah Kotabaru terutama pada masa Agresi Militer Belanda II, pemuda Katholik yang tergabung dalam AMKRI (Angkatan Muda Katholik Republik Indonesia) bersama organisasi sejenis dan lain golongan ikut berjuang menegakkan kemerdekaan. Bahkan Wanita Katholik yang diketuai B. Kwari Sosrosumarto ikut aktif berjuang dalam menolong korban perang serta menyediakan dapur umum.

Seorang tetua Katholik ada yang menceritakan bahwa meskipun keadaan sulit pada masa revolusi gereja masih juga bisa membantu umatnya bukan hanya dengan doa-doa tetapi kadang-kadang juga bahan makanan seperti ikan kering, gula dan pakaian. Pada waktu itu Paroki Kotabaru diketuai oleh Rama A. Djajaseputra S.J. yang juga berdarah bangsawan pandai mencari bantuan. Kisah selanjutnya, pada masa Agresi Militer Belanda II ini gereja Kotabaru digelari sebagai pengayom, bukan saja bagi orang Katholik, tetapi juga non Katholik.³¹

Pada masa Agresi Militer Belanda II ini, peran gereja Kristen Jawa terutama Gereja Kristen Jawa Sawo Kembar Gondokusuman serta jemaatnya juga ikut aktif membantu pejuang mempertahankan kemerdekaan. Bahkan pada waktu itu organisasi pelajar yang menamakan diri PELKRIMA (Pelajar Kristen Mataram) perannya besar sekali, dan aktif ikut dalam pertempuran, sedangkan Pendeta melakukan tugas khotbah di gereja. Dalam khotbahnya yang waktu itu diisi pendeta Darmaatmodjo.

4.3.2 Keterlibatan Ulama Bantul Periode Perang Kemerdekaan

Negara Indonesia yang secara resmi telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ternyata belum mendapat pengakuan kedaulatan dari kaum kolonialis. Pemerintah Belanda masih berkeinginan untuk kembali menduduki wilayah Indonesia, yang terkenal subur dan kaya akan hasil buminya.

Sejak proklamasi 1945 sampai akhir tahun 1949, Indonesia dalam keadaan yang belum stabil, banyak terjadi benturan-benturan fisik antara para pejuang dengan Belanda. Bangsa Indonesia berusaha menegakkan dan mempertahankan kemerdekaannya dengan dilandasi semangat keagamaan dan kenegaraan. Kerja keras itu akhirnya membuahkan hasil yang memuaskan, yaitu dengan terciptanya suatu negara yang merdeka dan terbebas dari rezim kolonialis.

Terdengarnya suara proklamasi kemerdekaan itu berarti berakhir sudah pendudukan kolonial dan bukan hanya di daerah Bantul saja melainkan juga daerah-daerah lainnya. Setelah proklamasi itu, serangan-serangan kaum penjajah kian gencar terhadap Indonesia. Sasaran Belanda diarahkan ke pusat pemerintahan, yang pada waktu itu dipindahkan ke Yogyakarta.

Situasi dan kondisi Yogyakarta menjadi kacau, banyak ketegangan di berbagai tempat. Bantul yang merupakan bagian wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak lepas dari incaran Belanda. Kondisi demikian berlarut-larut sampai mengakibatkan kehidupan masyarakat tidak tenang dan selalu dicekam kecemasan. Tindakan keras Belanda tersebut merupakan agresi militer terhadap wilayah yang sudah merdeka.

Untuk menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan tersebut, masyarakat Bantul melalui berbagai bentuk perjuangan mengadakan perlawanan. Organisasi-organisasi kelaskaran, baik resmi dari pemerintah maupun suka rela, bermunculan untuk partisipasi dalam perjuangan. Kekuatan-kekuatan tersebut terhimpun dalam berbagai kesatuan, yang mengatasnamakan bangsa Indonesia untuk mengusir kembali Belanda dari wilayahnya. Kenyataan ini menjadikan pasukan Belanda kacau dan

mengalami kendala untuk dapat kembali menguasai wilayah jajahannya.³²

Seluruh rakyat berjuang bahu membahu untuk mempertahankan kemerdekaan, mereka terjun disegala tempat, baik di medan pertempuran maupun di garis belakang. Semangat perjuangan yang menyala memberikan kekuatan untuk menyanggupi segala penyerbuan dan ujian yang berat. Semua beban mereka pikul bersama-sama dengan tulus dan ikhlas. Ini semua karena panggilan yang suci dari hati sendiri.

Kesatuan-kesatuan Angkatan Perang Republik Indonesia yang ada saat itu antara lain Barisan Berani Mati, Hantu Maut, Barisan Pemberontak Republik Indonesia, Laskar Buruh Indonesia.³³ Kesemuanya berjuang saling membantu untuk negara dan bangsa, belum terpecah atas kepentingan kelompok, kekompakan yang terbina dan terpelihara itu ternyata menjadi kekuatan yang tangguh untuk menghadapi Belanda. Pihak Belanda merasa kewalahan berhadapan dengan tentara yang dibantu seluruh rakyat, meskipun tetap berusaha membuat berbagai siasat perang dan politik.³⁴

Organisasi politik yang pernah satu markas dengan APS adalah Barisan Pemberontak RI dan Laskar Buruh Indonesia. Ketiganya menempati lokasi di pabrik gula Gesikan, yang merupakan kemurahan hati pimpinan pabrik. Pimpinan pabrik tersebut adalah asli pribumi dan mendukung perjuangan rakyat melawan Belanda. Kesempatan berkumpul antara berbagai kelaskaran itu ternyata memudahkan untuk saling koordinasi dan membagi wilayah perjuangan. Mereka tidak saling berebut tempat karena ada kesesuaian aspirasi dan landasan yang mendasari berdirinya kelaskaran masing-masing.³⁵

Organisasi-organisasi perjuangan yang lain seperti Barisan Banteng bersifat nasional merupakan cabang dari Solo pimpinan Dr. Muwardi. Terdapat pula Tentara Republik Indonesia Pelajar, yang merupakan perkumpulan para pelajar untuk turut andil dalam perjuangan. Mereka terhimpun bersama kekuatan angkatan perang resmi dan kelaskaran yang saling mengisi berbagai bentuk dan corak perjuangan.

Motif dan aspirasi yang bersifat keagamaan tersalur melalui bentuk perjuangan yang didirikan oleh organisasi-organisasi agama, seperti Hisbullah. Hisbullah dibentuk atas dasar agama oleh Muhammadiyah, untuk diperbantukan kepada pemerintah melawan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Kelaskaran ini dilatih di Cibarusa Bogor, yang selanjutnya akan diterjunkan dalam berbagai pertempuran. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk membekali dan memperkuat diri supaya dapat lepas dari penjajahan. Mereka dengan srius mengikuti latihan tanpa menghiraukan asal usul pelatih. Berkat landasan agama yang kuat maka para pejuang tersebut setelah kembali ke kesatuan masing-masing, menjadi orang-orang pilihan dan disertai tanggung jawab memimpin.

Kesadaran dan kepedulian dari berbagai bentuk perjuangan melawan Belanda merupakan modal utama bagi berhasilnya bangsa Indonesia mempertahankan dan mengisi kemerdekaannya. Dalam perjuangan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan tanpa membedakan ras dituntut adanya kebersamaan jiwa disertai rasa toleransi yang tinggi. Hal ini dibuktikan oleh rakyat Bantul dalam usaha turut mempertahankan kemerdekaan, yang disalurkan ke dalam berbagai bentuk perjuangan, baik di garis belakang maupun di medan perang.

Munculnya gagasan diadakannya APS merupakan penyatuan pendapat dan ijtihad para ulama. Mereka mengadakan latihan dan penggemblengan terhadap para komandan APS di daerah-daerah, yang diharapkan dapat melanjutkan dan mengemban tugas berat para ulama.

Para ulama yang menjadi penasehat dan pembina APS itu tergabung dalam satu wadah MUAPS. Wadah ini memegang peranan penting dalam menggerakkan kekuatan di segala bidang. Setiap orang yang terlibat di garis depan maupun belakang yang menyiapkan segala keperluan perjuangan harus sama-sama digerakkan. Mereka yang bertugas menyiapkan sarana dan dana memperoleh penggemblengan dari para ulama. Khotbah-khotbah

para ulama Islam bermaterikan semangat jihad fi sabilillah dan semangat kemerdekaan ternyata mampu menambah keberanian rakyat melawan Belanda.³⁶

Belanda kembali menyerang Ibu Kota Indonesia, yang pada saat itu berkedudukan di Yogyakarta. Situasi dalam negeri yang masih mencekam dan kacau dimanfaatkan oleh Belanda untuk melancarkan agresi militer. Keadaan bertambah menegangkan manakala para pemimpin negara ditawan oleh pihak Belanda. Hal ini menuntut para pemimpin kesatuan yang ada untuk cepat mengambil keputusan, yang bertujuan untuk menghadang dan menghalau pasukan Belanda.

Dalam keadaan yang mendesak, para pemimpin pejuang bersenjata APS memberi komando untuk meninggalkan kota. Tujuan yang direncanakan adalah ke arah selatan, tepatnya di Karangjajen. Setelah satu minggu markas APS di kota diketahui oleh Belanda dan Belanda mengadakan serangan secara besar-besaran. Pasukan APS bergerak ke selatan untuk menghindari kejaran Belanda, menuju Salakan dan melewati Semail. Atas inisiatif MUAPS Cabang Bantul maka pindahlah seluruh staf pimpinan MUAPS dan APS ke sebelah barat kota Bantul.³⁷

Bantul yang jaraknya kurang lebih 10 km dari kota Yogyakarta sangatlah mudah untuk dijangkau oleh Belanda. Oleh karena itu Bantul tidak lepas dari sasaran pendudukan Belanda, maka pusat perjuangan APS bergerak ke arah barat dan menempati daerah Gesikan. Di Gesikan APS menempati salah satu lokasi dalam pabrik gula, yang pemimpin pabriknya orang pribumi asli. Untuk beberapa saat APS bermarkas di Gesikan, yang kemudian juga diketahui Belanda dan mendapat serangan yang hebat dari Belanda. Pusat perjuangan APS mundur ke markas barat daya menuju Tegal Layang, dan menempati rumah-rumah penduduk dengan pusatnya di masjid.

Pada waktu APS di Tegal Layang inilah nampak kesulitannya, karena Belanda tidak berhasil menjangkau tempat ini. Usaha

Belanda untuk sampai ke pusat APS selalu dapat digagalkan oleh para pejuang APS yang bekerja sama dengan seluruh rakyat dan sebagian tentara resmi pemerintah.

LAskar Perang Sabil di daerah selatan sebagai pasukan perjuangan memiliki landasan kuat sebagaimana diajarkan agama bahwa hukumnya wajib membela tanah air. Kewajiban ini dilakukan dengan semangat jihad fi sabilillah (berjuang di jalan Allah) dan Hubbul Watan Minal Iman (cinta tanah air adalah sebagian dari iman).³⁸ Askar Perang Sabil berusaha menambah pengetahuan bidang keilmuan guna membantu Angkatan Peran RI, dalam melawan musuh.

Gerakan APS terhadap Belanda di Bantul juga karena perasaan nasionalisme. Hal ini dapat mendorong untuk mengadakan langkah-langkah menuju kepada hidup yang lebih baik. Kemerdekaan yang telah dicapai harus dipertahankan dan dijadikan titik tolak perubahan agar Indonesia benar-benar terlepas dari belenggu penjajah.

Semangat dan jiwa nasionalisme para pejuang APS yang dipadukan dengan kekuatan perjuangan lainnya tanpa kompromi menghadapi kehadiran Belanda. Semangat ini dijadikan modal dasar yang penting dalam perjuangan membela bangsa dan negara Republik Indonesia.

Landasan perjuangan APS adalah firman Allah SWT. Dalam surat An-Nisa' ayat 75 ditegaskan sebagai berikut:

“Mengapa kamu tidak hendak berperang di jalan Allah untuk membela kawan-kawanmu yang lemah, pria, wanita, atau anak-anak, padahal mereka telah sama-sama berdoa: “Wahai Tuhan kami! Keluarkanlah kami dari negeri Mekkah yang zalim penduduknya ini. Berilah kami dari sisi-Mu seorang pelindung dan beri pulalah kami dari sisi-Mu seorang penolong.”³⁹

Belajar dari ayat di atas dapat dipahami bahwa umat Islam diperintahkan untuk berjuang melawan penjajah. Tegaknya kebenaran dan keadilan yang sesuai dengan ideologi Islam

merupakan pedoman dalam segala aspek kehidupan. Islam dijadikan sumber tindakan dan sikap, baik dalam tingkat suprastruktur politik maupun tingkat infrastruktur politik. Untuk terlaksananya ideologi Islam dalam suprastruktur perlu adanya undang-undang dan peraturan yang sesuai dengan Islam. Hal ini dapat diwujudkan apabila bangsa Indonesia bebas dari penjajahan Belanda.⁴⁰

Ideologi jihad fi sabilillah ditanamkan di kalangan masyarakat oleh para ulama sebagai semangat untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik. Pemahaman terhadap dasar-dasar keislaman memberi landasan yang cukup kuat dan merupakan dukungan moral yang tinggi. Dalam benak mereka telah tertanam pikiran arah dan tujuan perjuangan guna merealisasikan hari depan yang lebih cerah.

Untuk lebih menanamkan keimanan di kalangan masyarakat digunakan simbol, antara lain kalimat la ilaha illa Allaah Muhammad Rasulullah artinya “tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah”. Kalimat itu dituliskan pada bendera Askar Perang Sabil. Pada kiri dada atas ada tulisan Syahadat dan ada pula yang menggunakan insinye (emblem). Warna bendera yang dipakai bermacam-macam, ada tulisan kalimat tauhid dan gambar bintang sabit berwarna kuning dengan warna dasar hijau. Ada pula yang warna dasar merah dengan tulisan kalimat tauhid serta gambar bintang sabit berwarna putih.⁴¹

Ada juga yang mengenakan ikat kepala anggota APS, yang bertuliskan kalimat la ilaha illa Allah. Dengan mengenakan ikat kepala ini semangat mereka membara, mereka tidak takut mati menghadapi musuh di front-front pertempuran. Jiwa mereka bertambah kuat dan yakin telah memperoleh pertolongan langsung dari Allah SWT.

Keyakinan keimanan dan keislaman yang mendalam mendorong penggerakkan yang revolusioner dalam perjuangan.

Dengan demikian kesadaran berbangsa dan bernegara serta bertanah air yang semakin berkembang dan didukung oleh keyakinan ideologi Islam yang kuat merupakan dasar penggerak yang memiliki kekuatan besar. Ideologi Islam dan semangat nasionalisme saling memperkuat dalam mencapai tujuan akhir, yaitu kemerdekaan lahir dan batin secara penuh, tidak di bawah belenggu penjajah Belanda. Landasan perjuangan APS, yang sedemikian itu dapat menghadang dan menghalau segala mara bahaya yang mengancam kedaulatan dan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam suasana ketegangan dan kecemasan bagi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia diperlakukan hadirnya para pemimpin yang benar-benar memiliki sikap mental yang kuat, berani, tangguh dan sanggup menentang segala kezaliman. Pemimpin yang menjadi anutan dan dapat menggerakkan hati untuk sanggup berjuang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Konsep perumusan terhadap permasalahan dan langkah-langkah yang harus diambil hanya dapat dipancarkan dari pemimpin yang berwawasan dan berdedikasi tinggi.

Pemimpin yang kharismatik dapat dilihat dari pengabdian diri dalam berbagai hal yang bersifat suci, kepahlawanan dan keteladanan. Sikap dan sifat tersebut senantiasa dimiliki oleh para ulama, sehingga memudahkan mobilisasi masyarakat.

Mobilisasi kekuatan terhadap anggota APS itu semula bertempat di pondok pesantren, di masjid-masjid dan di sekolahan yang dilakukan oleh para ulama setempat. Di kabupaten Bantul mobilisasi APS dilakukan di beberapa tempat, seperti di langgar Al Huda milik KH. Mathori Al Huda, masjid Jami' di kecamatan Bantul, masjid Badegan Bantul, Pesantren Krapyak Sewon, Pesantren Ngrukem dan Pesantren Gesikan Pandak.⁴²

APS cabang Bantul dipimpin oleh imam besar KH. Mathori Al Huda dengan komandan APS Sunardjo, yang didukung oleh beberapa tokoh ulama dan masyarakat. Para penggerak APS tersebut tergabung dalam satu kesatuan setingkat pleton, juga

ada yang bertugas sebagai perantara dan mengkoordinasikan penyiapan dapur umum. Mereka saling mengisi peluang untuk turut berpartisipasi dalam perjuangan.

Sunardjo selaku komandan APS batalyon di Kabupaten Bantul membawahi 9 kecamatan (kapenwon), yaitu Bantul, Pajang, Sedayu, Srandakan, Sanden, Bambanglipuro, Pandak dan Pundong.⁴³ Masing-masing kecamatan diangkat satu orang kepala seksi, yang bertanggung jawab atas kesiapan dan pemberangkatan satu pasukan APS. Tugas ini dibebankan oleh pimpinan pusat kepada para kepala seksi, dimaksudkan untuk lebih memudahkan memobilisasi masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah. Dengan begitu mereka dapat dengan cepat menerima tugas dan segera melaksanakannya, karena perintah untuk maju di medan perang senantiasa diharapkan oleh para pejuang APS.

Untuk mengkoordinasikan kegiatan APS komandan batalyon yang membentuk dan mengangkat komandan pleton di setiap kecamatan. Di antara komandan pleton yang disertai kepercayaan mengurus APS itu adalah: Warso Warsito di kecamatan Bantul, Damanhuri di kecamatan Pajang, Suratbiyanto di kecamatan Pandak, Sugito di kecamatan Srandakan, Zaini di kecamatan Sanden, Idris di kecamatan Pundong, Gino di kecamatan Bambanglipuro, dan Khamin di kecamatan Kretek.

Untuk wilayah timur markas APS dipusatkan di sekitar Gondolawung dan Pleret. Beberapa tempat dijadikan sentral perjuangan untuk menghadang dan mengusir Belanda. Mereka berdatangan dan berkumpul untuk menerima tugas di sebelah selatan kota, seperti Sie Soeradial, Sie Widodo, Sie Sudarmo dan Sie Komarudin. Pos-pos pasukan berpindah-pindah meskipun hanya terdapat di satu kecamatan. Hal ini dikarenakan untuk menghindari serangan Belanda dan untuk lebih meyakinkan strategi penyerangan kembali kepada pihak Belanda. Tempat-tempat yang pernah dijadikan markas para pejuang itu seperti rumah Sastrodiwiryo kepala dukuh Jati, Dullah Sattari Brajan, Dullah Kapi Jejeran, dan H. Maksun di Jejeran. Keterlibatan

seluruh lapisan masyarakat di beberapa tempat tersebut tidak lepas dari usaha ulama setempat, yang dengan lantang menyuarakan semangat perjuangan melawan penjajah.

Di antara para ulama yang bekerja keras dan ulet adalah Kyai Maksum dan Kyai Suhdi Syakuri. Mereka mampu membangkitkan semangat juang para laskar APS dan segenap masyarakat, sehingga berbagai perlawanan terhadap Belanda, mereka tidak gentar menghadapi tentara Belanda yang memiliki perlengkapan senjata. Hasilnya cukup memuaskan dengan mundurnya tentara Belanda di beberapa tempat pertempuran.

Semangat perjuangan, api kemerdekaan dan patriotisme rakyat benar-benar terlihat dalam pertempuran di Jati dan Brajan. Hal ini salah satu bukti keikutsertaan seluruh rakyat yang dimobilisasi para ulama dalam usahanya mempertahankan kemerdekaan.

Beberapa orang yang dipercaya duduk di pucuk pimpinan APS cabang Bantul selain KH. Mathori Al Huda dan Sunardjo, antara lain adalah Sastro Nardoyo, Pawironitro, Mahmud TL., Isman Zahrowi, R. Sukardi, dan M. Mujahid. Mereka termasuk tokoh ulama yang mampu memobilisasi dan menggerakkan masyarakat. Hal ini tercermin dalam segala aspek terjangnya yang senantiasa mengajak dan memberi teladan untuk berjuang di jalan Allah, dengan berkorban jiwa, raga dan harta untuk keberhasilan perjuangan.

Para tokoh ulama dan masyarakat turut aktif berjuang melalui berbagai cara dan strategi, ada yang sebagai penyeru dan pemberi semangat, ada yang menjadi penyandang dana, ada yang menjadi penggerak barisan belakang termasuk penyediaan makan para pejuang APS dan ada yang menjadi kurir untuk menyampaikan perintah atau pesan dari pimpinan ke basis-basis pertahanan laskar APS. Masing-masing melaksanakan tanggung jawab yang diembannya dengan penuh keikhlasan dan saling membantu satu sama lainnya. Kerja sama yang harmonis senantiasa dibina dan dipelihara untuk tetap berkesinambungan, sehingga memudahkan tercapainya cita-cita perjuangan.

Situasi dan kondisi dalam negeri RI masih mencekam dengan adanya pemberontakan PKI Madiun, dimanfaatkan oleh Belanda untuk melakukan agresinya yang kedua. Hal ini terbukti dengan penyerangan Yogyakarta oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948. Serangan ini dilakukan melalui lintas udara dengan menyerbu dan menjatuhkan bom-bom di pelabuhan udara Maguwo, yang selanjutnya bergerak ke arah kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta berhasil dikuasai oleh Belanda, beberapa kekuatan pasukan bersenjata memindahkan markasnya ke luar kota. Hal ini dimaksudkan supaya tidak mudah diserang kembali pasukan Belanda. Belanda melakukan pengejaran terhadap pasukan yang menjadi sasaran serangannya.⁴⁴

MUAPS juga memperhitungkan apabila markas di Karangjaten telah diketahui Belanda, maka untuk menghindari serbuan terpaksa mengambil tempat yang lebih aman, yaitu di Kabupaten Bantul. Bantul yang berjarak lebih kurang 10 km dari kota Yogyakarta mudah dijangkau oleh pasukan Belanda. Perjalanan pasukan bersenjata APS menuju kota Bantul melalui Salakan menuju Semail, dilanjutkan ke barat ke kota Bantul.⁴⁵

Pada tanggal 28 Desember 1948 Belanda mengerahkan pasukannya menyerang MUAPS. Setelah berhasil menduduki kota Bantul, Belanda mendirikan pos-pos di desa Barongan, Pleret, Piyungan dan Padokan. Pos-pos ini didirikan dimaksudkan untuk mempersempit ruang gerak pasukan bersenjata APS di berbagai pelosok wilayah Kabupaten Bantul.

Semula para pemimpin APS tinggal di desa Serut tetapi karena di serang Belanda maka pengunduran para tokoh MUAPS dan para pejuang APS di pusatkan di daerah Tegal Layang. Para pejuang secara berpencar-pencar meninggalkan kota Bantul yang telah diduduki Belanda.

Perlawanan rakyat terhadap Belanda terjadi di berbagai wilayah di kabupaten Bantul. Mayoritas mereka tergabung dalam kesatuan-kesatuan perjuangan, baik tentara resmi maupun

kelaskaran. Pasukan bersenjata APS tersebar di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Bantul, masing-masing kecamatan dipimpin oleh seorang kepala seksi. Tugas dan tanggung jawab kepala seksi adalah menyiapkan anggota yang siap diberangkatkan ke front pertempuran.

Kesiapsiagaan para anggota pasukan APS untuk maju ke medan perang menjadi beban para pemimpin seksi. Mereka mengadakan pelatihan seperlunya dengan peralatan sederhana dan terbatas, namun semangat untuk berjuang tetap menyala. Sebagian besar memakai latihan yang pernah diperoleh ketika menjadi Hisbullah dan Sabilillah yang dilatih langsung oleh para tentara Jepang. Pemanfaatan potensi yang besar dari masyarakat dengan modal semangat berjuang yang tinggi meski hanya didukung oleh peralatan terbatas, mampu melahirkan pejuang-pejuang yang tangguh dan pantang mundur.

Kesepakatan untuk terjun langsung di front pertempuran menjadi idaman bagi setiap pejuang. Mereka telah memiliki keyakinan dan kemampuan yang mantap untuk berperang melawan Belanda. Semua ini tidak terlepas dari usaha para pemimpin masing-masing daerah dalam memotivasi dan memberi tambahan bekal, baik fisik maupun mental.

Pada waktu pasukan bersenjata APS bermarkas di Gesikan, yang menempati salah satu lokasi di pabrik gula, mendapat bantuan bahan pakaian dari blaco dan gula pasir.⁴⁶ Bersama pasukan APS terdapat juga BPRI (Barisan Pemberontak Republik Indonesia) dan LBI (Laskar Buruh Indonesia) yang bermarkas dalam kompel pabrik gula. Mereka secara bergantian melakukan latihan-latihan yang dipimpin oleh komandan masing-masing. Bantuan makanan dari pabrik yang berupa beras, gula dan garam dapat meringankan beban, bahkan dapat memenuhi kebutuhan pasukan APS sehari-hari. Adapun lauk-pauk dikumpulkan dari tiap kecamatan berupa kelapa, yang dapat dipergunakan untuk makan sehari-hari, bahkan dapat dikirim ke front pertempuran.

Usaha lain yang dilakukan pasukan APS untuk memenuhi perbekalannya yaitu pembuatan minum di Srandakan. Pekerjaan ini dilakukan dengan mesin giling seorang Tionghoa yang bernama Tjo ling. Hasil pembuatan minum ini mampu menambah kebutuhan pasukan bersenjata.⁴⁷

Pendanaan yang lain berasal dari bantuan masyarakat baik berupa uang, pakaian maupun apa saja. Kesemuanya dikumpulkan atas kerelaan dan ketulusan masyarakat muslim dalam turut membantu perjuangan. Kebutuhan perjuangan yang besar mampu dicukupi oleh masyarakat berkat ajakan dan himbauan para ulama untuk ikut berjihad di jalan Allah melalui berbagai bentuk partisipasi disesuaikan kemampuan masing-masing.

Pada waktu Belanda melancarkan serangan ke arah pabrik gula Gesikan, route yang dilalui melewati perbukitan di daerah Guwosari. Tentara Belanda merampas dan mengambil barang-barang penduduk yang berhasil dikuasainya. Untuk melawan dan menghadang laju serangan Belanda, pasukan APS dikerahkan dan menempati daerah sekitar Pajangan. Pertempuran tidak bisa dihindari, karena perlengkapan Belanda lebih memadai maka pasukan APS melakukan perlawanan secara gerilya.

Daerah-daerah yang terlewati tentara Belanda mulai dikosongkan untuk menghindari kekejaman. Meskipun demikian masyarakat memberikan perlawanan yang sengit, sehingga membuat kewalahan tentara Belanda. Masyarakat menyediakan segala keperluan makan para pejuang, dan rumah-rumah mereka dijadikan tempat persembunyiannya. Berkat semangat juang pasukan APS dengan didukung sepenuhnya oleh masyarakat maka tentara Belanda dapat ditahan, bahkan Belanda menarik pasukannya ke arah utara.⁴⁸

Untuk kedua kalinya Belanda melakukan penyerangan ke Gesikan, dan ternyata Belanda berhasil mendesak pasukan APS. Melihat situasi yang semakin kritis, para pemimpin pasukan APS memerintahkan anggotanya untuk mundur. Pasukan APS

menyelamatkan diri ke arah barat, tepatnya di Tegal Layang Pandak. Asrama Tegal Layang dijadikan pusat MUAPS dan pasukan APS, baik dalam rencana penyerangan maupun penyiapan segala keperluan pasukan APS.

Pada tanggal 8 Januari 1949 pasukan bersenjata APS bersama TNI sub Wehrkreise (SWK) 103 B melakukan serangan ke Yogyakarta untuk merebut wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda. Pasukan APS dipimpin langsung oleh Imam Besar KH. Mahfud Siradj dan sebagai komandan APS adalah Sarbini. Serangan ini berhasil dengan gemilang karena mampu merebut kembali beberapa daerah yang diduduki Belanda.⁴⁹

Pasukan APS yang akan dikirim menyerang kota Yogyakarta terlebih dahulu dikumpulkan untuk mendapat perintah dan pembagian tugas. Masing-masing anggota regu tetap dibawah komandan dan setelah melakukan penyerangan supaya kembali ke pangkalan. Sementara itu disisakan dua regu yang terus melakukan gerilya ke dalam kota, yang dipimpin oleh Moh. Abdul Maburr dengan markas di Sonosewu. Usaha yang dijalankan mampu membuat Belanda cemas dan kacau, bahkan Belanda merasa gentar terhadap semangat perjuangan para anggota APS.

Untuk menemukan markas pasukan APS Belanda memperlak mata-mata untuk menyusup ke daerah pribumi. Usaha ini membuahkan hasil dengan diketemukannya markas pasukan APS, maka pada tanggal 14 Januari 1949 Belanda menyerang secara besar-besaran terhadap markas APS di Sonosewu. Pertempuran yang tidak seimbang memakan korban yang banyak dan para pejuang bergerak mundur ke arah barat menuju pusat MUAPS. Dalam pertempuran Sonosewu, ada syair yang ditulis oleh pejuang cukup menarik yang berbunyi:

Wahai korban Sonosewu!
Kawan bertahan, Lawan menyerbu,
Lama bertahan, serangan seru,
Akhirnya kawan habis peluru
Peluru habis, akal bekerja,

Keberanian tambah maju kembali,
Sangkur bekerja, juga memangsa,
Tinjau berayun, lawanpun kena.

Perang campuh dan perang tanding,
Lawan jatuh, berganti musuh,
Lawan baru juga terguling
Penggantinya siap untuk ditempuh.

Karena lawan berlipat ganda,
Akhirnya kawan kalahtenaga,
Rebahlah raga yang penuh luka,
Demi satu jadi "SYUHADA"

12 jiwa melayang pergi
12 raga rebah ke bumi
Jadi Syuhada pembela Negara,
Satria penjaga ibu Pertiwi.⁵⁰

Demikianlah sekedar lukisan yang berupa untaian kata-kata betapa hebat dan dasyatnya pertempuran yang dihadapi oleh para pejuang kemerdekaan.

Perjuangan dan perlawanan pasukan APS terus berlanjut di berbagai daerah di Kabupaten Bantul. Semangat jihad fi sabilillah dan rasa nasionalisme tetap makin membara di sanubari seluruh lapisan masyarakat. Keikutsertaan dan keterlibatan dalam berbagai lapangan perjuangan mencerminkan ketulusan dan kerelaan para pejuang yang didukung sepenuhnya oleh seluruh rakyat. Kenyataan ini dapat dibuktikan dalam sepak terjang dan perjuangan masyarakat Bantul dalam melawan penjajahan Belanda.

Pada saat Bantul ditinggalkan Belanda, suasana tampak lengang dan sepi dari penjagaan. Melihat hal ini para pemimpin MUAPS segera bertindak untuk membantu mengatur pemerintahan dan menjaga keamanan. Dalam jangka satu minggu pengaturan pemerintahan dan penjagaan keamanan diserahkan tanggung jawabnya kepada yang berwenang. Meskipun demikian MUAPS masih diminta melanjutkan bantuannya untuk meringankan dan memudahkan tanggung jawab pemerintah dan keamanan di kota Bantul.

Selanjutnya mengenai keterlibatan ulama Katholik dan Kristen di daerah Bantul umumnya ikut membantu para pejuang di bidang logistik. Hal ini nampak ketika FX. Sardjono sebagai komandan SWK 102 menyerbu desa Barongan, Pleret, Piyungan dan padokan, para ulama Katholik dan Kristen melalui pos-pos perlawanan menyediakan obat-obatan dan lauk-pauk untuk bekal para pejuang.

4.3.3 Keterlibatan Ulama di Sleman Pada Masa Perang Kemerdekaan

Sebagaimana di beberapa daerah lainnya, di Kabupaten Sleman banyak menyimpan potensi dalam memberi sumbangan terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pasukan bersenjata APS dari Kabupaten Sleman banyak dikirim sebagai pasukan sukarela ke front pada masa Agresi Militer Belanda I tahun 1947, Agresi Militer Belanda II tahun 1948, membantu TNI ke daerah Madiun memberantas pemberontakan PKI sampai kembalinya Yogyakarta ke pangkuan Republik. Pertempuran melawan Belanda di pedesaan Kabupaten Sleman didukung secara penuh oleh ulama Islam dan secara tidak langsung didukung oleh ulama Katholik. Waktu itu Belanda yang menduduki di Kabupaten Sleman telah membentuk pertahanannya secara pos demi pos. Bekas gudang-gudang pabrik yang masih utuh seperti Medari, Beran, Cebongan, Tanjungtirto, serta lapangan terbang Maguwo dan Kaliurang dijadikan benteng kedudukan mereka. Partisipasi masyarakat di wilayah Moyudan dan sekitarnya sangat besar terhadap perjuangan pasukan APS, karena secara bergiliran mereka bertugas di dapur umum yang dipusatkan di wilayah Moyudan dan dari tiap rumah masing-masing mengirimkan bungkusan nasi lengkap dengan lauk-pauk.

Pasukan bersenjata ini, setelah memperoleh pembinaan dari para ulama, kyai dan komandan keberaniannya bertambah mantap. Untuk itu mereka tidak mengenal lelah terus bergerak menurut komando yang diperintahkannya. Sedang tentara Belanda membentuk pertahanannya secara stelsel dan berpos-

pos. Bekas-bekas gedung pabrik yang masih utuh seperti Medari, Beran, Cebongan, dan Tanjungtirto, serta lapangan udara Maguwo dan Kaliurang dijadikan benteng tempat kedudukan mereka. Benteng yang dijadikan sebagai markas pasukan Belanda itu dijaga antara satu sampai dua kompi personel Belanda. Selain itu, pasukan Belanda juga mengadakan konvoi secara teratur dan menjaga jembatan penghubung dengan kekuatan antara satu sampai dua regu pasukan Belanda, bahkan jembatan di Bandar dan di Bogem yang merupakan jembatan besar dan kuat dijaga sampai satu seksi pasukan Belanda. Pasukan lainnya yang tidak tinggal di gedung pabrik dan tidak bertugas menjaga jembatan berada di kota Yogyakarta menjaga pos-pos yang telah didirikannya.⁵¹

Di daerah Sleman kekuatan pasukan bersenjata APS terkoordinasikan mengikuti pasukan TNI. Kekuatan pasukan TNI terkoordinasikan melalui Komando Distrik Militer (KDM) Sleman yang terdiri atas tiga sub KDM dan 17 Komando Onder Distrik Militer (KODM). Tiga sub KDM itu adalah sub KDM Sleman Barat yang terdiri 7 KODM, sub KDM Sleman Tengah yang terdiri atas 4 KODM, dan sub KDM Sleman Timur yang terdiri atas 6 KODM. Daerah KDM Sleman itu ada di bawah komando Mayor Basyuni.⁵²

Pasukan bersenjata APS dalam melakukan peranannya sebagai tentara pembantu membentuk markas yang dipusatkan di tiga sub KDM yaitu markas pasukan bersenjata APS di Sleman Barat berada di Kedungbanteng, Moyudan, yang membawahi wilayah Tempel, Mlati, Sayegan, Minggir, Godean, Moyudan, dan Gamping. Pasukan bersenjata APS di Sleman Barat ada di bawah pimpinan Arnis, sedangkan imam mereka adalah KH. Abrurrahman. Di Sleman Tengah markas pasukan bersenjata APS berada di desa Sangonan yang membawahi wilayah Turi, Pakem, Ngaglik, dan Sleman. Markas pasukan bersenjata APS di Sleman Tengah selalu berpindah-pindah untuk menghindari serangan Belanda. Kekuatan inti pasukan bersenjata APS berada di sekitar Tanjungtirto dengan pimpinan M. Diponegoro sebagai komandan pertempuran dan Djuzan Marsidi sebagai wakil komando

pertempuran, sedangkan imamnya adalah Mukti Ali. Adapun di Sleman Timur markas pasukan bersenjata APS dipusatkan di desa Krasekan yang kemudian berpindah ke desa Ngabean, kecamatan Banyurejo. Markas itu membawahi wilayah Ngemplak, Depok, Cangkringan, Kalasan, Prambanan, dan Berbah. Pasukan bersenjata APS di daerah Sleman Timur itu ada di bawah pimpinan Badri, sedangkan imamnya adalah KH. Abdullah Siradj, Masyudi, K. Mujab, H. Sapari, dan Dukidollah.⁵³

Adanya kekuatan MUAPS yang dipusatkan di tiga tempat itu dapat memberikan bantuan terhadap kekuatan TNI dalam menghambat gerak laju pasukan Belanda dari utara maupun dalam melakukan gerilya terhadap pos-pos Belanda di Kabupaten Sleman.

Serangan gerilya yang dilakukan pasukan bersenjata APS dalam usahanya untuk mengusir pasukan Belanda di Kabupaten Sleman berlangsung setiap malam hari. Satu minggu setelah Belanda menduduki kota Yogyakarta dan melanjutkan aksinya dengan membuat pos-pos, di jembatan Bantar satu seksi pasukan bersenjata APS yang dipimpin KRTH. Projosewoyo berusaha menggagalkan pos Belanda dengan melakukan pembumihangusan. Pasukan bersenjata APS menyerang pos Belanda di jembatan Bantar dari tiga arah yaitu dari arah barat, timur dan selatan. Oleh karena itu, di jembatan Bantar terjadi pertempuran yang semakin keras di antara kedua belah pihak yang mengakibatkan 11 orang anggota pasukan bersenjata APS gugur di medan pertempuran, salah satu di antaranya adalah Mohadi yang menjadi komandan regu.

Serangan gerilya yang dilakukan pasukan bersenjata APS tidak henti-hentinya. Satu seksi pasukan bersenjata APS bersama dengan TNI mengadakan pembumihangusan tempat-tempat yang dijadikan sebagai pos Belanda. Dalam serangan terhadap pabrik di Cebongan pasukan bersenjata APS di bawah pimpinan Djuzan Mursidi bertindak selaku pasukan yang memancing agar pasukan Belanda keluar dari pos-posnya di sekitar pabrik dan serangan

selanjutnya diselesaikan oleh TNI. Adapun pabrik di Medari dibumihanguskan pula oleh pasukan bersenjata APS di bawah pimpinan Badri. Pasukan bersenjata APS yang bergerak dari Moyudan menuju ke pabrik di Medari berusaha untuk mengusir Belanda yang berkedudukan di pabrik itu. Selain itu pos Belanda yang akan didirikan di desa Gedongan berhasil digagalkan oleh pasukan bersenjata APS di bawah pimpinan Arnis yang bekerja sama dengan TNI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Suharto (Mantan Presiden RI ke-2) dan dari kepolisian di bawah pimpinan Satiman. Dalam pertempuran ini di pihak pasukan bersenjata APS tidak ada yang menjadi korban, sedangkan di pihak kepolisian ada seorang yang gugur.⁵⁴

Adanya serangan gerilya dan pembumihangusan yang dilakukan pasukan bersenjata APS di tempat-tempat yang dijadikan pos Belanda mengakibatkan pasukan Belanda berusaha untuk mencari markas pasukan bersenjata APS. Belanda berhasil dalam usahanya mencari markas pasukan bersenjata APS melalui orang Indonesia yang mau diajak kerja sama menjadi mata-mata Belanda. Oleh karena itu, markas pasukan bersenjata APS di desa Kedungbanteng yang telah ditemukan mata-mata Belanda diserang pasukan Belanda. Akan tetapi, pasukan bersenjata APS di bawah pimpinan Burhanuddin berhasil menyelamatkan diri dari serangan pasukan Belanda, meskipun terdapat seorang dari pasukan bersenjata APS yang gugur yaitu Masduki.

Serangan yang dilancarkan pasukan bersenjata APS merupakan suatu langkah aksi yang telah diperhitungkan untuk membantu perjuangan TNI dalam menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia. Pasukan bersenjata APS bersama TNI dan dibantu kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah pimpinan Zen Muhammad Suryapranoto (Kepala Polisi DIY) mengadakan serangan terhadap pasukan Belanda di desa Semingin yang sedang melakukan aksi pembersihan.

Perlu diketahui bahwa di Sleman terutama di daerah Tempel ada seorang kyai yang mempunyai peran besar pada masa revolusi

yaitu M. Djumali. Pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka KH. Djumali terpilih sebagai Kepala Bagian Agama Kelurahan Banyurejo, Tempel, Sleman. Waktu itu tugas seorang Kabag Agama juga merangkap sebagai seorang penghulu yang mengurus tentang Nikah, Cerai, Rujuk (NCR), yang sekarang penanganannya terdapat di Kantor Catatan Sipil atau KUA.

Namun demikian semangat juang KH. Djumali bukan berarti padam sampai di situ, terbukti ketika pada tahun 1947 dan 1948, Belanda datang lagi ke tanah air Indonesia, dengan maksud menjajah kembali, rakyat setempat melancarkan serangan, maka terjadilah peperangan di mana-mana. Dalam hal ini serangan Belanda disebut Agresi Militer I dan II.

Di daerah Sleman KH. Djumali yang membawahi pasukan Hisbullah dan pasukan Sabilillah bergabung dengan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di bawah pimpinan Letnan Badri. KH. Djumalai berjuang tidak hanya dalam markas-markas perjuangan saja, tetapi juga turut terjun langsung ke medan pertempuran. Sedangkan tugas-tugas yang dilakukan KH. Djumalai dalam markas perjuangan di rumah kediamannya sendiri di Banyurejo adalah: memberikan informasi yang berkaitan dengan situasi di medan pertempuran; memberikan fasilitas untuk keperluan tentara; mengontrol pembagian logistik.

Situasi dan kondisi gawat pada waktu Agresi Militer pernah KH. Djumali bersama Laskar Hisbullah dan Sabilillah pindah tempat untuk melakukan gerilya. Daerah perjuangan KH. Djumali tidak hanya di sekitar Sleman saja, tetapi sampai juga ke daerah Kulonprogo dan Salam Magelang.⁵⁵

Sebelum Belanda mengakui kedaulatan Bangsa Indonesia pada tahun 1949, tepatnya kurang satu bulan setelah Agresi Militer Belanda yang dilancarkan pada bulan Desember 1948, KH. Djumalai bersama Laskar Hisbullah dan Sabilillah bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) turut menyerang konvoi-konvoi Belanda termasuk merusak jalan kereta api dan kawat-kawat telepon. Akibatnya Belanda terpaksa memperbanyak pos-pos di

sepanjang jalan-jalan besar yang menghubungkan kota-kota yang diduduki Belanda terutama jalan pintu masuk dari Magelang ke Yogyakarta tepatnya di daerah Tempel (di jembatan yang menghubungkan Jawa Tengah dan Yogyakarta).

Menjelang diadakannya Serangan Umum 1 Maret 1949, terhadap kota Yogyakarta, kekuatan pasukan bangsa Indonesia terpecah-pecah pada ribuan pos (markas) di seluruh daerah republik, yang merupakan suatu medan gerilya. Di antara pos (markas) yang dipakai oleh para gerilya adalah rumah kediaman KH. Yunus dan kediaman KH. Djumali sendiri.

Dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 KH. Djumali dengan Laskar Hisbullah dan Sabilillah bergabung dengan Mayor Kusno yang telah siap dengan pasukannya untuk menyerang dari sektor utara. Sedangkan pemimpin lainnya ada yang memimpin serangan dari sektor barat, timur maupun selatan. Letnan Kolonel Suharto sendiri sebagai pucuk pimpinan umum Serangan 1 Maret 1949 memimpin anak buahnya lewat sektor barat. Dalam menghadapi serangan umum ini, seluruh rakyat dalam kota maupun pinggiran kota membantu memperlancar jalannya penyerangan.

Demikianlah pengalaman politik KH. Djumali dalam turut berjuang mencapai kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan dari Agresi Militer Belanda. Walaupun pengalaman politiknya belum sebesar para tokoh terkenal lainnya namun KH. Djumali telah dipercaya oleh masyarakat Tempel yang mampu membawa aspirasi umat Islam pada kehidupan yang lebih baik.

Selain itu di daerah Ngemplak, Sleman juga ada Kyai yang mempunyai peran besar dalam perang kemerdekaan kedua yang bernama KH. Muhi. KH. Muhi sejak usia remaja telah berjuang melawan kaum penjajah. Ia pada zaman penjajahan Belanda pada tahun 1918 berjuang menentang pemaksaan penyuntikan terhadap mayat di Plosokuning, Minomartani, karena hal tersebut dianggap melanggar hukum agama Islam. Sedangkan pada jaman pendudukan Jepang tahun 1943 KH. Muhi menjadi anggota

Musyawarah Ulama yang akhirnya ulama-ulama tersebut menjadi anggota Majelis Syuro di DIY.⁵⁶

Perjuangan KH. Muhdi banyak yang bersifat fisik yaitu dengan cara bergerilya. Ia berjuang termasuk dalam pasukan Sabilillah. Karena keuletan serta ketangguhannya, maka KH. Muhdi pada tahun 1945 diangkat sebagai pemimpin APS (Angkatan Perang Sabilillah) yang terdiri dari anak-anak sekitarnya.

Pada tahun 1946 KH. Muhdi mengirimkan anak buahnya dengan menggabungkan Batalyon 25 yang dipimpin oleh Mayor Basuni ke front Semarang (Mranggen). Di tempat itu juga banyak korban di antaranya Muh. Sofyan Salim, lalu jenazahnya dikebumikan di makam dekat masjid Kauman Yogyakarta.

Pada masa penjajahan Jepang keadaan masyarakatnya adalah lebih memprihatinkan, karena mau tidak mau harus melakukan perlawanan. Tindakan yang dilakukan Jepang adalah memeras rakyat, dan rakyat dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan Jepang. Masyarakat merasa dibohongi oleh Jepang karena Jepang mengumpulkan para pemuda akhirnya dikirim ke Romusa misalnya ke Sumatra, lama-lama pemuda habis. Dari hal itu Jepang lebih leluasa untuk berbuat sekehendak hatinya. Waktu itu Jepang berpusat di daerah Grogolan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta.⁵⁷

Jepang menguasai wilayah Ngemplak kurang lebih selama dua tahun. Setelah Jepang dibom oleh Belanda kemudian Belanda menguasai kembali wilayah Ngemplak dan sekitarnya.

Pada tahun 1948 Belanda datang di Bandar Udara Adisucipto, kemudian merayap ke kota-kota dan mencari pimpinan sampai ke pelosok-pelosok. Pada saat itu yang dilakukan oleh KH. Muhdi adalah kalau siang hari para tentara Sabilillah dan rakyat menghadang Belanda yang akan melewati Jalan Kaliurang, pos-posnya antara lain di daerah Ngabean, Gondok, Gentan. Sedangkan kalau malam hari tentara Sabilillah dan pemuda Is-

lam berkumpul di balai desa (sekarang dipakai untuk pondok bersalin) di situ diberi doa-doa oleh KH. Muhdi. Sedangkan pada malam harinya melakukan gerilya di kota-kota.⁵⁸

Belanda menggunakan politik pecah belah pada kesatuan umat Islam. Dengan politik tersebut diharapkan supaya dapat menguasai salah satu golongan, maka akan mudah untuk menguasai golongan yang lain. Sehubungan dengan hal itu para tokoh masyarakat mulai sadar akan keadaan diri dan masyarakatnya yang serba terbelakang jika dibandingkan dengan pemerintah kolonial. Dari hal itu lalu timbul gagasan untuk melepaskan masyarakatnya dari belenggu kemerosotan. Dalam gagasan ini KH. Muhdi juga bergerak dan berjuang demi menjunjung tinggi martabat dan derajat umat Islam demi bangsa dan negaranya.

Dari keterangan di atas ada kesesuaiannya dengan catatan dalam buku karangan A. Syafi'I Ma'arif yang berjudul "Islam dan Masalah Kenegaraan", yaitu:

"Pada tahun 1936 Gubernur Jenderal B.C. De Jonge masih berharap bahwa kekuasaan kolonial Belanda akan berlangsung lebih lama lagi di Indonesia, tetapi enam tahun kemudian yaitu tahun 1942 bulan Maret, kekuasaan kolonial Belanda diusir dari Indonesia oleh pasukan Jepang tanpa perlawanan yang berarti dari pihak Belanda. Kedatangan Jepang mula-mula disambut antusias bukan saja oleh umat Islam, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Ditempuhnya politik semacam itu bertujuan untuk memobilisasi seluruh penduduk dalam rangka menyokong tujuan perang mereka yang cepat dan mendesak. Sebenarnya baik Belanda maupun Jepang sengaja mengeksploitasi umat Islam untuk kepentingan mereka. Tetapi Belanda sedikit sekali memberi kesempatan pada umat Islam untuk bergerak di bidang politik".⁵⁹

Pada masa agresi Belanda kedua, keadaan masyarakat semakin tertekan akibat dari tindakan pemerintah Belanda yang tidak mengenal perikemanusiaan. Semenjak penjajahan Jepang dulu, sebenarnya Ngemplak banyak yang mengeluh apalagi dengan datangnya Belanda ini masyarakat selalu khawatir seandainya penghasilan mereka diambil oleh penjajah. Pemerintah Belanda

tidak memberi prioritas apapun terhadap rakyat, karena rakyat dianggap sebagai bawahan mereka. Masyarakat tidak boleh melakukan gerakan sosial, seperti mengadakan suatu perkumpulan jama'ah pengajian, karena hal itu dianggap membahayakan pemerintah Belanda. Maka dalam hal ini KH. Muhdi sewaktu melakukan kegiatan sosial selalu dengan cara sembunyi-sembunyi.⁶⁰

Pada saat itu KH. Muhdi memimpin para santrinya bersamaan dengan STC (Satuan Tentara Cabang) Gentan yaitu batalyon 4 yang dipimpin oleh Kapten Marzuki untuk menggempur jembatan Jurug dan Besi di jalan Kaliurang. Di samping itu KH. Muhdi langsung memimpin anak buahnya. Setiap para gerilyawan yang akan mengadakan penyerangan terlebih dahulu berkumpul di Krapyak Lor sedang KH. Muhdi memberikan doa agar dapat berhasil dan selamat. Para gerilyawan juga menyerang kota Yogyakarta yaitu di Panti Rapih.

Letkol Soeharto juga pernah bermalam di rumah KH. Muhdi sewaktu dalam perjalanan mengadakan pemeriksaan gerilyawan dan dikawal oleh Bapak Dibyo. Kehadirannya disambut oleh KH. Muhdi, Kapten Marzuki dan para gerilyawan yang saat itu sedang bergerilya untuk menggempur jembatan Dayu dan Jurug.

Pada hari Senin tanggal 10 Januari 1949 Letkol Soeharto bersama Kapten Marzuki, Kapten Sumitro, Letnan Badri, Junaidi, Zarangan, Dibyo dan KH. Muhdi mengadakan musyawarah di rumah KH. Muhdi untuk merundingkan siasat gerilya mereka. Letkol Soeharto duduk di atas kursi yang sekarang masih ada (keadaan sudah usang), dengan menikmati jaminan makanan. Musyawarah tersebut dimulai kurang lebih jam 19.00 dan selesai kurang lebih jam 03.00 pagi.

Dalam perjuangan tersebut, KH. Muhdi menggunakan tombak sebagai alat pelengkap di dalam bergerilya dan bendera persegi panjang dari kain biasa warna putih sebagai simbol perjuangan bertuliskan "Lailahaillallah" berwarna merah.

Setelah Belanda mengetahui bahwa di Krapyak menjadi ajang pusat gerilyawan, maka pada tanggal 12 Januari 1949 tepatnya hari Rabu Kliwon pagi-pagi benar Belanda menyerang markas APS tersebut dari segala penjuru, sehingga terjadilah pertumpahan darah akhirnya Bapak KH. Muhdi tertembak pada bagian kepalanya di sawah sebelah selatan dusun Krapyak Lor, seketika itu juga KH. Muhdi meniggal dunia bersama-sama dengan beberapa anak buahnya antara lain Kyai Zubair, Kyai Dakhiri, Kyai Jawadi, Kyai Dulkahar, Kyai Bahrin, dan 7 orang tak dikenal. Sedangkan pihak tentara RI yang dipimpin Kapten Marzuki tidak ada yang gugur.

Pimpinan pasukan serangan waktu itu selain Kapten Marzuki juga Kapten Sumitro dan Letnan Badri. Kemudian Kapten Marzuki dipindah ke Magelang dan Sumitro beserta Letnan Badri dan anak buahnya dipindah ke Pakem, sehingga di Krapyak tinggallah kesatuan Hisbullah yang berjuang melawan Belanda.

Selain itu keterlibatan ulama Katholik beserta umatnya juga nampak terutama di daerah Sleman Barat secara tidak langsung ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan. Di Klepu ada sebuah gereja yang bernama "Gereja Santo Petrus dan Paulus". Gereja ini beserta umatnya pada masa perang kemerdekaan ikut berperan serta dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Hal ini nampak ketika para pemuda Katholik bergabung pada pemerintahan militer (KODM) untuk ikut bergerilya para pemuda itu dalam berbagai pertempuran menggunakan salib sebagai sumber keselamatan. Bahkan di tengah-tengah desingan peluru mereka sempat membuat syair untuk memperkuat semangat juang mereka, syair itu sebagai berikut:

DOA

Sabda kekal, Putra Allah yang tunggal
Nyalakan di dalam hatiku cinta tanah air
Agar aku mengabdikan kepada Mu
Sebagaimana layak bagimu.

Memberi tanpa menghitung-hitung
Berjuang tanpa menghiraukan luka
Bekerja tanpa mencari istirahat
Berbakti tanpa mengharapkan untung

Cukup bagiku keinsyafan yang gerang
Bahwa aku telah melakukan kehendak Mu
Yang kudus, Amin.⁶¹

Jan' 1949

Beberapa daerah lain yang ikut membantu perang secara tidak langsung antara gereja/kapel di Medari, Mlati. Mereka beserta umatnya banyak membantu menyediakan lauk pauk untuk para gerilyawan TNI. Selain itu ada gereja yang terpaksa kena bumi hangus karena diduga sebagai tempat markas Belanda yaitu Gereja Somohitan.

4.3.4 Keterlibatan Ulama di Daerah Kulonprogo Pada Masa Perang Kemerdekaan

Berdasarkan sejarahnya, yakni pada jaman penjajahan Belanda, Kabupaten Kulonprogo semula terbagi dalam dua kabupaten yaitu Kabupaten Adikarto yang beribukota di Wates (termasuk wilayah Kasultanan Yogyakarta) dan Kabupaten Kulonprogo yang beribukota di Sentolo (termasuk wilayah Kadipaten Pakualaman). Keadaan ini berlangsung hingga awal republik. Baru setelah lahirnya undang-undang nomor 18 tahun 1951 yang mengatur tentang perubahan undang-undangan nomor 15 tahun 1950, maka dua kabupaten tersebut secara resmi digabungkan menjadi satu kabupaten dengan nama Kabupaten Kulonprogo yang beribukota di Wates dan yang terletak di 35 km sebelah barat Yogyakarta. Nama Kabupaten Kulonprogo secara harafiah berarti sebelah barat sungai Progo.

Secara geografis daerah wilayah Kabupaten Kulonprogo terdiri atas dataran rendah dan berbukit-bukit. Keadaan wilayahnya yang berbukit-bukit, dengan jalan yang berkelok-kelok, turun naik dan

dengan dihiasi tanah persawahan yang tersebar di sana sini adalah merupakan suatu panorama yang indah dan menawan. Kabupaten Kulonprogo ini dibatasi oleh Samudera Indonesia di sebelah selatan, Kabupaten Purworejo di sebelah barat, sebelah utara adalah Kabupaten Magelang dan sebelah timur Sungai Progo.

Berbeda dengan keadaan di daerah Gunungkidul yang sangat sulit air apabila musim kemarau namun di daerah Kabupaten Kulonprogo wilayahnya berbukit-bukit ternyata air bukan menjadi masalah utama. Sebab irigasi di daerah ini telah berjalan dengan baik dan mampu mengairi tanah-tanah persawahan. Sedang tanah-tanah tegalan di daerah perbukitan juga mendapat cukup air dari bukit-bukit yang masih rindang ditumbuhi pepohonan.

Demikianlah gambaran sekilas keadaan wilayah Kabupaten Kulonprogo yang memiliki potensi besar dalam masa revolusi sebagai daerah pertahanan dan daerah gerilya. Kondisi geografis yang demikian itu lebih mantap lagi berperan sebagai tempat pertahanan dan daerah gerilya dengan ditopang oleh keadaan masyarakatnya yang ramah dan memiliki rasa solidaritas dan jiwa gotong royong yang masih kuat. Memang masyarakat pedesaan di daerah Kabupaten Kulonprogo yang merupakan etnis Jawa, pada umumnya masih memiliki dan dilandasi oleh budaya Jawa. Mereka memegang erat tradisi dan budaya Jawa. Sikap, tingkah laku dan tata kramanya pun masih asli dan masih belum banyak terpengaruh oleh budaya luar. Hal ini tercermin dari kehidupan mereka sehari-hari. Baik dalam bentuk hubungan horisontal maupun vertikal. Hubungan horisontal diwujudkan dalam bentuk sikap dan semangat (jiwa) gotong royong yang mengakar dalam masyarakat. Di samping itu perilaku yang ramah, sopan, suka menolong *polos dan andap* asor merupakan ciri-ciri khusus yang masih tetap melekat pada masyarakat pedesaan di Kabupaten Kulonprogo khususnya dan masyarakat pedesaan-pedesaan di Jawa pada umumnya. Jiwa gotong royong, perilaku ramah, dan suka menolong yang menjadi milik masyarakat pedesaan di Kabupaten Kulonprogo tersebut ternyata merupakan modal yang besar dalam masa revolusi. Dengan modal semangat jiwa gotong

royong, perilaku yang ramah dan suka menolong itu masyarakat pedesaan di Kabupaten Kulonprogo siap membantu TNI dan bahkan mereka tidak hanya membantu dalam arti menyediakan tempat berlindung dan menyediakan perbekalan, tetapi mereka juga ikut memanggul senjata dalam perang gerilya di masa revolusi. Keterlibatan masyarakat pedesaan di Kabupaten Kulonprogo dalam masa revolusi ini makin mantap lagi dengan masih lestarinya bentuk-bentuk hubungan vertikal dalam masyarakat. Hubungan vertikal ini diwujudkan dalam bentuk sikap hormat, loyal dan ketaatan serta kepatuhan rakyat atau bawahan terhadap atasan atau pimpinan. Kondisi yang demikian ini juga merupakan modal yang sangat penting dalam perjuangan di masa revolusi. Dengan kondisi yang demikian itu, maka rakyat akan mudah sekali digerakkan dengan cukup melalui pimpinan formalnya.

Dalam masa revolusi, Kabupaten Kulonprogo (sekarang) masih terdiri atas dua kabupaten yakni Kabupaten Adikarta dan Kabupaten Kulonprogo. Kabupaten tersebut dalam masa revolusi mempunyai nasib dan penderitaan yang sama dengan kabupaten-kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan adanya penyerangan Belanda secara mendadak di ibukota republik Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948, maka sejak itu seluruh wilayah Provinsi DIY menjadi ajang pertempuran dan perjuangan.

Keberhasilan tentara Belanda dalam menggempur beberapa markas pasukan ulama di Yogyakarta dan sekitarnya ternyata masih belum merasa puas, mereka selalu mengirim patrolinya untuk mencari markas pasukan bersenjata gerilyawan TNI lainnya. Oleh karena itu, ulama Cabang Kulonprogo mempersiapkan diri dengan menyusun kekuatan untuk menghadapi serangan mendadak yang dilancarkan pasukan Belanda. Oleh karena itu dalam persiapannya MUAPS mengadakan kerja sama dengan Komando Distrik Militer IV (KDM IV) yang wilayahnya meliputi seluruh daerah Kabupaten Adikarta dan Komando Distrik Militer V (KDM V) yang wilayahnya meliputi seluruh daerah Kabupaten Sentolo. Pasukan bersenjata APS yang dipimpin oleh M. Djohar

Suhaimi telah membantu kegiatan TNI di bawah Lettu Ismail. Selain itu APS juga membantu Kompi V batalyon II yang dipimpin Nurmunir yang bertugas di wilayah KDM IV dan KDM V. Demikian pula di daerah Temon MUAPS di bawah pimpinan Suyadi membantu Komando Onder Distrik Militer (KODM) Temon yang dipimpin oleh Letda Salamun.⁶²

Dalam kerjasamanya dengan TNI, MUAPS membantu mengusahakan penyediaan logistik, menjaga keamanan wilayah sekitarnya, membuat rintangan untuk menahan gerak maju pasukan Belanda, dan mengikuti gerilya di Kulonprogo dan sekitarnya. Di dalam mengusahakan bahan-bahan logistik MUAPS menghubungi pemerintah dan masyarakat khususnya umat Islam setempat. MUAPS pernah membantu bahan-bahan logistik kepada KDM IV bersama 16 orang anggotanya di bawah pimpinan Letnan II Subrodjo. Penjagaan keamanan setempat dilakukan MUAPS karena di daerah Kulonprogo terdapat perusuh yang berusaha akan menggarong dan menggedor rumah-rumah penduduk yang ditinggalkan untuk mengungsi. Pengungsian dilakukan penduduk karena adanya kemungkinan pasukan Belanda mengadakan aksi-aksi di daerah setempat. Oleh karena itu, MUAPS mengadakan pembumihangusan bangunan-bangunan penting agar tidak dapat dipergunakan untuk pos-pos pasukan Belanda. Kantor kabupaten, gedung sekolah, gedung jawatan pemerintah, dan jembatan Bantar menjadi sasaran utama pembumihangusan. Politik bumi hangus dilakukan karena pada dasarnya politik bumi hangus memiliki peranan penting dalam taktik perang rakyat semesta yaitu merupakan salah satu cara yang mampu melemahkan perang kolonial musuh.

Pada waktu itu keadaan daerah Kulonprogo berubah menjadi sepi, sehingga penggarong dan penggedor dapat mempergunakan kesempatan mengambil barang-barang milik penduduk yang tidak sempat dibawa ke tempat pengungsian. Penggedor dan perampok itu semakin merajalela di tengah perang gerilya yang berkecamuk. Melihat keadaan masyarakat yang tidak aman dengan munculnya penggedor dan perampok itu, MUAPS berusaha untuk

menghancurkan gerombolan perampok yang mengganggu ketentraman penduduk. Pasukan bersenjata APS dari Yogyakarta di bawah pimpinan Harun Al-Rosyid, atas permintaan MUAPS Cabang Kulonprogo dikirim ke daerah Kulonprogo untuk mengamankan wilayah itu. Oleh karena kerusuhan di daerah Kulonprogo semakin memuncak, maka Sri Sultan Hamengku Buwono IX berdasarkan instruksi Markas Besar Komando Djawa (MBKD) No. 11/MBKD/49 tanggal 25 Januari 1949 memerintahkan agar di setiap kelurahan dibentuk pagar desa sebanyak dua regu masing-masing beranggotakan 15 orang dengan seorang komandan regu dan seorang wakil komandan regu yang berfungsi untuk mengamankan desa sekitarnya. Dengan adanya perintah itu, maka Akip Masduki sebagai staf keamanan MUAPS dan kepala keamanan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengusahakan terwujudnya perintah itu. Dengan terwujudnya pasukan keamanan MUAPS, pasukan bersenjata APS yang dipimpin Harun Al Rosyid berhasil menghancurkan sarang garong dan kecu serta membunuh para pemimpinnya.⁶³

Di tengah-tengah usaha MUAPS dalam menghancurkan penggedor dan perampok, pasukan bersenjata APS juga berusaha menghancurkan pasukan Belanda yang memasuki daerah Kulonprogo pada tanggal 27 Desember 1948. Gerakan pasukan Belanda memasuki daerah Kulonprogo dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu gerakan Belanda di bagian utara melewati jembatan Kalisudu dan di bagian selatan melewati jembatan Bantar. Perjuangan MUAPS di dalam mengusir pasukan Belanda yang hendak menghancurkan kemerdekaan negara Republik Indonesia itu berlangsung lama dan tidak berhenti sebelum Belanda mengakui kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pada waktu pasukan Belanda mendirikan pos pertahanan di daerah sekitar jembatan Bantar MUAPS berusaha untuk menghancurkan pos pertahanan itu.

Pada awal mulanya Fakhruddin, Abdulgofur, dan Djohar Suhaimi mengadakan penyelidikan pada pos pasukan Belanda di sekitar jembatan Bantar guna menentukan taktik dan strategi di

dalam mengadakan gerilya dan usaha untuk menghancurkan pos pasukan Belanda di Bantar. Selanjut MUAPS memutuskan taktik dan strategi serangan yang ditujukan terhadap pasukan Belanda di Bantar melalui dua arah yaitu dari utara dan selatan di atas jalan yang berbukit-bukit. Setelah pasukan bersenjata APS menyeberangi jembatan Bantar, maka selanjutnya jembatan itu dihancurkan dengan enam granat. Serangan pasukan bersenjata APS ini mendapat perlawanan dari pasukan Belanda, sehingga terjadi kontak senjata yang semakin hebat. Dalam pertempuran yang pertama kali ini pasukan bersenjata APS mundur dari medan pertempuran untuk menyelamatkan diri mengingat kekuatan pasukan bersenjata APS jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kekuatan pasukan Belanda. Dalam pertempuran ini telah gugur satu orang anggota pasukan bersenjata APS bernama Sanun, sehingga lapangan di bagian barat Kabupaten Sentolo tempat gugurnya Sanun itu, diberi nama "Lapangan Sanun".

Di bagian timur pasukan Belanda bergerak dari arah Yogyakarta dengan tujuan mengadakan patroli di Kabupaten Kulonprogo. Pada waktu itu pasukan bersenjata APS datang dari arah barat, sehingga terjadi konflik bersenjata antara kedua belah pihak. Dalam pertempuran yang semakin memuncak, pasukan bersenjata APS berusaha menyelamatkan diri mengingat persenjataan yang sederhana bila dibandingkan dengan persenjataan yang dimiliki pasukan Belanda. Selanjutnya pasukan Belanda mengejar pasukan bersenjata APS dan berhasil menewaskan seorang anggota pasukan bersenjata APS dan seorang lagi menderita luka-luka berat.

Tokoh lain yang ikut menggerakkan ulama yang tergabung dalam Askar Perang Sabil adalah Umar Affandi, Salamudin, Dawam Rozi. Salamudin memiliki tugas berat pada bagian logistik karena harus menghimpun dana untuk membiayai perjuangan. Walaupun bukan suatu hal yang sulit dalam hal berkorban dan berjuang untuk kemaslahatan sudah menjadi panggilan jiwanya sesuai dengan ajaran Islam. Dalam waktu cepat dukungan logistik disumbang dari rakyat pedesaan. Rakyat pedesaan inilah merupakan urat nadi para pejuang pada masa perang

kemerdekaan. Oleh karena itu pada tahun 1949 ada sebuah langgam Jawa yang mencerminkan peran rakyat pedesaan dalam membantu pejuang mempertahankan kemerdekaan. Syair ini amat menyentuh di hati para pejuang pada masa itu. Adapun lagu langgam Jawa itu berjudul “Dongengan” dengan syair-syair sebagai berikut:

DONGENGAN

Oleh Gesang

Sinten purun kulo dongengi
Dongeng sedulut deso
Sugih sawah lan sugih pari
Ayeman ati orang murko

Ageng lebete dateng negari
Rupo arto lan ropo bondho
Jaman gerilya ing uni
Tiyang kutho ngungsi teng deso

Si Kakang lan mBakyu sing nampi
Lahir batin suko lan rilo
Jamin panggenan lan jamin tedi
Lowung sendyan cara deso

Kocapo biyen naliko kuwi
Sopo wonge pada rumongso
Terima kasih bathine muni
Suk yen aman walesku apa

Tutuge doneng puniki
Indonesia pun merdiko
Di kantheni tatanan adi
Ngajeni mring pada manungso

Weling sing dongengke niki
Yen Kakang lan mBakyu ing kutho
Walese aja nganti lali
Lan aja disiyu-siyu

Langgam Jawa karya Gesang sengaja dipilih untuk mengingatkan kita semua tentang suatu peristiwa besar yang pernah di tanah air kita yang tercinta ini. Dengan kata-katanya yang sederhana dan lugu, senian besar ini menggambarkan peran rakyat desa yang tak ternilai dalam suatu perang dahsyat yang menentukan nasib bangsa Indonesia yang baru saja merdeka. Lepas dari belenggu penjajahan bangsa Belanda. Pada masa Agresi ke II lagi langgam Jawa ini sangat terkenal di daerah pedesaan termasuk daerah Kulonprogo.

Gesang sangat menghayati keadaan itu. Betapa rakyat yang hidup sederhana dan seadanya, lugu dan terbelakang, hidup tentram mensyukuri kekayaan alam sekitarnya. Mereka tidak mengerti politik atau diplomasi. Mereka belum tahu makna bangsa maupun negara. Namun mereka hidup dalam filsafat kegotongroyongan yang tinggi, tulus serta ikhlas menerima kedatangan sesama umat di desanya, bahkan rela memberikan apapun yang menjadi miliknya: tempat tinggal, makanan dan juga nyawa. Mereka sama sekali tidak mengharap balasan. Pada masa itu mereka memahami bahwa sesama manusia sedang terancam bahaya dan perlu dibantu serta dilindungi, juga dibela.

Syair lagu ini menggambarkan tentang perang Rakyat Semesta tatkala tentara nasional bergerilya menghadapi musuh yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dengan segala kelecikan dan fitnah-fitnahnya, penjajah Belanda melancarkan berbagai aksi dan profokasi pecah belah (*devide et impera*) untuk memporakporandakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang baru diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945.

Rakyat cepat tanggap dengan situasi yang terjadi. Nasionalisme memang telah lama tumbuh dan berkembang subur. Rakyat desa yang sederhana dan rata-rata terbelakang mungkin bodoh karena tidak terpelajarnamun nasionalisme telah menemukan bumi teramat subur di dalam dada setiap insan Indonesia. Bila negara merupakan semacam naluri dan juga

kewajiban. Gema Indonesia Merdeka dan berdaulat telah berkumandang, bergaung di relung-relung jiwa dan lubuk hati seluruh bangsa Indonesia. Maka, tatkala ibu pertiwi memanggil tidak ada rasa bimbang dan ragu. Merdeka atau mati adalah salah satu semboyan hidup abadi, bagaikan nur yang cahayanya tak akan padam bagi bangsa Indonesia.

Maka ketika orang-orang kota, sipil maupun militer mengungsi ke desa-desa, rakyat menyambutnya dengan hati terbuka, tulus ikhlas berbagai papan dan pangan. Para pamong desa dan ketua rukun warga cepat tanggap menerima pesan dan isyarat tentara. Peristiwa besar tentang kemanusiaan nasionalisme, cinta tanah air bumi pertiwi dan ikhlasnya manusia berkorban raga, harta dan jiwa tengah terjadi. Heroisme, patriotisme, semangat juang, nilai-nilai kejujuran mewarnai suatu Perang Agung dengan tujuan suci murni mempertahankan Republik Indonesia.

Orang-orang kota yang memiliki banyak kelebihan itu berlindung di desa menghindari maut, mencari keselamatan jiwa dan raga. Tidak ada pilihan bagi orang-orang kota yang ingin selamat dan ingin berjuang membela tanah air, kecuali turun ke desa atau naik bukit dan pegunungan, lepas dari incaran musuh. Tentara Nasional Indonesia pasti memiliki catatan tersendiri "Bela Negara" yang telah diberikan oleh orang-orang sederhana itu. Para pengungsi dengan keluarganya pun mempunyai catatan dan kenangan tak terlupakan mengenai jasa-jasa orang desa di tempat pengungsian mereka.

Atas semua pengorbanan dan jerih payah orang-orang desa, mereka pasti merasa berterima kasih. Sebagai bangsa timur yang dikenal tebal rasa kemanusiaan dan jiwa sosialnya, apalagi Pancasila telah menjadi filsafat dan pandangan hidup mereka yang pernah mengungsi dan bergerilya, tentu mengenal rasa syukur dan terima kasih. Seraya jauh di lubuk hati menyimpan janji untuk membalas budi, kelak jika keadaan telah memungkinkan. Karena pada saat itu apalah yang dapat diberikan, tatkala semua orang prihatin dan maut mengincar di mana-mana? Padahal orang desa

itu tidak berharap apa-apa. Mereka gembira dan bahkan merasa terharu dan bangga, atas kesediaan orang-orang kota menerima pertolongan dan suguhan seadanya belaka. Siang dan malam mereka berdoa dan berharap perang usai dan keadaan aman kembali. Mereka akan merasa bahagia jika suasana desa yang ayem tentram dengan sawah subur yang menghasilkan padi dapat mereka nikmati kembali. Dalam bait terakhir Gesang masih memberi kesan sederhana yang penuh dengan makna. Jika mbakyu-mbakyu dan kakang-kakang dari desa datang ke kota nanti janganlah lupa untuk membalas mereka. Jangan pula disia-siakan.

Lagu Dongengan, karya Gesang bukanlah sekedar cerita, karena di dalamnya penuh perlambang dan makna. Ia bercerita tentang orang-orang kecil yang telah berbuat besar. Ia bercerita tentang wong cilik yang telah berbuat banyak untuk kemerdekaan bangsa dan negaranya, tanpa pamrih, tulus dan ikhlas. Mungkin, mereka sendiri pun telah lupa tentang semua jasa dan pengabdianya itu karena hidup keras yang dihadapinya setiap hari. Lagi pula, perjuangan dan pengabdian itu bagi mereka adalah suatu tugas kewajiban yang menjadi bagian dari ibadah mereka di dunia.

Karena sifat manusia yang mudah lupa, Gesang pun mengingatkan. Agar orang-orang kecil di desa yang telah berbuat besar dan berjihad besar tidak dilupakan kepentingan hidupnya. Gesang juga menghimbau agar orang-orang desa itu jangan hendaknya disia-siakan. Hukum dan peraturan di negara kita, menghormati sesama. Orang-orang desa itu adalah sesama kita, bangsa Indonesia yang mendambakan hidup aman, damai, sejahtera, lahir dan batin.

Di daerah Kulonprogo ini selain ulama Islam, keterlibatan umat Katholik dan Kristen nampak peran sertanya membantu gerilyawan TNI baik sebagai Palang Merah Indonesia maupun dalam penyediaan lauk pauk. Pada masa Agresi Militer Belanda II itu kondisi Yogyakarta sampai Muntilan sangat genting.

Berbagai pertempuran di sekitar daerah tersebut banyak menelan korban jiwa. Sebagian besar para pejuang yang luka-luka kena peluru masuk Rumah Sakit Boro Kulonprogo, yang waktu itu bernama Rumah Sakit Santo Yusuf, Rumah Sakit tersebut pada tahun 1948 baru ada beberapa dokter, di antaranya dokter Kusen (ayah Inten Suweno mantan Menteri Sosial RI), dr. Hutagalung, dr. Amino dan dr. Joko. Rumah Sakit Santo Yusuf di Boro ini banyak menampung korban kena mortir sehingga banyak para pejuang dengan terpaksa harus dipotong kaki atau tangannya. Ada satu pengalaman yang merawat Susten Collette yaitu seorang anak laki-laki yang berumur 14 tahun namanya Mujirat. Anak ini termasuk salah satu korban yang cukup berat karena sebagian kulit lengannya mengelupas sehingga harus ditutup dengan kulit dari pahanya sendiri. Bahkan pernah terjadi bahwa semalam ada tiga kaki dan dua lengan dipotong yang dikuburkan dalam satu lubang. Setelah beberapa hari berlalu, salah seorang yang dipotong kakinya meninggal, oleh karena kepercayaan setempat orang tuanya datang minta kakinya diambil untuk dijadikan satu dengan badannya. Hal ini dilayani juga oleh pihak rumah sakit.⁶⁵

Pekerjaan pelayanan rumah sakit di Boro ini semakin diperkuat para dokter banyak membantu rumah sakit tersebut, tidak hanya lewat kerja, tetapi juga lewat obat-obatan dan makanan yang mereka sumbangkan. Bahkan pihak gereja di Boro membantu dengan mengutus Broeder Sirvas (keturunan China) untuk mengambil obat-obatan ke Yogya hanya dengan jalan kaki. Broeder Sirvas ini disamping sebagai rohaniawan juga guru SMP, akan tetapi karena panggilan jiwanya sebagai gembala Allah, ia dengan penuh semangat melaksanakan tugas yang maha berat itu menuju Yogya mengambil obat-obatan di rumah sakit *Onder de Bogen* (Panti Rapih). Broeder Sirvas ini dalam perjalanannya memakai pakaian perawat, hal ini untuk mencegah kemungkinan terjadi karena daerah yang dilalui adalah daerah-daerah pertempuran. Beliau juga pernah dititipi surat surat dari A.H. Nasution untuk istrinya dan surat yang ditujukan kepada Kraton (HB IX) yang berkaitan dengan perjuangan. Dari kegiatan tersebut

banyak Tentara Pelajar yang mendapat bantuan obat-obatan dari Broeder tersebut terutama yang berada di sekitar markas MBKD. Beberapa anggota Tentara Pelajar yang mendapat bantuan obat-obatan antara lain Martowijaya, Sukidi, dr. Waryo, Suhardjo. Aktivitas yang dilakukan oleh Broeder Sirvas ini banyak mendapat sambutan masyarakat setempat. Hal ini nampak umat Kristiani secara tidak langsung mendukung penuh perjuangan melawan Belanda. Bahkan dalam menangani dapur umum, nampak sekali gotong royong bersama-sama dengan penduduk dan gereja membantu menyediakan lauk-pauk pada waktu itu berupa sayur gori, ketela dan kikir yang terbuat dari kulit bengkok yang masih muda. Makanan ini amat digemari A.H. Nasution yang waktu itu bermarkas di rumah Bapak Nitirejo.⁶⁶

Daerah Kulonprogo ini sebenarnya merupakan daerah target operasi tentara Belanda, termasuk Rumah Sakit Santo Yusuf Boro. Akan tetapi karena kecerdikan suster-suster, para pegawai rumah sakit diminta mengecat genting-genting rumah sakit dengan tanda palang merah. Akhirnya rumah sakit tersebut tidak jadi di bom oleh tentara Belanda yang menggunakan pesawat tempur dengan nama *Cocor Merah* dan capung. Sasaran lain dari pesawat Belanda adalah gedung Gadai Dekso di bom karena diduga sebagai pusat pelarian gerilyawan TNI. Demikianlah keterlibatan umat Kristiani beserta gereja dan rumah sakit saling bahu membahu membantu pejuang kemerdekaan RI sampai pengakuan kedaulatan.

4.3.5 Peranan Ulama di Daerah Gunungkidul Pada Masa Perang Kemerdekaan

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui jalur formal yaitu badan-badan kelaskaran dan lembaga-lembaga resmi pemerintahan yang dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, jalur perjuangan melalui olah kebatinan pun mempunyai makna yang besar artinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sampai bulan November 1945 situasi negara dalam keadaan genting karena terancam musuh. Sehubungan dengan hal itu maka datanglah utusan Sri Sultan Hamengku Buwono IX ke

Gunungkidul dengan membawa titah untuk mendaftari seluruh kyai yang ada di Gunungkidul. Selanjutnya pada 11 November 1945 para kyai tersebut supaya berkumpul di kabupaten. Setelah berkumpul semua maka pada 2 November 1945 para kyai tersebut diangkut ke Yogyakarta, berhubungan dengan pecahnya pertempuran di Surabaya melawan Sekutu pada tanggal 10 November 1945. Menurut perintah Sri Sultan agar para kyai itu dikawal sendiri oleh KRT. Suryaningrat ke Yogyakarta.

Pada 12 November 1945 sore, para kyai Gunungkidul yang seluruhnya berjumlah 28 orang termasuk pemimpinnya dibawa ke Ambarukmo. Waktu itu ada dua orang kyai yang tidak dapat mengikuti ke Yogyakarta yaitu Kyai Slametan dari Karangmojo dan kyai dari Gedaren Ponjong. Sesampai di Yogyakarta para kyai tersebut diterima oleh BPH Guntoro. Beliau yang membawa titah Sri Sultan. Adapun titah tersebut sebagai berikut: "Para kyai agar berjuang menurut jalan kebatinan, mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bangsa Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya dan Republik Indonesia terus berlangsung".

Para kyai setelah sampai di Yogyakarta di asramakan selama lebih kurang dua minggu. Setelah selesai melaksanakan tugasnya para kyai tersebut baru diperkenankan pulang ke daerahnya masing-masing. Sebagai pengganti para kyai di Gunungkidul ialah para kyai dari Kabupaten Bantul dan Sleman.

Asrama kyai waktu itu ditempatkan di Istana Ambarukmo bagian timur. Di tempat ini Sri Sultan Hamengku Buwono IX didampingi BPH. Bintoro menyampaikan titahnya kepada para kyai dan apa saja yang harus mereka lakukan selama di asrama itu. Setelah menyampaikan titah Sri Sultan bersama BPH. Bintoro meninggalkan Ambarukmo. Selanjutnya para kyai menyiapkan diri. KRT. Suryaningrat lalu menyusun staf terdiri atas lima orang termasuk kepala rombongan, sedangkan sisanya 23 orang dibagi menjadi tiga menurut alirannya masing-masing.

Setelah pembagian kelompok selesai, KRT. Suryaningrat memerintahkan kepada kyai untuk segera melaksanakan titah Sri Sultan menurut caranya masing-masing. Untuk itu setiap pagi para

kyai setelah melakukan tugas diwajibkan melapor apa yang telah diperolehnya pada malam hari itu. Jika mereka pada malam hari tidak ada atau belum ada firasat dari Yang Maha Kuasa, mereka tidak perlu memberikan laporannya. Setelah beberapa hari melaksanakan titah Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan berdasar laporan yang diterima KRT. Suryaningrat tugas para kyai dianggap telah cukup dan mohon diperkenankan menghadap Sri Sultan untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugas para kyai. Sri Sultan menerima laporan tersebut pada hari Jumat 16 November 1945 di Gedung Wilis. Waktu menghadap Sri Sultan, KRT. Suryaningrat disertai Kyai Sastropratomo, pengarem-arem Kamituwo Playen.

Sri Sultan menganggap tugas para kyai telah cukup, rombongan kyai dari Gunungkidul sudah boleh pulang ke tempat tinggalnya. Bersamaan itu datang menghadap Sri Sultan Jenderal Umar Joi mengajukan permohonan berhubung para kyai itu diminta bantuannya agar dapat membantu perjuangan di front, untuk menjadi tameng para pejuang bersenjata. Permohonan itu tidak seluruhnya dikabulkan, kecuali Kyai Sastropratomo agar mengikuti ke Jawa Timur, sedang yang lainnya diminta bekerja dengan olah kebatinan dan digaris belakang. Setelah melapor para kyai diperkenankan kembali ke Ambarukmo untuk menjalankan tugas baru sebagaimana dititahkan Sri Sultan.

Untuk tugas yang kedua ini rombongan kyai lalu dibagi menjadi empat agar lebih kuat dalam mengarahkan tujuannya. Satu rombongan mohon agar pihak luar negeri terutama Amerika Serikat dan Rusia suka membantu perjuangan kita bangsa Indonesia; kedua agar kapal laut musuh tidak mencapai sasarannya, ketiga agar kapal udara musuh tidak mencapai sasarannya pula, keempat agar pemuda kita selalu berhasil sasaran penyerangannya. Sejak itu para pejuang kita senantiasa minta petunjuk dan/atau saran dari rombongan kyai tersebut dan ternyata sesuai dengan tugas para kyai. Para kyai tersebut dalam usahanya menerima petunjuk dari Tuhan berupa petunjuk gaib antara lain dari mana para pemuda itu harus menyerang musuh.

Di samping itu dari mereka kadang-kadang diberi syarat-syarat oleh kyai sesuai dengan diterimanya. Dengan jalan demikian maka para pemuda dari Gunungkidul yang bukan anggota TKR pun turut bertempur di mana saja mereka diperlukan. Dari Gunungkidul banyak juga dikirim ke Magelang, Banyubiru, Ambarukmo, Sronдол, Surabaya dan lain-lainnya.

Selanjutnya sebelum Agresi Militer kedua terjadi pemberontakan PKI Madiun pada September 1948 Kabupaten Gunungkidul juga terkena imbasnya. Pada suatu hari sekitar pukul 17.00 tatkala Bupati sedang menemui tamu dari Yogyakarta yaitu K.R.T. Purwakusumo, SH dan rombongan, masuklah kepala polisi Wonosari, dan disusul oleh Sugaib dengan menarik revolver dengan tangannya gemetar tidak jadi-jadi. Margono lurah desa Nglora Paliyan yang akan mengayunkan pedang terhunus, tetapi lalu berdiri mematung saja; demikian juga Hadisukanto yang telah membawa panah dan akan dilepaskannya tetapi juga mematung saja, sedang diluar telah siap kurang lebih pemuda bersenjatakan *granggang* mengepung rumah Kabupaten Wonosari.

Dalam adegan yang demikian itu Sugaib menuntut supaya Bupati memerintahkan kepada polisi melepaskan istiajid yang ditahan oleh polisi. Setelah bupati memberi keterangan secukupnya tentang permasalahannya maka suasana ketegangan dapat diredakan dan pengepungan pemuda terhadap rumah kabupaten dibubarkan. Pemuda yang turut mengepung kabupaten akhirnya sadar hanya diperalat dan tertipu oleh orang-orang PKI. Pengusutan Istiajid berkaitan dengan penggelapan uang koperasi di mana dia menjadi pengurusnya. Pengadilan Negeri Wonosari memutuskan vonis dihukum kepada yang terlibat. Semula mau naik banding, tetapi belum sapa berlanjut meletuslah pemberontakan PKI Madiun, yang disambung dengan Clash II oleh Belanda.

Pada hari Senin malam 18 September 1948 kepala Polisi Wonosari memberitahukan kepada Bupati Gunungkidul bahwa ia mendapat perintah dari Kepala Polisi Daerah Yogyakarta untuk

menjalankan penangkapan pada orang-orang yang dicurigai berhubungan dengan kudeta di Madiun yang terjadi pada tanggal 18 September 1948. Setelah kepala polisi mengadakan perundingan dengan Bupati tentang orang-orang yang harus ditangkap lebih dahulu, mengingat alat-alat dan kekuatan yang ada, serta mengingat pula letak rumah orang-orang yang harus ditangkap, maka malam itu juga dijalankan penangkapan oleh Polisi Wonosari dan dibantu tentara terhadap orang-orang yang dianggap berbahaya.

Menurut dokumen yang diketahui di rumah Istajit, direncanakan 23 September 1948 PKI akan merebut kekuasaan di Wonosari, 24 September 1948 di Pracimantoro, 26 September 1948 Bantul, tanggal 27 September 1948 Sleman, lalu setelah itu dikonsentrasikan untuk merebut kota Yogyakarta. Selanjutnya BTI telah merencanakan pada hari Sabtu tanggal 25 September akan mengadakan rapat raksasa di Alun-alun Wonosari yang akan dikunjungi oleh rakyat tani dengan pemudanya yang diperintahkan supaya membawa segala macam senjata yang ada dan akan dipimpin oleh Istiajit untuk mengadakan demonstrasi. Rencana tersebut dapat dicegah karena dengan ditangkapnya Istiajit pada malam tanggal 19 September 1948. Orang-orang yang waktu itu bertanggung jawab mengadakan rapat raksasa menjadi kebingungan untuk mencabut perintah rapat raksasa yang telah tersebar luas itu.⁶⁷

Pada tanggal 22 September 1948 terdengar berita bahwa tanggal 24 September 1948 rumah Jamaah Patuk akan diserbu, dan pada malamnya keadaan di Semanu menjadi genting, tetapi berkat kecekatan pihak kepolisian segalanya dapat dicegah dengan selamat. Selanjutnya tanggal 23 September 1948 didapat berita dengan telepon dari Baran bahwa pada tanggal 21 September 1948 daerah Sukoharjo dan Wonosari telah diduduki oleh Pemerintah Tentara Rakyat (Musu), berturut-turut Wuryantoro tanggal 22 September 1948, Baturetno tanggal 23 September 1948, dan pracimantoro tanggal 24 September 1948.

Di Pracimantoro kelihatan musuh dengan kekuatan tentara bersenjata 40 orang mempunyai dua buah truk yang pada tanggal 25 September 1948 ditambah lagi dengan 20 orang, sehingga di Pracimantoro ada kekuatan 60 orang bersenjata lengkap, dan merupakan ancaman bagi daerah Gunungkidul yang sedang menjalankan pembersihan ke dalam, sedang kekuatan tentara dan polisi waktu itu belum cukup sama sekali untuk menghadapinya. Di sana hanya ada satu seksi kecil tentara dan satu seksi polisi yang bersenjata. Berhbug waktu itu bantuan dari Yogyakarta tidak segera datang, maka hanya dapat menjalankan provokasi ke daerah Pracimantoro, dan berkat Tuhan Yang Maha Esa berhasil, sehingga musuh yang semula akan mengadakan penyerbuan ke Wonosari menurut skema akan mengadakan persiapan untuk bertahan.

Pada 27 September 1948 ada penyidik musuh dengan naik mobil bersama dua orang bersenjata lengkap dari Pracimantoro menuju Baran ke arah Wonosari juga. Setelah sampai di muka kepolisian mereka ditangkap di Wonosari, mobilnya dapat disita, sedang penyidiknya segera dikirim ke Yogyakarta untuk diurus lebih lanjut oleh pihak militer.

Keadaan terus menghangat, sedangkan bantuan yang ditunggu dari Yogyakarta tidak datang juga. Untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi maka rakyat yang dipersenjatai apa adanya dengan didukung oleh orang-orang yang mampu dan suka rela saja. Pada tanggal 30 September 1948 datang Sri Paduka Paku Alam VIII dengan pengiringnya meninjau keadaan Gunungkidul, sehingga dengan demikian beliau secara langsung dapat melihat sendiri situasi di Gunungkidul dan sekitarnya. Beliau berada di Gunungkidul sampai dengan tanggal 2 Oktober 1948, sebab waktu beliau tiba di Semin lalu ada perintah dari Sri Sultan supaya beliau segera kembali ke Yogyakarta. Penewu (camat) Semin waktu itu adalah Lurah Wiladeg yang diangkat sebagai percobaan menjalankan tugas Penewu.

Pada tanggal 1 Oktober 1948 siang didapat kabar dari Semin bahwa di sebelah utara Semin terjadi pertempuran antara tentara hijrah dengan pengacau, dan sore harinya didapat kabar Manyaran di timur Semin ada kekuatan Tentara Rakyat (PKI Muso) satu kompi dan laskar campuran kurang lebih 800 orang, disusul laporan dari Nglipar yang menerangkan bahwa Penewu Nglipar yang pada waktu itu akan menghadiri rapat di Kelurahan Tegalejo diserobot oleh Pemuda Rakyat dari Klaten di bawah pimpinan Kariyosudarmo bekas Kepala Jawatan keamanan Nglipar yang melarikan diri pada waktu diadakan penangkapan para pemimpin Front Demokrasi Rakyat (FDR) dari PKI oleh Kepolisian Wonosari.

Berhubung adanya peristiwa ini maka anggota kepolisian yang masih terbatas itu dikirim 10 orang ke Nglipar menjaga keamanan dan ketertiban, sedang mantri Kabupaten Wonosari waktu itu juga dikirim untuk menjelaskan tugas Penewu Nglipar. Peristiwa sebagaimana terjadi di Nglipar juga dialami di tempat lain. Pada tanggal 2 Oktober 1948 Asisten Wedono Manyaran Semin diserobot, sedang di Ponjong Penewu dengan juru tulisnya serta beberapa pegawai lainnya diculik kaum pengacau. Untuk itu segera dikirim bantuan polisi mengatasi keadaan di Ponjong tersebut.

Pertempuran seru antara kaum pemberontak dengan pasukan MA di Pracimantoro dimana kekuasaan tentara pengacau tersebut berkekuatan kurang lebih 400 orang, sedang di pihak pemerintah tidak seimbang dengan mereka. Oleh karena itu diatur siasat mundur sampai di Semanu karena ada kekhawatiran diputus musuh di Bedoyo. Dalam pertempuran ini kedua belah pihak jatuh korban, seorang MA gugur, sedang pihak musuh 3 orang. Sejak itulah perhatian dari Yogyakarta semakin besar, dan dikirim tentara serta polisi terus mengalir. Penculikan terhadap Penewu Nglipar berkat kegesitan alat negara dan mendapat bantuan rakyat dapat meloloskan diri dari tahanan mereka. Daerah-daerah yang telah dikuasai oleh kaum pengacau dapat direbut kembali.

Peristiwa yang kaitannya dengan pemberontakan PKI di berbagai tempat silih berganti. Baran suatu daerah ujung tenggara

Wonosari dan berbatasan dengan Wonogiri menjadi genting, sehingga hal itu mengharuskan pengiriman bantuan polisi dan tentara dari Yogyakarta ke daerah tersebut. Semanu dijadikan markas pertahanan, demikian juga pasukan kita ditempatkan di Ngenep, sedang kekuatan yang lebih besar lagi ditempatkan di Semin. Berita lolosnya Penewu Ponjong dari sekapan pengacau bersamaan pegawai-pegawainya membuat gembira penduduk wilayah setempat. Namun di Kabupaten Wonosari didatangi para pengungsi dari Pracimantoro dan Giritontro.

Dengan adanya berita pertumpahan darah di Kabupaten Gunungkidul, maka pada tanggal 7 Oktober 1948 Sri Sultan datang ke Wonosari. Setelah bupati menyampaikan laporan, secara lisan Sri Sultan memerintahkan sebagai berikut:

1. Bupati diberi kekuasaan penuh untuk memilih dan mengisi semua lowongan pegawai sampai pangkat penewu dan langsung bertugas, sedang surat keputusannya menyusul.
2. Daerah Surakarta yang terputus hubungannya dengan pusatnya supaya terus dipimpin untuk sementara dan dijamin pegawainya.

Berkat kerja sama yang baik antara pihak kepolisian, tentara dan rakyat maka kaum pemberontak dari berbagai daerah dapat dipatahkan. Wuryantoro, Pracimantoro, Baturetno, yang selalu menjadi sasaran kaum pemberontak akhirnya dikuasai sehingga kaum pengacu dihalau menuju Pacitan. Sedang penangkapan terhadap orang-orang yang dipandang membahayakan berjalan terus. Bantuan dari Yogyakarta sejumlah 250 orang kekuatan angkatan bersenjata dan 12 orang mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian didatangkan ke Gunungkidul. Dalam upaya penangkapan terhadap tokoh PKI ada juga yang dapat meloloskan diri dari kejaran tentara kita.

Akibat pemberontakan PKI Muso yang berpusat di Madiun itu, Kabupaten Gunungkidul yang juga menjadi daerah pengaruh Front Demokrasi Rakyat suatu organisasi yang berbau komunis itu akhirnya mengalami kerugian besar di kalangan pegawai.

Dilaksanakanlah perubahan di kalangan Pamong Praja. Pembentukan Detasemen Polisi Pamong Praja di setiap kecamatan diperintahkan supaya sudah terbentuk tanggal 1 Januari 1949. Kekuatan angkatan bersenjata yang telah melaksanakan tugasnya mengamankan Gunungkidul dari ancaman PKI telah ditarik kembali ke kesatuannya.

Keadaan ekonomi akibat kekacauan yang didalangi PKI itu membawa suasana kocar-kacir. Beras boleh dikata tidak ada, karena dikuras waktu terjadi aksi PKI Muso. Jawatan PPBM (Pengumpulan dan Pembagian Bahan Makan) ternyata tidak ada gunanya, bahkan sering menimbulkan kegelisahan. Dalam waktu panen PPBM ternyata hanya dapat mengumpulkan gaplek kurang lebih 150 ton dengan harga di atas umum, yaitu Rp. 1.500 per ton. Sedang harga pasaran paling tinggi Rp. 1.400.

Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 1948 sekitar pukul 06.45 dengan mendadak Belanda melancarkan agresi kolonial terhadap ibukota Republik. Agar supaya pemerintah tidak jatuh ke tangan musuh, maka Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta memutuskan memindah kekuasaannya kepada Mr. Sjafrudin Prawiranegara yang saat itu berada di Sumatra untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukittinggi. Adapun menteri-menteri negara lainnya keluar dari Kota Yogyakarta untuk melanjutkan perlawanan kepada Belanda. Mereka itu yang menyingkir ke Kabupaten Gunungkidul adalah Menteri I.J. Kasimo, Supeno, Leimena, Susanto Tirtoprojo.

Pada waktu itu Sri Sultan Hamengku Buwono IX telah memerintahkan kepada Honggowongso untuk mempersiapkan Gunungkidul khususnya Wonosari sebagai daerah pengungsian, dan secara kebetulan pula oleh pemerintah Republik Indonesia telah diputuskan untuk mengungsikan pemerintahan dan pasukan bersenjata ke luar kota Yogyakarta. Pasukan itu dipimpin Panglima Jenderal Sudirman telah menuju ke arah timur sampai Wonosari. Perjalanan memimpin gerilya ini beliau lakukan setelah membakar dokumen-dokumen agar jangan sampai jatuh ke tangan musuh.

Kira-kira pukul 11.30 Pak Dirman berangkat meninggalkan Bintaran menuju Kadipaten melalui Mergangsan, Gading dan Alun-alun selatan. Di sini beliau beristirahat selama satu jam dan kira-kira jam 14.00 Kolonel Abdul latief Komandan KMK Yogyakarta datang dan melaporkan bahwa Belanda sudah menyerbu dan masuk kota. Beliau disarankan segera ke luar kota untuk menghindarkan diri dari penangkapan Belanda. Oleh karena itu dalam kondisi yang masih sakit beliau pergi meninggalkan kota Yogyakarta menuju ke arah timur melalui Wonosari sebagaimana disebut di muka.

Untuk menghadapi serangan Belanda itu Panglima Komando Jawa Kolonel AH. Nasution menyusun konsep bahwa seluruh rakyat harus terlibat dalam perang melawan Belanda. Mereka dibagi-bagi menurut bidangnya masing-masing yang merata di segala lapangan.

Mengenai pendaratan Belanda ke Gunungkidul waktu itu dari dua arah yaitu dari timur melalui Eromoko. Di samping itu Belanda juga melakukan pendaratan lewat lapangan kapal terbang Gading. Pada tanggal 19 Desember 1948 daerah Gunungkidul terutama Gading dan sekitarnya mulai pukul 06.00 mendapat serangan dari udara dan yang membawa korban 5 orang tewas dan 2 orang luka-luka. Dengan adanya peristiwa yang mendadak itu maka dari kabupaten terus mengadakan hubungan dengan Yogyakarta via telepon yang memperoleh keterangan bahwa kota Yogyakarta mendapat serangan Belanda terus menerus. Waktu itu hubungan telepon dengan Yogyakarta hanya dapat berjalan selama satu jam setelah itu terputus. Pada puku 10.00 pagi Kabupaten Wonosari mendapat telepon dari Yogyakarta bahwa Belanda melakukan serangan disertai pendaratan pasukan payung. Berita ini terus disebarluaskan ke kecamatan-kecamatan.

Pada malam harinya Bupati mendapat perintah dari KDM untuk menyingkirkan keluarga dengan membawa apa saja yang dapat diselamatkan. Juga supaya menyingkirkan alat-alat kantor yang dianggap vital agar dapat dipergunakan dalam pengungsian.

Sementara para pegawai menjalankan perintah KDM, Bupati memanggil rapat MPR. Sesuai dengan instruksi rapat MPK dipimpin oleh komandan KDM, sedang instansi bekerja seperti sedia kala. Hanya mengenai pertahanan pimpinan pindah dari tangan Bupati ke tangan Komandan KDM.

Dalam suatu rapat telah diterangkan bahwa sewaktu-waktu seluruh pegawai harus meninggalkan kota Wonosari, karena ada kekhawatiran menurut dokumen yang dapat diterima di Wonosari bahwa Belanda akan menurunkan pasukan payungnya di sekitar Gading, Wonosari atau Semanu. Berhubung dengan adanya berita dari dokumen itu maka diputuskan dalam MPR supaya Bupati segera menyerahkan gaji pegawai untuk bulan Januari dan Februari 1949 tanpa memandang Daerah Istimewa Yogyakarta (kasultanan) atau Republik. Oleh karena itu pada malam hari itu juga para pegawai sibuk, menyingkirkan peralatan kantor.

Sebagai siasat jika Gunungkidul diserbu musuh (Belanda), maka telah diputuskan pemerintah akan dibagi dua yaitu:

1. Di sebelah utara jalan Patuk - Bedoyo akan dipimpin oleh wedana Projopawiro dengan staf separuh dari pegawai kabupaten, instansi lainnya dan polisi.
2. Di sebelah selatan jalan Patuk - Bedoyo dipimpin oleh bupati sendiri dan kepala polisi dengan staf sisa pegawai yang ada.

Bupati mempunyai Wakil Wedana Prajapuspito dan Kepala Polisi diwakili oleh seorang Inspektur Polisi Klas II, dengan tujuan agar Bupati dengan Kepala Polisi selalu dapat berdampingan dengan pimpinan militer. Untuk itu telah ditetapkan pula urut-urutannya pergantian pimpinan jika ada kemungkinan salah seorang pemimpin tertangkap musuh atau gugur.

Tanggal 10 Maret 1949 merupakan peristiwa penyerbuan Belanda ke Gunungkidul. Waktu itu pagi-pagi telah terdengar arah kapal terbang dengan jumlah banyak, disusul oleh tembakan miltrayur dan ledakan yang terang dari arah lapangan terbang

Gading dan di atas Kota Wonosari dan terus meluas sampai di Semanu, Sodo dan ke barat sampai Paliyan. Setelah tembakan mitralyur dan pemboman dari udara lalu disusul tembakan revolver di bawah dari arah lapangan terbang Gading ke Wareng, kemudian disusul lagi tembakan gencar ke arah bekas kantor Bupati di Seneng.

Pada kira-kira pukul 09.00 kelihatan kapal terbang, dan Bupati yang mengungsi di Desa Pulutan dalam perjalanan ke kantor kabupaten di Desa Karangkuang kurang lebih satu kilometer Kota Wonosari mendengar teriakan orang bahwa Belanda telah menurunkan pesawat di bulak sebelah utara tempat pengungsian dalam jarak \pm 500 m dan di sebelah baratnya dalam jarak \pm 300 m yang berjumlah kurang lebih 60 orang. Setelah mendengar berita itu Bupati bersiap diri untuk meninggalkan tempat sambil memperingatkan para keluarganya untuk mengamankan diri. Bupati menganggap kepentingan negara dan bangsa harus didahulukan dari pada kepentingan pribadi atau keluarganya. Oleh karena itu walau dalam masa penting itu harus berpisah dengan keluarga bukanlah menimbulkan pemikiran yang utama. Maka Bupati diikuti oleh R.W. Projopuspito dan juga juru tulisnya bernama Surana terus menuju Desa Pulutan kurang lebih 2 km dari tempat pengungsian lama. Di Pulutan Bupati bersembunyi di suatu rumah kecil sambil melihat kapal terbang terus berputar sambil memuntahkan tembakan sampai pukul 18.00.

Dari tempat persembunyiannya di Pulutan itu dapat diketahui bahwa Belanda telah mengadakan patroli serta penyerbuan ke Desan Karangmojo dan membakar rumah di Desa Grogol. Pejuang kita lalu membumihanguskan Kecamatan Paliyan. Taktik ini dilakukan oleh pejuang kita agar jangan sampai dijadikan markas Belanda. Di sebelah timur Belanda terus menyerbu Desa Wareng dan sekitarnya, sedang ledakan bom terus terdengar dari arah Gading. Dengan penyerbuan itu orang-orang meninggalkan tempat tinggalnya masing-masing dan mencari tempat yang dianggap aman.

Di dalam serangan udara yang terus menghebat itu sambil menurunkan payungnya di sekitar tempat pengungsian Bupati di Pulutan bergerak menuju Wonosari dan Playen. Di samping itu ada juga yang menuju ke Karangmojo. Berdasarkan laporan yang dikirim bahwa Belanda pada kira-kira pukul 10.00 menduduki dan mendirikan pos di Karangmojo dan berpatroli sampai Desa Cangkring, Kelurahan Karangasem. Desa Tahunan yang merupakan pusat pemerintahan Kapanewo Paliyan dikosongkan, dan orang-orangnya mengungsi masuk ke hutan. Rumah Sinder dan Camat dibakar. Pemerintahan Kecamatan Paliyan dipindahkan ke Desa Kepek di Paliyan. Jembatan yang menghubungkan Desa Karangmojo ke Desa Cangkring dibakar rakyat yang dipimpin oleh KODM, yaitu Sukardi dan Sukarno agar dapat menghambat penyerbuan Belanda.

Penyerbuan Belanda tidak terbatas dalam Kota Wonosari saja, tetapi juga menduduki Semanu, menyerang Karangmojo yang terletak di sebelah timur Wonosari. Bahkan di tempat ini pernah diserang dari udara oleh Belanda. Waktu itu di Karangmojo sedang ramai-ramainya orang di pasar, tak lama kemudian datang kapal terbang berputar-putar menghujani bom di pasar tersebut. Sebelum itu mata-mata Belanda dari arah Semanu dengan melalui tegalan-tegalan memberi tanda isyarat dengan memberi cermin kepada kapal terbang Belanda. Melihat gelagat penyerbuan itu maka Pak Candu sebagai anggota KDM di Karangmojo telah memerintahkan agar pasar hari itu segera bubar. Rupa-rupanya perintah itu kurang mendapat perhatian dari orang-orang yang sedang berada di dalam pasar tersebut. Kemudian tidak lama dari peringatan dan informasi itu menyeranglah Belanda dari udara sehingga di pasar itu ada beberapa orang jatuh korban kena tembak serta pecahan bom yang dijatuhkan oleh Belanda. Kiranya dapat dipahami mengapa Belanda menyerang ke berbagai kecamatan di Gunungkidul karena di daerah inilah dianggap tempat persembunyian para pembesar pemerintahan termasuk Panglima Besar Jenderal Sudirman.

Ketegangan itu dirasa pula oleh para ulama dan pengikutnya yang tergabung dalam badan perjuangan MUAPS. Adanya ketegangan yang semakin memuncak mengakibatkan inisiatif dari para ulama untuk menyusun kekuatan guna menghadapi kemungkinan serangan pasukan Belanda ke wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Kekuatan ulama yang tergabung dalam badan perjuangan MUAPS di dalam menyusun kekuatan di Kabupaten Gunungkidul dipusatkan di Kecamatan Panggang dengan M. Hani sebagai imam. M. Hani dalam menyusun kekuatan dibantu oleh Harun Al-Rosyid sebagai komandan pertempuran dan Mawardi sebagai wakil komandan pertempuran. Mereka di dalam menyusun kekuatan membagi pengikutnya menjadi kelompok-kelompok di seluruh Kecamatan Gunungkidul kecuali di Kecamatan Tepus dan Rongkop untuk dilatih kembali dalam cara bergerilya melawan pasukan Belanda. MUAPS dalam usahanya itu mengadakan kerja sama dengan Komando Distrik Militer III (KDM III) yang terdiri atas 10 Komando Onder Distrik Militer (KODM) di kecamatan-kecamatan Wonosari, Playen, Nglipar, Patuk, Semin, Karangmojo, Ponjong, Semanu, Paliyan dan Panggang. Kegiatan yang dilakukan oleh seksi MUAPS itu adalah menyediakan logistik, menjaga keamanan dan ketentraman, serta mengikuti gerilya.⁶⁸

Dengan simbol-simbol yang melekat pada diri ulama dan pasukan bersenjata APS, maka mereka memiliki kekuatan yang mampu melawan serangan pasukan Belanda. Hal ini nampak ketika pasukan Belanda mengadakan serangan udara terhadap lapangan Gading pada akhir bulan Desember 1948 dan selanjutnya pada tanggal 21 Februari 1949 dengan melakukan pemboman terhadap pendopo kabupaten, kekuatan ulama dan pasukan bersenjata APS dapat bersatu padu mampu melawan serangan pasukan Belanda. Akan tetapi pada tanggal 9 Maret 1949 pasukan Belanda mengadakan serangan dan berhasil menduduki kota Wonosari. Pada pagi hari pasukan Belanda menurunkan pasukan payung di lapangan Gading dan sekitarnya, serta mengadakan serangan dari tiga jurusan yaitu dari arah timur mereka masuk

dari Pracimantoro, Rongkop, Semanu, dan Karangmojo. Serangan dengan pesawat udara mendaratkan pasukan payung, sedangkan dari arah barat mereka masuk dari Imogiri menuju ke lapangan terbang Gading di Kecamatan Playen.

Serangan pasukan Belanda di Kabupaten Gunungkidul pada dasarnya dimaksudkan untuk mencari pimpinan pemerintah Republik Indonesia yang menyelamatkan diri dari serangan pasukan Belanda di Yogyakarta, karena menurut perkiraan Belanda para pemimpin itu berada di Kabupaten Wonosari dan sekitarnya guna melanjutkan jalannya pemerintah Republik Indonesia.

Pasukan Belanda di Kabupaten Gunungkidul sebagian besar mendirikan pos-posnya di Kota Wonosari dan di Kecamatan Playen. Oleh karena itu, daerah tersebut selalu menjadi sasaran utama dari gerilyawan baik yang terdiri atas pasukan bersenjata APS maupun pasukan TNI yang ditugaskan di wilayah tersebut. Demikian sebaliknya pasukan Belanda selalu mencari markas-markas gerilyawan yang berada di Kabupaten Gunungkidul. Markas pasukan bersenjata APS di Kedungpring, Kecamatan Wonosari, ketahuan pasukan Belanda dan selanjutnya pada tanggal 9 Maret 1949 markas itu mendapat serangan pasukan Belanda. Dalam menghadapi serangan pasukan Belanda itu telah gugur empat anggota pasukan bersenjata APS yaitu M. Bahrom dari Blawong Wonokromo, Abdul Djabar, Ahmat Hisyam dan M. Bustan Sjah bin M. Suratin (kakak beradik), ketiganya berasal dari Karangkajen.⁶⁹

Dengan terdengarnya berita persetujuan Roem-Royen di KMB terdengar di Gunungkidul pada 8 Mei 1949, suatu pembicaraan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda tentang pengembalian Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta. Pada 27-28 Mei 1949 RW. Projopuspito dipanggil ke Kepatihan Yogyakarta untuk mewakili Bupati menghadiri rapat. Pulangnya tanggal 30 Mei 1949 disertai dua orang Bupati Anom yang berkewajiban membantu Bupati Gunungkidul. Setelah RW.

Projopuspito mengadakan laporan tentang hasil rapat maka sehari kemudian tanggal 31 Mei 1949 diadakan rapat dengan memanggil para Wedana sektor untuk membicarakan persiapan pengembalian Kota Wonosari. Setelah selesai rapat para Wedana sektor kembali ke tempat masing-masing, sedang RW. Projopuspito bersama dengan kedua orang Bupati Anom menuju ke Giring untuk membicarakan dengan Bupati dan Markas Militer Kabupaten dalam rangka mendekati kantor dengan Kota Wonosari.

Dalam perundingan di Giring diputuskan bahwa Bupati dan Komandan KDM menunggu di Kepek. Sedang menurut perintah tempat menunggu adalah Siraman untuk masuk Kota Wonosari. Dengan adanya perubahan rencana penarikan tentara kolonial Belanda, maka telah diperhitungkan pula jarak antara kurir dari Wonosari dengan Bupati, dan perjalanan Bupati ke pos menunggu perintah masuk Kota Wonosari.

Sampai terlaksananya perintah penarikan Belanda dari Gunungkidul, Bupati telah mengirim kurir ke Kota Yogyakarta untuk menerima perintah sampai empat kali, tetapi yang ketiga kalinya terpaksa kembali di tengah jalan, karena setelah sampai di batas kota terjadi pertempuran yang tidak memungkinkan masuk Yogyakarta. Kurir yang keempat kalinya kembali tanggal 24 Juni 1949 pagi pukul 06.30 dengan membawa surat perintah yang menyebutkan bahwa Bupati, Tentara dan Polisi pada tanggal 24 Juni 1949 pukul 10.00 supaya berada di Siraman menunggu perintah masuk Kota Wonosari. Perintah tersebut diberitahukan kepada Komandan KDM, Kepala Polisi dan Komandan Tentara Mobil yang telah berada di Siraman, sedang Camat dan Lurah Wonosari lalu berangkat menghampiri Bupati Anom yang diperbantukan di Gunungkidul. Pembesar-pembesar yang berwenang akan turun di Gading sekitar pukul 10.00 – 11.00 dan diminta supaya menyediakan minuman dan makanan ringan, sebab Sri Paduka Paku Alam VIII akan datang sendiri di Siraman dengan UNCI (United Nations Committee for Indonesia pengganti Committee of good offices yang dikenal sebagai Komite Tiga Negara)

Setelah sampai di Siraman telah siap Komandan Mobil Soejono, Kepala Polisi dan para pejabat lainnya. Tidak lama setelah kedatangan Bupati di Siraman, menyusul pula kedatangan Komandan KDM sehingga persiapan untuk menunggu kehadiran Sri Paduka Paku Alam VIII dirasakan cukup dan tinggal menunggu saja. Dan dalam waktu menunggu ini datanglah kurir yang membawa surat dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk Mayor Soejono yang isinya supaya masuk Kota Wonosari. Untuk itu pada tanggal 25 Juni 1949 dengan pesawat terbang Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang disertai Kolonel Van Langen dan anggota UNCI, beberapa pejabat dan wartawan tiba di lapangan Gading. Kemudian terjadilah upacara serah terima di Desa Siraman Wonosari, Sri Sultan Hamengku Buwono memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa atas kerjasama yang baik dengan Komisi Tiga Negara, maka seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Gunungkidul diserahkan kepada Indonesia kembali. Untuk itu penarikan Belanda ini dimulai dari Wonosari. Upacara ini sederhana tetapi mempunyai makna yang sangat penting dalam lembaran sejarah perjuangan bangsa kita dalam menghadapi penyerbuan Belanda. Hadir dalam upacara itu di samping wakil Belanda Walf Staff, Kolonel Van Langen dari UNCI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Bupati Wonosari, KRT. Suryaningrat Komandan KDM, Camat, Lurah dan undangan lainnya.

Penarikan Belanda dari Gunungkidul ini merupakan titik tolak rakyat memperbaiki hidupnya dengan melanjutkan pembangunan. Penderitaan telah lama menghimpit tidak ada habisnya, maka bermula dari penarikan Belanda yang mengambil tempat di pertigaan Jalan Siraman ini berarti berakhirlah pendudukan Belanda di Indonesia. Dengan demikian Gunungkidul merupakan tempat yang penting untuk dicatat dalam lembaran sejarah perjuangan Indonesia.

CATATAN BAB IV

1. Barahmus, *Yogya Benteng Proklamasi*, hlm. 44-45
2. *Ibid.*
3. Wawancara dengan H Haiban Hadjid di Kauman Yogyakarta, tanggal 30 Juli 1999.
4. *Himpunan Informasi Sejarah penyerbuan Kotabaru*. Yogyakarta: Barahmus DIY, 1979. Hlm. 1-30.
5. Wawancara H. Haiban Hadjid di Kauman Yogyakarta 30 Juli 1999. Wawancara H. Hanif Aziz di Suronatan 31 Juli 1999.
6. Nur Aini "Peranan Angkatan Perang Sabil dan Hisbullah Dalam Perjuangan Bersenjata RI, *Media Inovasi*, No. 8, VI, Agustus 1994, hlm. 46.
7. Suratmin, *Askar Perang Sabil Sebagai Kekuatan Sosio Religius Dalam Masa Revolusi Phisik di DIY 1945-1949*. Yogya: Jarahnitra, 1994/1995, hlm. 24.
8. Wawancara dengan H. Haiban Hadjid di Kauman Yogyakarta, 30 Juli 1999.
9. *Replika Sejarah Perjuangan Rakyat Yogyakarta*. Yogya: Dinas Sosial Prop. DIY, 1983, hlm. 80-85.

10. Dinas TNI-AD. Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI AD. Bandung: Fa. Mahyuma, 1972, hlm. 134.
11. Suratmin, *Op.Cit.*, hlm. 52.
12. Wawancara dengan Surat Buyanto, di Tegallayang Bantul, 5 November 1999.
13. Nur Aini, *Op.Cit.*, hlm. 11.
14. Wawancara Surat Buyanto, di Tegallayang Bantul, 5 November 1999.
15. Wawancara dengan Warso Warsito, di Gayam Ringinhardjo, 15 November 1999.
16. Wawancara dengan H. Haiban Hadjid di Kauman Yogyakarta, 30 Juli 1999.
17. Sartono Kartodirdjo, "Wajah Revolusi Indonesia Dipandang dari Perspektif Struktural", *Prisma*, 8, Agustus 1981, hlm. 4.
18. Abdoerrasef, *Komunisme Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971, hlm. 13-20.
19. Abdurrachman, *Laskar Angkatan Perang Sabil Yogyakarta 1948-1949*. Yogya: Lembaga Research dan Survay IAIN Sunan Kalijaga 1983. Hlm. 20-27.
20. *Peristiwa Pemberontakan PKI Madiun*, Jawa Pos, September 1999, hlm. 3.
21. Wawancara dengan Dahroni di Sedayu, 15 Desember 1999.
22. Suratmin, *Op.Cit.*, hlm. 58.
23. Wawancara dengan Mahmud TL di Bejen Bantul 2 Desember 1999.
24. Buku Gerilya Wehrkreise III. Hlm. 9-10 dan wawancara dengan Haiban Hadjid di Kauman Yogyakarta 30 Juli 1999.

25. A.H. Nasution. Pokok-Pokok Gerilya dan Pertahanan Republik Indonesia di Masa Lalu dan yang Akan Datang. Bandung: Angkasa, 1980, hlm. 120-124.
26. Wawancara Haiban Hadjid di Kauman Yogya 30 Juli 1999.
27. Wawancara dengan KH. Zainal Abidin Munawir, di Krapyak, 18 Desember 1999.
28. Wawancara Ibu Yuwariah Suhardiah, Yogyakarta, 13 November 1999.
29. Penjelasan Rama Sandiwan Pr. Dalam Seminar Sejarah dengan tema Peranan Generasi Muda dalam Perjuangan Bangsa 1942-1950, tanggal 20-21 Desember 1989.
30. *75 Tahun Jamaat Kristen Jawa Sawo Kembar Gondokusuman Yogyakarta*. Yogyakarta: Majelis Gereja Kristen Sawo Kembar, 1988, hlm. 58.
31. G. Moedjanto dkk. *Sejarah Gereja Kotabaru*. Yogya: Panitia Pengetan 50 Th, 1976, hlm. 50-60.
32. Wawancara dengan Warso Warsito di Gayam Bantul 12 November 1999.
33. Wawancara dengan Sunardjo, di Kuncen, 13 November 1999.
34. A.H. Nasution, Pokok-Pokok gerilya. *Op.Cit.*, hlm. 17.
35. Wawancara dengan Surat Buyanto di Tegallayang Bantul, 5 November 1999.
36. Wawancara dengan Soenardjo, di Kuncen 5 November 1999.
37. Wawancara dengan Moh. Ridwan di Wonokromo, Bantul, 22 Agustus 1999.
38. Wawancara dengan Moh. Ridwan di Wonokromo, Bantul, 22 Agustus 1999.

39. Departemen Agama RI. *Op.Cit.* hlm. 31.
40. Suratmin. *Op.Cit.*, hlm. 27.
41. Wawancara dengan KH. Ahmad Badawi Kholol di Deresan Ringinhardjo, Bantul, 16 November 1999.
42. Suratmin, *Op.Cit.*, hlm. 33.
43. Wawancara dengan Surat Buyanto, di Tegallayang Bantul, 17 November 1999.
44. Wawancara dengan Jumairi Yasir, 2 November 1999.
45. Suratmin, *Op.Cit.*, hlm. 68.
46. Wawancara dengan KH. Ahmad Badawi Kholil di Ringinhardjo Bantul, 15 November 1999.
47. Wawancara dengan Surat Buyanto, di Tegallayang Bantul, 5 November 1999.
48. Wawancara dengan KH. Makhfud Kholil, di Kedungsari Pajangan, Bantul, 5 Desember 1999.
49. Suratmin, *Op.Cit.*, hlm. 71.
50. Arsip milik Bapak Haiban Hadjid berupa naskah ketik (unpublished) th 1999.
51. Buku Gerilya Wehrkreise III, hlm. 78.
52. Wawancara dengan Hamdani, di Berjo, Sidoluhur, Godean Sleman, tanggal 2 Desember 1999.
53. Wawancara dengan Ardanie Zainal di Moyudan Sleman, tanggal 2 Desember 1999.
54. Wawancara dengan Djuzan Mursidi di Kauman Yogyakarta, tanggal 7 Desember 1999.

55. Wawancara dengan Yunus di Sleman, tanggal 7 Desember 1999.
56. Riwayat Singkat Perjuangan KH. Muhdi (dokumen unpublished)
57. Wawancara dengan KH. Asyari Hasyim, di Gemutu, Sukoharjo, Ngaglik Sleman, 31 November 1999.
58. Wawancara dengan Muhrodi, di Krapyak Wedomartani Sleman, 31 November 1999.
59. Ahmad Syafi'I Ma'arif . Islam dan Masalah Kenegaraan. Jakarta: (P3ES, 1985, hlm. 95-97.
60. Wawancara dengan KH. Barmawi, di Kiyudan, 29 November 1999.
61. FX. Suyam dkk. *Setengah Abad Gereja Santo Petrus dan Paulus Klepu: Sejarah dan Umatnya*. Panitia Peringatan Setengah Abad. (Naskah ketik), hlm. 10-40.
62. Wawancara dengan Suyadi di Kulonprogo, 5 November 1999.
63. Wawancara dengan Haiban Hadjid di Yogyakarta, 30 Juli 1999.
64. Wawancara dengan D. Suhaimi di Kulonprogo, 5 November 1999.
65. Wawancara dengan Soeyono di Boro Kulonprogo, 30 Agustus 1999.
66. Wawancara dengan Ny. Soeyono di Boro Kulonprogo, 30 Agustus 1999.
67. *Peristiwa-Peristiwa Revolusi di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Balai Kajian Jarahnitra Yogyakarta, 1992/1993, hlm. 108-120.
68. *Ibid.* lihat juga Suratmin, *Op.Cit.*, hlm. 74.
69. Nur Aini Ismoyo, *Op.Cit.* hlm. 90-100.

BAB V

PENUTUP

“Allaahuma inna nasluka Salamatan ‘alainaa kamaa lal mutaabitati fii sihhatin wasalaamatan min daaridunyaa ilaa daaril aahirati”

Artinya:

Ya Allah, kami mohon pada Mu, semoga kami selalu sehat dan afiat serta selamat di dunia akhirat.¹

Doa tersebut di atas termasuk salah satu doa yang senantiasa dibaca oleh umat Islam dimana saja mereka berada. Apakah mereka itu termasuk pejuang, rakyat biasa, petani, pedagang dan sebagainya, asal mereka mengaku sebagai muslim dan muslimah, sudah barang tentu setiap saat mereka akan membaca doa tersebut sebagai permohonan kepada Allah SWT. Doa tersebut termasuk salah satu doa yang diajarkan, dintuntunkan, dianjurkan dan dinasehatkan para ulama kepada para santrinya untuk senantiasa dibaca dan diamalkan agar selamat di dunia dan di akhirat.

Pada penutup tulisan ini, setelah kita mengikuti uraian pada bab-bab di muka, penulis mencoba merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengertian ulama yang kami maksud dalam kajian ini tidak menekankan pada keterkaitan satu agama tertentu tetapi

lebih menekankan keterkaitan kepada berbagai tokoh agama yang memiliki otoritas kharismatik dan mempunyai pengaruh yang kuat di lingkungan masyarakat, bahkan mereka mampu menggerakkan masyarakat untuk kepentingan tertentu termasuk di dalamnya gerakan-gerakan politik melawan penjajah.²

2. Periode masa Perang Kemerdekaan 1945-1949) yang juga populer dengan nama periode Revolusi fisik adalah suatu periode yang penuh gejolak, ledakan kekerasan, konflik sosial, perjuangan politik, dan segala sesuatu menimbulkan krisis politik yang membawa desintegrasi orde sosial lama serta merombak struktur kekuasaannya sehingga akhirnya melahirkan orde sosial politik baru.³
3. Dari kajian ini menunjukkan bahwa para ulama dalam periode Perang Kemerdekaan (1945-1949) mempunyai benang merah yang panjang dalam perjuangan, baik perjuangan pada periode sebelumnya maupun pada periode sesudah Perang Kemerdekaan. Para ulama senantiasa mempunyai andil dan peran yang besar pada setiap perjuangan, baik perjuangan merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan maupun mengisi kemerdekaan.
4. Keterlibatan para ulama khususnya dalam periode perang kemerdekaan (1945-1949) disamping terlibat secara langsung diberbagai medan pertempuran, sehingga banyak yang gugur sebagai syahid, juga adakalanya mereka memberi bekal doa, petunjuk, nasehat dan sifat “kandel” kepada para pejuang. Doa, petunjuk dan sifat “kandel” dari para ulama dan kyai ini ternyata mampu memantapkan tekad dan mengobarkan semangat perjuangan para santri dan pejuang dalam medan pertempuran.
5. Perjuangan para ulama dalam masa revolusi mempertahankan kemerdekaan ternyata di samping mengandung nilai kepahlawanan juga mengandung nilai-nilai luhur yang perlu

diteladani seperti misalnya nilai gotong-royong, nilai persatuan dan kesatuan, nilai rela berkorban tanpa pamrih dan sebagainya.

Mengingat begitu besarnya jasa-jasa para ulama dalam masa Perang Kemerdekaan atau masa revolusi fisik, maka sudah sepantasnya apabila pemerintah memberikan penghargaan yang setimpal dengan bobot perjuangannya. Di samping itu dalam situasi sekarang dimana bangsa Indonesia sedang dilanda berbagai krisis baik krisis ekonomi maupun krisis politik yang mendorong terjadinya deintegrasi bangsa, maka para ulama tetap dituntut untuk tampil dan berperan dalam memecahkan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa yang sangat mendesak. Tidak hanya doa, nasehat dan petunjuk dari para ulama, tetapi hendaknya para ulama harus tampil dan terlibat langsung dalam mengupayakan terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini telah dibuktikan oleh bangsa Indonesia dimana dalam era reformasi salah seorang ulama terpilih sebagai Presiden, yakni KH. Abdurrahman Wahid.

Semoga Presiden Abdurrahman Wahid, sebagai seorang ulama mampu dan berhasil memimpin bangsa Indonesia mencapai cita-cita dan tujuan proklamasi yakni terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan diridhoi Allah SWT. Amin.

**DAFTAR CATATAN BAB V
PENUTUP**

1. **Drs. Tashadi, dkk., Sejarah Perjuangan Hizbullah Sabilillah Divisi Sunan Bonang, cetakan I, penerbit Yayasan Bhakti Utama, Surakarta, bekerjasama Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Yogyakarta, tahun 1997, hlm. 204.**
2. **Sartono Kartodirdjo, Protes Movement In Rural Jawa: Lodon; Oxford University Press, 1975, hlm. 4-80. Lihat juga Sartono Kartodirdjo, Ratu Adil, Jakarta, Sinar Harapan 1984, hlm. 18. Lihat juga Sartono Kartodirdjo, Kepemimpinan dalam Sejarah Indonesia, Pusara, 1974.**
3. **Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo (Editor), Revolusi Perancis, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1989, hlm. V.**

SUMBER PUSTAKA

- Abdurrochman, *Laskar Angkatan Perang Sabil Yogyakarta 1948-1949*, Lembaga Research dan Survy IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1983.
- Ahmad Adaby Darban, dkk., *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengku Buwono IX*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, 1998.
- Ahmad Adaby Darban, *Fragmena Sejarah Islam di Indonesia*, Pustaka Irma, Yogyakarta, 1984.
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, P3ES, Jakarta, 1985.
- Barahmus, *Yogya Benteng Proklamasi*
- Buku Kenangan 50 Tahun Republik Indonesia di Yogyakarta, *Sebuah Lintasan Sejarah*, Panitia Gabungan Peringatan HUT RI ke 50 Kemerdekaan RI Bhakti Pertiwi Provinsi DIY, Tahun 1995.
- Ceramah Sultan Hamengku Buwono IX dihadapan generasi muda pada tanggal 18 Agustus 1986 di THR Yogyakarta (naskah tidak diterbitkan).
- Clifford Geertz, *Kebudayaan dan Agama* (terjemahan) Kanisius, Yogyakarta, 1992.

- Crome Brinton, *Anatomi Revolution*, Bharata, Jakarta, 1962.
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Quran, Jakarta, 1982/1983.
- Hermawan Sulisty, *Transformasi Kepemimpinan di Pesantren*, Pesantren No. I/vol VIII, P3M, Jakarta, 1981.
- Himpunan Informasi Sejarah Penyerbuan Kota Baru Yogyakarta dan Peristiwa-Peristiwa Penting di Yogyakarta Sekitar Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 1945, terbitan Museum Benteng Yogyakarta, Tahun 1998.
- Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, P3M, Jakarta, 1986.
- Memoar Perjoengan Menegakkan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, Yayasan Wiratama 45 Yogyakarta, 1985.
- Mudjanto, G, dkk., *Sejarah Gerakan Kotabaru Santo Antonius dan Kehidupan Umatnya*, Panitia Peringatan 50 Tahun Gereja Kotabaru, Yogyakarta 1976.
- Nasution, AH., *Pokok-Pokok Gerilya dan Pertahanan Republik Indonesia di Masa Lalu dan yang Akan Datang*. Angkasa, Bandung, 1980.
- Nur Aini, *Peranan Angkatan Perang Sabil dan Hisbullah Dalam Perjuangan Bersenjata RI*, Media Inovasi, No. 8, VI, Agustus, 1994.
- Peristiwa-Peristiwa Revolusi di Tingkat Lokal, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Kebudayaan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, tahun 1992/1993.
- Replika Sejarah Perjuangan Rakyat Yogyakarta, Dinas Sosial Provinsi DIY, 1983.

- Riwayat Singkat Kyai Muhdi (dokumen unpublished)
- Sartono Kartodirdjo, dkk., *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
- Sartono Kartodirdjo, *protest Movement In Rural Java*, London, Oxford University Press 1975.
- Sartono Kartodirdjo, *Ratu Adil*, Sinar harapan, Jakarta, 1984.
- Sartono Kartodirdjo, *Kepemimpinan Dalam Sejarah Indonesia*, Majalah Pusara, 1974.
- Sartono Kartodirdjo, (editor), *Revolusi Perancis*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1989.
- Sartono Kartodirdjo, *Wajah Revolusi Indonesia di Pandang dari Perspektif Struktural*, Prisma, 8 Agustus 1981.
- Stanly P. Wagner, *The End of Revolution a New Assesment of Today's Rebellions*, New York: Bomes and Company, NC 1970.
- Suratmin, *Askar Perang Sabil Sebagai Kekuatan Sosiaoreligius Dalam Masa Revolusi Phisik di DIY*, Balai Kajian Jarahnitra, Yogyakarta, 1994/1995.
- Suyam, Fx. dkk. *Setengah Abad Gereja Santo Petrus dan Paulus Klepu: Sejarah dan Umatnya*, Panitia Peringatan Setengah Abad (Dokumen Unpublished)
- 60 Tahun Gereja Hati Kudus Yesus Pugeran 1934-1994, Panitia Peringatan 60 Tahun Gereja Pugeran, Yogyakarta 1994.
- Tashadi, dkk., *Sejarah Perjuangan Hisbullah Sailillah Divisi Sunan Bonang*, Yayasan Bhakti Utama, Surakarta, bekerjasama MSI Cabang Yogyakarta, Cetakan I Tahun 1997.
- Yon Bank, *Katholik di Masa Revolusi Indonesia* (terjemahan Tim KITLV) Grasindo, Jakarta, 1999.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : KH. Mujab Muhandi
Umur : 75 th
Jabatan dulu : Komandan Batalyon Qolid bin Walid APS
Jabatan Sekarang : Pengasuh Pondok Pesantren "Al Muhandi"
Alamat : Krapyak Lor, Wedomartani, Ngemplak, Sleman
2. Nama : KH. Mudasir Muhandi
Umur : 72 th
Jabatan dulu : Anggota Batalyon Ahmad Hadi Jaya
Jabatan Sekarang : Pengasuh Pondok Pesantren "Al Muhandi"
Alamat : Krapyak Lor, Wedomartani, Ngemplak, Sleman
3. Nama : Sastra Suwignya
Umur : 79 th
Jabatan dulu : Anggota Majelis Gereja Kristen Jawa Sawo Kembar, Gondokusuman
Jabatan Sekarang : Pensiunan Guru
Alamat : Klitren Lor GK III/444 Yogyakarta
4. Nama : Ridwan bin Mukayat
Umur : 72 th
Jabatan dulu : Anggota Laskar APS
Jabatan Sekarang : Anggota Veteran Ranting Plered, NPU 11.011.150
Alamat : Brajan, Wedomartani, Plered Bantul
5. Nama : Suryono
Umur : 65 th
Jabatan dulu : -
Jabatan Sekarang : Pensiunan guru SDN
Alamat : Bora, Banjarmasin, Kalibawang Kulonprogo

6. Nama : KH. Muktar Dawam
 Umur : 69 th
 Jabatan dulu : Anggota Laskar Hisbullah
 Jabatan Sekarang : Pengasuh Pondok Pesantren "Al Huda"
 Alamat : Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman
7. Nama : Sri Pujo
 Umur : 62 th
 Jabatan dulu : -
 Jabatan Sekarang : Takmir masjid, Pathok Nagari
 Alamat : Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman
8. Nama : Karto Harsono
 Umur : 89 th
 Jabatan dulu : Ketua Majelis GKJ Wates
 Jabatan Sekarang : Warga GKJ Sawokembar
 Alamat : -
9. Nama : H. Haiban Hadjid
 Umur : 75 th
 Jabatan dulu : Staf Umum APS
 Jabatan Sekarang : Pensiunan Depag RI
 Alamat : Kauman GM I/292 Yogyakarta
10. Nama : H. Sunarjo
 Umur : 72 th
 Jabatan : Mantan Komandan APS Bantul
 Alamat : Tegal Sari, Kuncen, Yogyakarta
11. Nama : Warso warsito
 Umur : 71 th
 Jabatan : Mantan Kepala Seksi APS Ringinharjo
 Ringinhardjo
 Alamat : Gayam, Ringinhardjo, Bantul
12. Nama : H. Surat Biyanto
 Umur : 70 th
 Jabatan : Mantan Staf Perlengkapan APS
 Bantul
 Alamat : Tegallayang, Pandak, Bantul

13. Nama : H. Jumairi Yasir
 Umur : 75 th
 Jabatan : Mantan Kurir (penghubung)
 Alamat : Sanggrahan Jagalam, Banguntapan, Bantul
14. Nama : KH. Moh. Ridwan
 Umur : 70 th
 Jabatan : Mantan Laskar APS
 Alamat : Brajan Wonokromo, Plered, Bantul
15. Nama : KH. Mahfudz Kholil
 Umur : 80 th
 Jabatan : Mantan Laskar APS
 Alamat : Kedung, Guwasari, Pajangan, Bantul
16. Nama : KH. Ahmad Badawi Khalil
 Umur : 77 th
 Jabatan : Mantan Laskar APS
 Alamat : Deresan, Ringinhardjo, Bantul
17. Nama : H. Mahmud TI.
 Umur : 76 th
 Jabatan : Mantan Laskar APS
 Alamat : Brajan, Bantul
18. Nama : Ahmad Badawi
 Umur : 70 th
 Jabatan : Mantan Laskar APS
 Alamat : Tapen, Argosari, Sedayu, Bantul
19. Nama : M. Dahroni
 Umur : 68 th
 Jabatan : Mantan Laskar APS
 Alamat : Klargon, Argosari, Sedayu, Bantul
20. Nama : KH. Moh. Basri
 Umur : 74 th
 Jabatan : Mantan Laskar APS Sleman
 Alamat : Tobayun, Moyudan, Sleman

21. Nama : KH. Ardani Zaenal
Umur : 69 th
Jabatan : Mantan Laskar APS Sleman
Alamat : Pratan Godean Sleman
22. Nama : KH. Salamuddin
Umur : 83 th
Jabatan : Mantan Laskar APS Komandan
Kompi Logistik
Alamat : Jln. Diponegoro Wates Kulonprogo
23. Nama : KH. Djumairi
Umur : 87 th
Jabatan : Mantan Komandan APS
Alamat : Kauman GM IV/126 Yogyakarta
24. Nama : KH. Mawardi
Umur : 78 th
Jabatan : Mantan Pimpinan APS Gunungkidul
Alamat : Baleharjo Wonosari Gunungkidul

